

**KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN  
PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR DI KAWASAN  
PERDAGANGAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh :

**DESSY ARIFianto  
NIM : L4D004008**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2 0 0 6**

**KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN  
PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR  
DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL**

**Tesis diajukan Kepada  
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**

Oleh :

**DESSY ARIFianto**  
L4D004008

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis

Tanggal .....

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, .....

Pembimbing Utama

**Dr. Ari Pradhanawati, MS**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Ir. Holi Bina Wijaya, MUM.**

**Ir. Retno Widjajanti, MT.**

**Mengetahui**  
Ketua Program Studi  
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

**Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA**

## **PERNYATAAN**

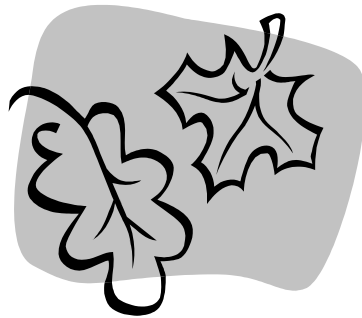
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Pebruari 2006

**DESSY ARIFianto**  
NIM. L4D 004 008

*Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyu'.  
(QS. Al Baqoroh, ayat 45).*

*Pergunakanlah untuk mencapai tujuanmu dengan kesabaran dan sholat, sesungguhnya Alloh selalu membantu orang-orang yang sabar.  
( QS. Al Baqoroh, ayat 153).*



*Kupersembahkan karya ini untuk:  
Istriku, Yessi Ami Purwati  
Anakku, Hilmi Aulia Rahman dan Arifah Nur Kamila  
Atas kasih sayang dan kesabarannya selama ini.*

## ABSTRAK

*Kawasan Perdagangan Banjaran merupakan kawasan perdagangan yang terbesar di Kabupaten Tegal. Letaknya yang strategis yaitu di jalur utama Tegal – Purwokerto menjadikan kawasan ini penuh dengan aktivitas warga kota. Ada dua pasar yang berada di kawasan ini yaitu Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna yang terhubung oleh trotoar. Kondisi trotoar saat ini menjadi tempat aktivitas Pedagang Kaki Lima yang menutupi etalase toko dan menghalangi jalan masuk ke pertokoan. Interaksi antara pertokoan dan Pedagang Kaki Lima belum dikenali bagaimana bentuk interaksinya.*

*Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan suatu kajian mengenai bagaimana interaksi aktivitas pertokoan dan Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menata dan mengelola kawasan perdagangan secara menyeluruh.*

*Analisis yang dilakukan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kuantitatif terhadap interaksi aktivitas pertokoan dan pedagang kaki lima. Dan didukung analisis pembeli dan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap pengelolaan kawasan dan pedagang kaki lima. Dan berdasarkan temuan studi dan untuk lebih mempertajam rekomendasi maka dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui strategi dan arahan dalam penataan Kawasan Perdagangan Banjaran Kabupaten Tegal. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah pertokoan dan pedagang kaki lima dengan menggunakan teknik stratified sampling.*

*Dari analisis yang dilakukan, jenis interaksi yang terjadi antara pertokoan dan Pedagang Kaki Lima yaitu interaksi sosial, ekonomi dan interaksi waktu. Sedangkan bentuk interaksi sebagai berikut: Kerjasama atau mutualisme yaitu terjadinya pertukaran barang dagangan; Persaingan (Competition) yaitu adanya pertokoan yang melarang PKL menyamai jenis dagangannya; Pertentangan (Conflict), konflik terbuka antara pertokoan dan PKL memang tidak terjadi namun dengan adanya laporan atau pengaduan dari pertokoan kepada aparat desa dan teguran pertokoan terhadap aktivitas PKL yang mengganggu aktivitas pertokoan dapat dikatakan adanya potensi konflik; Persesuaian (Accomodation), pertokoan menerima keberadaan PKL karena sama-sama mencari nafkah; Parasialisme, jika dilihat secara sepintas memang hanya PKL yang diuntungkan dengan beraktivitas di trotoar dan bahu jalan karena pendapatannya meningkat, dan pertokoan sebagai pihak yang paling dirugikan. Tapi jika dicermati lebih jauh semua stakeholder kawasan dirugikan*

*Untuk mengatasi permasalahan Kawasan Perdagangan Banjaran strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan menata kawasan dengan melibatkan pelaku utama kawasan yaitu pertokoan, PKL dan pembeli; membuat peraturan daerah yang khusus mengatur PKL dan membuat institusi yang khusus menangani PKL; mengevaluasi rencana tata ruang kota yang ada, dengan memasukkan PKL sebagai bagian elemen kota; arahan penataan dan kebutuhan ruang aktivitas PKL di Kawasan Perdagangan.*

*Kata Kunci: pertokoan, pedagang kaki lima, interaksi aktivitas.*

## ABSTRACT

*Banjaran Trade Center is the biggest trade center in Tegal Regency. Because of its strategic site, which is situated on the main street connecting Tegal-Purwokerto, this area becomes the activity center of the city resident. There are two traditional markets in this area, Pasar Banjaran and Pasar Adiwerna, which are connected by sidewalk. The peddlers use the sidewalk to do their activities. The peddlers' activities cover the shops window and cut off the entrance of the shops. The interaction between the shops and the peddlers has not been known.*

*Based on the facts above, it is necessary to do a study about the interaction between the shop's and the peddler's activities. This study will be a positive input for the government of Tegal Regency in arranging and organizing the trade center as the whole.*

*This study uses quantitative descriptive analysis towards the interactions between shops and peddlers activities. It is also supported by an analysis of the buyers and an analysis of the policy being used by the government of Tegal Regency towards the management of trade center and peddlers. Moreover, based on the findings of this study and in order to sharpen the recommendation, the researcher makes a SWOT analysis to find the strategy and guidelines used in organizing the Banjaran Trade Center of Tegal Regency. The samples used in this study are the shops and peddlers. This study uses stratified sampling technique.*

*The findings of the study show that there are three kinds of interaction between the shops and the peddlers. They are social, economic and time interaction. There are five types of interactions found in this study. The first type of interaction is Cooperation or Mutualism, for example, the good exchange. The second type is Competition, for example, shops' owners forbid the peddlers to sell the same products. The third type is Conflict. There is no conflict emerges so far, but the shops' owners have made some reports to the public servants who are in charge of this area and they also warn the peddler for disturbing the shops' activities. These conditions are potentially causing a conflict. The forth type is Accommodation. The shops' owners can accept the peddlers' existence because they realize that they have the same purpose, making money to survive. The last type is Parasitism. It seems that the peddler is the only side which gains the benefits and the shop's owner gains the negative effect, but actually all the stakeholders in this area get the negative effects.*

*The strategies that can be used in order to solve the problem in Banjaran Trade Center are first by organizing the area by involving the main agents i.e. the owners of the shops, peddlers and buyers, second by making a territory regulation which is especially regulate the peddlers and setting a special institution to be in charge of the peddlers, third by evaluating the planning of the city design by including the peddlers as a part of the city element, fourth by making a guideline of organizing the need of space for peddlers to do their activities in the Trade Center.*

*Key words: shops, peddlers, and interaction of activity*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah hirobbil alamiin.* Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan tesis dengan judul "Kajian Interaksi Aktivitas Pertokoan dan Pedagang Kaki Lima Pada Trotoar Di Kawasan Perdagangan Banjaran Kabupaten Tegal". Studi ini dilakukan untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara pertokoan dengan pedagang kaki lima pada trotoar di kawasan perdagangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA**, selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
2. **Dr. Ari Pradhanawati, MS**, selaku pembimbing utama yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan disela-sela kesibukannya.
3. **Ir. Holi Bina Wijaya, MUM**, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan disela-sela kesibukan tugas dan kegiatannya.
4. **Ir. Retno Widjajanti, MT**, selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan disela-sela kesibukan tugas dan kegiatannya.
5. **Ir. Enny Soekoer, MA**, selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini.
6. **Ir. Hadi Wahyono, MA**, selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini.
7. **Pusbindiklatren BAPPENAS** yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh studi ini.
8. **Bupati Tegal** yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi.

9. Staf pengajar di Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang yang telah membuka wawasan penulis selama menempuh studi.
10. Staf administrasi di Magister Teknik Pembangunan Wlayah dan Kota, mbak Ratih, mbak Didin, mbak Ari, mbak Dian, mbak Kiki, mas Supri dan mas Nur yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan tesis ini.
11. Keluarga Pakembaran dan Ujungrusi atas dukungan semangat dan do'anya.
12. Sahabat Bappenas-UNDIP Angkatan I, atas kebersamaan dan kekompakan selama studi MPWK - UNDIP, merupakan kenangan yang indah dan tak terlupakan.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis menantikan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menjadikan karya ilmiah ini lebih baik .

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, Pebruari 2006  
Penulis

DESSY ARIFianto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Sasaran Penelitian .....	5
1.3.3 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial .....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial .....	8
1.5 Posisi Penelitian .....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Pendekatan Penelitian .....	14
1.7.1 Metode Analisis .....	14
1.7.1.1 Teknik Analisis Distribusi Frekuensi.....	14
1.7.1.2 Analisis Deskriptif .....	16
1.7.1.3 Analisis Interaksi Aktivitas Pertokoan dan PKL ...	16
1.7.1.4 Analisis SWOT Kawasan Perdagangan Banjaran..	17
1.7.2 Kebutuhan Data.....	18
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	20
1.7.5 Populasi dan Sampel .....	24
1.7.5.1 Populasi .....	24
1.7.5.2 Jumlah Sampel .....	24
1.7.5.3 Metode dan Teknik Sampel .....	24
1.8 Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN           DAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR .....</b>	<b>30</b>
2.1 Pertokoan .....	30
2.2 Sektor Informal .....	30
2.3 Pedagang Kaki Lima Dalam Sektor Informal .....	32

2.3.1 Karakteristik Aktivitas PKL.....	34
2.3.1.1 Jenis Dagangan .....	34
2.3.1.2 Bentuk Sarana Perdagangan.....	34
2.3.1.3 Pola Penyebaran.....	36
2.3.1.4 Pola Pelayanan .....	37
2.4 Ruang Publik Sebagai Ruang Interaksi Aktivitas .....	40
2.4.1 Trotoar .....	41
2.4.2 Bahu Jalan .....	41
2.5 Pemanfaatan Trotoar .....	42
2.6 Permasalahan pada Ruang Publik .....	43
2.7 Kajian Empiris Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Kawasan dan PKL .....	44
2.7.1 Contoh-contoh Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	45
2.8 Interaksi .....	49
2.8.1 Interaksi Keruangan .....	49
2.8.2 Interaksi Sosial.....	50
2.8.3 Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Interaksi Sosial ....	51
2.8.4 Aktivitas .....	53
2.8.5 Bentuk-bentuk Interaksi Sosial.....	54
2.9 Bentuk Interaksi Aktivitas Sektor Formal dengan PKL .....	55
2.9.1 Interaksi Mutualisme.....	55
2.9.2 Interaksi Parasialisme.....	56
2.9.3 Interaksi Persaingan .....	57
2.9.4 Interaksi Pertentangan (Konflik).....	57
2.9.5 Interaksi Akomodatif .....	58
2.10 Rangkuman Kajian Literatur.....	58
2.11 Variabel-variabel Penelitian.....	59

<b>BAB III KONDISI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL.....</b>	<b>62</b>
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal .....	62
3.2 Gambaran Umum Kecamatan Adiwerna .....	62
3.3 Gambaran Umum Kawasan Perdagangan Banjaran .....	69
3.3.1 Pasar Banjaran.....	71
3.3.2 Pasar Adiwerna .....	72
3.4 Aktivitas Pertokoan .....	73
3.5 Aktivitas PKL di Banjaran.....	74
3.5.1 Aktivitas PKL di Trotoar Jalan Raya Selatan .....	74
3.5.2 Aktivitas PKL di Trotoar Jalan Raya Barat .....	75
3.5.3 Sifat Usaha Pedagang Kaki Lima .....	75
3.5.4 Alat Dagang Pedagang Kaki Lima.....	76
3.5.5 Luas Ruang Usaha PKL.....	76
3.5.6 Penyimpanan Alat Dagang PKL.....	77
3.6 Aktivitas Terminal Bayangan .....	78

3.7 Pengelolaan Kawasan Perdagangan oleh Pemkab. Tegal .....	79
3.7.1 Kebijakan Oleh Kantor Pengelolaan Pasar .....	80
3.7.2 Kebijakan Oleh Kantor SATPOL PP .....	81
3.7.3 Kebijakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan (DLHKP) .....	83
3.7.4 Kebijakan Oleh Kantor Kecamatan Adiwerna.....	83
3.7.5 Kebijakan Oleh Desa Adiwerna dan Tembok Banjaran ....	84
3.7.6 Peraturan Daerah Yang Berkaitan dengan PKL.....	84
3.8 Permasalahan Kawasan dan Pemanfaatan Trotoar .....	87
3.9 Kasus: Kebakaran Toko di Banjaran, 15 September 2005 .....	89

**BAB IV ANALISIS INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN  
DAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR  
DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN .....**

4.1 Analisis Karakteristik Kawasan .....	91
4.1.1 Analisis Keberadaan PKL di Kawasan Perdagangan .....	91
4.1.1.1 Faktor Eksternal .....	92
4.1.1.2 Faktor Internal.....	92
4.1.2 Analisis Persepsi Pedagang Kaki Lima .....	97
4.1.2.1 Persepsi PKL Terhadap Tempat Berdagang .....	97
4.1.2.2 Persepsi PKL Terhadap Kebijakan Pemda .....	100
4.1.3 Analisis Persepsi Pertokoan Terhadap Kebijakan Pemda..	102
4.1.4 Analisis Persepsi Pembeli .....	104
4.1.4.1 Persepsi Pembeli Terhadap Tempat Belanja.....	104
4.1.4.2 Persepsi Pembeli Terhadap Keberadaan PKL.....	105
4.2 Analisis Jenis Interaksi Aktivitas Pertokoan dan PKL .....	107
4.2.1 Interaksi Sosial .....	108
4.2.2 Interaksi Ekonomi .....	110
4.2.2.1 Keterkaitan Jenis Dagangan.....	110
4.2.2.2 Pola Pengelompokan dan Penyebaran .....	111
4.2.2.3 Interaksi Dagangan antara Pertokoan dan PKL .....	114
4.2.3 Interaksi Waktu .....	115
4.3 Analisis Bentuk Interaksi Pertokoan dan PKL .....	118
4.3.1 Mutualisme.....	118
4.3.2 Parasialisme .....	119
4.3.3 Persaingan .....	122
4.3.4 Konflik .....	124
4.3.5 Akomodatif .....	126
4.4 Interaksi Aktivitas Pertokoan dan PKL pada Trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran Kabupaten Tegal.....	127
4.5 Analisis SWOT Rekomendasi dan Kawasan Perdagangan .....	138
4.5.1 Kekuatan .....	138
4.5.2 Kelemahan .....	139
4.5.3 Peluang .....	139
4.5.4 Ancaman .....	139
4.5.5 Strategi SWOT .....	140

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	143
	5.1 Kesimpulan .....	143
	5.2 Rekomendasi .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		148
<b>LAMPIRAN</b> .....		151

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 : Peta Kabupaten Tegal .....	9
GAMBAR 1.2 : Kerangka Pemikiran.....	13
GAMBAR 1.3 : Kerangka Analisis Penelitian .....	23
GAMBAR 2.1 : Pola Penyebaran Mengelompok .....	36
GAMBAR 2.2 : Pola Penyebaran Memanjang.....	37
GAMBAR 2.3 : Rancangan Lokasi Waroeng Semawis .....	47
GAMBAR 2.4 : Suasana Aktivitas Taman Sari Shopping Centre Salatiga .....	48
GAMBAR 3.1 : Lokasi Tiga Pasar di Kecamatan Adiwerna .....	68
GAMBAR 3.2 : Peta Kota Adiwerna .....	70
GAMBAR 3.3 : Foto Aktivitas Di Depan Pasar Banjaran .....	72
GAMBAR 3.4 : Foto Aktivitas Di Depan Pasar Adiwerna.....	73
GAMBAR 3.5 : Foto Alat Dagang PKL .....	77
GAMBAR 3.6 : Foto Alat Dagang PKL Yang Ditinggal di Trotoar .....	78
GAMBAR 3.7 : Foto Operasi Penertiban PKL oleh SATPOL PP.....	82
GAMBAR 3.8 : Foto Aktivitas Kawasan Perdagangan Banjaran.....	87
GAMBAR 3.9 : Sketsa Kawasan Perdagangan Banjaran .....	88
GAMBAR 3.10: Foto Kebakaran Toko di Jalan Raya Selatan .....	90
GAMBAR 4.1 : Penyebab PKL bertempat di Trotoar dan Bahu Jalan .....	96
GAMBAR 4.2 : Persepsi PKL Terhadap Tempat Berdagang .....	97
GAMBAR 4.3 : Persepsi PKL Terhadap Keamanan.....	98
GAMBAR 4.4 : Persepsi PKL Terhadap Kondisi Berdesakan di Trotoar .....	98
GAMBAR 4.5 : Persetujuan PKL Terhadap Penataan Kawasan .....	99
GAMBAR 4.6 : Papan Pengumuman Larangan Berjualan Di Trotoar .....	101
GAMBAR 4.7 : Persetujuan Pertokoan Terhadap Penataan Kawasan.....	103
GAMBAR 4.8 : Persepsi Pembeli Terhadap Tujuan Tempat Belanja .....	105
GAMBAR 4.9 : Persetujuan Pembeli Terhadap Penataan Kawasan .....	107
GAMBAR 4.10: Persepsi Pertokoan: Dimintai Ijin Oleh PKL .....	109
GAMBAR 4.11: Foto Pengelompokan Jenis Dagangan .....	112
GAMBAR 4.12: Interaksi Jenis Dagangan Pertokoan dan PKL.....	113
GAMBAR 4.13: Interaksi Waktu Pertokoan dan PKL .....	117
GAMBAR 4.14: Pertokoan Terganggu Oleh PKL.....	119
GAMBAR 4.15: Aktivitas PKL di Jalan Raya Selatan Yang Menutupi Toko ..	120
GAMBAR 4.16: Peningkatan Penghasilan Pertokoan .....	121
GAMBAR 4.17: Persepsi Pertokoan Terhadap Persaingan Dengan PKL .....	122
GAMBAR 4.18: Persepsi PKL Terhadap Persaingan Dengan Pertokoan .....	123
GAMBAR 4.19: Persepsi PKL Terhadap Teguran Oleh Pertokoan .....	125
GAMBAR 4.20: Penerimaan Pertokoan Terhadap PKL.....	126
GAMBAR 4.21: Mekanisme Interaksi Aktivitas Pertokoan dan PKL.....	128
GAMBAR 4.22: Bentuk Interaksi Mutualisme .....	130
GAMBAR 4.23: Bentuk Interaksi Parasialisme .....	131
GAMBAR 4.24: Bentuk Interaksi Persaingan.....	133
GAMBAR 4.25: Bentuk Interaksi Konflik.....	135
GAMBAR 4.26: Bentuk Interaksi Akomodatif.....	136

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Posisi Penelitian .....	10
TABEL I.2	: Variabel Bentuk Interaksi.....	17
TABEL I.3	: Metode Analisis SWOT .....	18
TABEL I.4	: Kebutuhan Data.....	22
TABEL I.5	: Populasi dan Sampel PKL Trotoar .....	26
TABEL I.6	: Populasi dan Sampel PKL Bahu Jalan .....	26
TABEL I.7	: Populasi dan Sampel Pertokoan .....	27
TABEL II.1	: Peraturan Kota Semarang .....	46
TABEL III.1	: Pembagian Wilayah Administratif di Kabupaten Tegal.....	63
TABEL III.2	: Luas Wilayah Desa dan Kepadatan Penduduk.....	66
TABEL III.3	: Jumlah Pasar dan Toko di Kecamatan Adiwerna.....	67
TABEL III.4	: Jumlah Pedagang Pasar Banjaran.....	71
TABEL III.5	: Kapasitas Pasar Banjaran .....	71
TABEL III.6	: Jumlah Pedagang Pasar Adiwerna .....	72
TABEL III.7	: Kapasitas Pasar Adiwerna .....	73
TABEL III.8	: Sifat Usaha Pedagang Kaki Lima.....	75
TABEL III.9	: Alat Dagang Pedagang Kaki Lima .....	76
TABEL III.10	: Luas Ruang Usaha Pedagang Kaki Lima .....	77
TABEL III.11	: Penyimpanan Alat Dagang PKL .....	78
TABEL III.12	: Retribusi Pasar.....	81
TABEL III.13	: Rangkuman Peraturan Daerah.....	86
TABEL IV.1	: Lama Usaha Pedagang Kaki Lima .....	93
TABEL IV.2	: Tempat PKL Sebelum di Trotoar dan Bahu Jalan.....	94
TABEL IV.3	: Alasan Keluar Dari Pasar .....	94
TABEL IV.4	: Alasan PKL Bertempat di Trotoar dan Bahu Jalan .....	95
TABEL IV.5	: Pendapatan PKL di Trotoar dan Bahu Jalan .....	95
TABEL IV.6	: Alasan PKL Tidak Sesuai Berdagang di Trotoar/Bahu Jalan ...	97
TABEL IV.7	: Usulan Penataan Oleh PKL.....	99
TABEL IV.8	: Persepsi PKL Terhadap Peraturan Daerah .....	100
TABEL IV.9	: Persepsi PKL Terhadap Retribusi .....	101
TABEL IV.10	: Persepsi Pertokoan Terhadap Kebijakan Pemda .....	102
TABEL IV.11	: Alasan Persetujuan Pertokoan Terhadap Penertiban .....	102
TABEL IV.12	: Alasan Ketidaksetujuan Pertokoan Terhadap Penertiban .....	103
TABEL IV.13	: Usulan Penataan Oleh Pertokoan .....	104
TABEL IV.14	: Persepsi Pembeli Terhadap PKL di Trotoar/Bahu Jalan .....	106
TABEL IV.15	: Persepsi Pembeli Terhadap PKL Yang Berdesakan .....	106
TABEL IV.16	: Usulan Penataan Oleh Pembeli .....	107
TABEL IV.17	: Persepsi PKL Ijin (Permisi) Menempati Trotoar/Bahu Jalan ...	109
TABEL IV.18	: Jenis Usaha Pertokoan .....	110
TABEL IV.19	: Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima .....	111
TABEL IV.20	: Interaksi Dagangan (Persepsi Pertokoan) .....	114
TABEL IV.21	: Interaksi Dagangan (Persepsi PKL) .....	114
TABEL IV.22	: Sumber Bahan Baku PKL .....	115

TABEL IV.23: Titip Alat Saat Penertiban .....	119
TABEL IV.24: Alasan Toko Terganggu .....	120
TABEL IV.25: Persepsi Pertokoan Dengan Adanya PKL .....	121
TABEL IV.26: Persepsi PKL Terhadap Jenis Persaingan Dengan Pertokoan .	123
TABEL IV.27: Teguran Pertokoan Terhadap PKL .....	124
TABEL IV.28: Alasan Penerimaan Pertokoan Terhadap PKL .....	127
TABEL IV.29: Rangkuman Bentuk Interaksi .....	137
TABEL IV.30: SWOT Rekomendasi Penataan Kawasan Perdagangan .....	142

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	: Kuesioner Untuk Pemilik Toko .....	151
LAMPIRAN B	: Kuesioner Untuk Pedagang Kaki Lima .....	156
LAMPIRAN C	: Kuesioner Untuk Pembeli.....	162
LAMPIRAN D	: Daftar Pertanyaan Untuk Dinas/ Instansi Terkait .....	163
LAMPIRAN E	: Kode Jawaban Pemilik Toko.....	164
LAMPIRAN F	: Kode Jawaban Pedagang Kaki Lima .....	166
LAMPIRAN G	: Kode Jawaban Pembeli.....	170
RIWAYAT HIDUP PENULIS	.....	171

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan dan perkembangan sektor informal diperkotaan selain diakibatkan oleh krisis ekonomi berkepanjangan dan mengakibatkan pengangguran juga akibat kegagalan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja formal, yang pada umumnya berpusat dikota. Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, sehingga kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagai memiliki kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi migrasi penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Pilihan untuk bekerja pada sektor informal mempunyai banyak hambatan karena pemerintah memperlakuan sektor informal berbeda dengan sektor formal. Sektor informal yang tidak diakomodir dalam rencana tata ruang kota dalam aktivitasnya hampir selalu menempati ruang publik kota dengan segala ketidakteraturannya dan pemerintah kabupaten/kota cenderung menggunakan

pendekatan kekuasaan (pola usir dan gusur) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian keberadaan sektor informal bagaikan buah simalakama, karena dari sisi ekonomi mampu mengurangi pengangguran dan mencukupi kebutuhan masyarakat kelas menengah dan bawah serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun disisi lain sifatnya yang sukar diatur, seenaknya sendiri sehingga menimbulkan permasalahan tata ruang dan sosial seperti kawasan kumuh (*slummy*), *squatter*, kriminalitas dan kemacetan lalu lintas sehingga fungsi ruang publik menjadi menurun.

Salah satu sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak diakomodir dalam rencana tata ruang kota sehingga dalam aktivitasnya selalu "menyerbu" ruang publik kota. Ruang publik yang menjadi lokasi aktivitas PKL diantaranya trotoar dan bahu jalan di kawasan perdagangan, dan mengakibatkan gangguan bagi pengguna yang lain seperti pembeli, pemilik toko dan pejalan kaki yang sekedar ingin menikmati kawasan tersebut.

Kawasan Perdagangan Banjaran di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dengan Pasar Banjaran sebagai *focal point* kawasan yang terletak di Jalan Raya Selatan jalur utama Tegal-Purwokerto berlangsung aktivitas PKL yang menempati trotoar dan bahu jalan yang menyambung sekitar 500 meter di Jalan Raya Barat ke arah Pasar Bawang.

Toko-toko di kawasan tersebut tertutup sebagian atau seluruhnya oleh tenda dan lapak-lapak PKL, sehingga menimbulkan kesan kumuh. Etalase-etalase berisi barang dagangan yang diharapkan menjadi daya tarik pembeli untuk mendatangi toko tersebut menjadi tidak kelihatan.

Belum diketahui bagaimana bentuk interaksi antara pertokoan dan PKL apakah saling menguntungkan karena kawasan menjadi ramai oleh pengunjung sehingga barang dagangan akan semakin laku atau merugikan salah satu pihak atau keduanya karena kawasan menjadi kumuh dan semrawut sehingga pengunjung jarang melewati trotoar di kawasan perdagangan tersebut.

Lokasi aktivitas PKL yang menempati trotoar dan bahu jalan yang berhadapan dengan pertokoan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat bahkan menjurus konflik terbuka karena menempati trotoar atau bahu jalan tanpa ijin atau mengganggu aktivitas toko yang sudah dahulu ada.

Pemerintah Kabupaten Tegal sudah berusaha menertibkan PKL berdasarkan perda yang mengatur larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan, namun masih sebatas operasi penertiban. Pemerintah kabupaten belum menemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan PKL, pertimbangan kemanusiaan masih menjadi kendala untuk menata kawasan kota menjadi asri, nyaman, aman dan sehat.

Penataan dan pengelolaan kawasan perdagangan harus dimulai dengan melibatkan semua *stakeholder* antara lain pemilik toko dan PKL sebagai pelaku utama kawasan yang ruang aktivitasnya saling berhadapan di trotoar dan bahu jalan, bentuk interaksi aktivitas keduanya perlu dikenali dan diarahkan pada bentuk hubungan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan masyarakat, terutama dalam pemanfaatan trotoar dan bahu jalan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Aktivitas PKL yang tidak diakomodir dalam rencana tata ruang akan selalu menempati ruang-ruang publik kota seperti trotoar dan bahu jalan di Kawasan Perdagangan Banjaran, aktivitas tersebut selain mengakibatkan kekumuhan dan kesemrawutan kawasan juga membentuk interaksi yang belum dikenali bentuknya.
- Belum berhasilnya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menata dan mengatur Kawasan Perdagangan Banjaran mengakibatkan kesemrawutan dan kekumuhan kawasan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dan dengan maksud untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Tegal atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penanganan masalah PKL dan penataan serta pengelolaan kawasan perdagangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bentuk interaksi aktivitas pertokoan dan PKL pada trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagai salah satu unsur dalam penataan dan pengelolaan secara menyeluruh. Oleh karena itu *research question* yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

***”Bagaimana interaksi aktivitas pertokoan dan pedagang kaki lima pada trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?”***

### **1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan yang terjadi antara pertokoan dan PKL pada trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran berdasarkan interaksi aktivitas keduanya.

#### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan analisis aktivitas pertokoan dan persepsi terhadap PKL serta kebijakan pemerintah daerah.
- b. Identifikasi dan analisis karakteristik aktivitas PKL seperti jenis usaha, waktu usaha, cara mendapatkan barang dagangan, pengelompokan usaha, bentuk sarana dagang, luas ruang yang digunakan dan persepsi terhadap pertokoan dan kebijakan pemerintah daerah tentang penataan kawasan perdagangan.
- c. Identifikasi dan analisis persepsi pembeli pada kawasan yang meliputi alasan pemilihan lokasi belanja dan akses masuk ke pertokoan.
- d. Identifikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang pengelolaan kawasan dan pedagang kaki lima.
- e. Identifikasi dan analisis interaksi aktivitas pertokoan dan PKL yang meliputi interaksi sosial, interaksi ekonomi dan interaksi waktu.
- f. Identifikasi dan analisis bentuk interaksi yang meliputi mutualisme, parasialisme, persaingan, konflik dan akomodatif.

- g. Membuat rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menata Kawasan Perdagangan Banjaran dan PKL.

### **1.3.3 Manfaat Penelitian**

Studi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang pembangunan kota, khususnya dalam pendekatan terhadap masalah pedagang kaki lima dan pertokoan di kawasan perdagangan yaitu dari aspek interaksi yang terjadi diantara keduanya. Kemudian hasil studi ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu masukan sebagai arahan dalam penataan kawasan perdagangan secara menyeluruh, sehingga akan terwujud Kawasan Perdagangan Banjaran yang tertib, bersih dan indah serta semua *stakeholder* kota akan merasa nyaman berada di kawasan perdagangan tersebut.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansial**

Sesuai dengan tujuan penelitian dan sasaran yang ingin dicapai, maka penelitian ini dibatasi pada telaahan sebagai berikut :

1. Karakteristik pertokoan, meliputi :
  - a. Aktivitas pertokoan, terdiri dari jenis usaha dan waktu usaha. Sehingga dapat diketahui perilaku pemilik toko dalam menjalankan usahanya.
  - b. Persepsi pemilik toko terhadap aktivitas PKL yang ada di trotoar, meliputi ijin menempati trotoar, akses masuk ke pertokoan, akses masuk ke pertokoan, jenis usaha PKL, sarana dagang PKL.

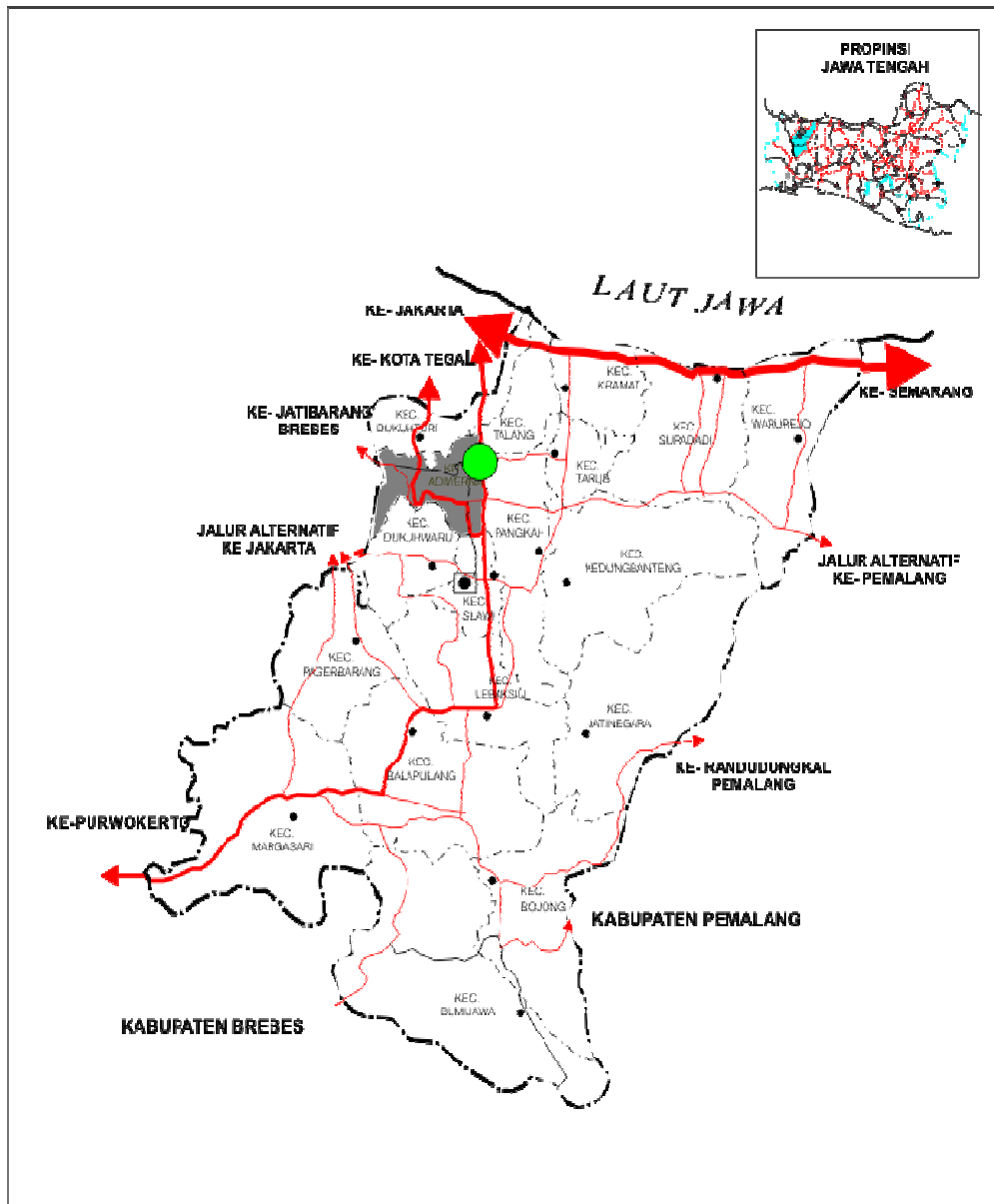
- c. Persepsi terhadap kebijakan pemerintah daerah tentang PKL dan penataan kawasan perdagangan.
2. Karakteristik PKL, meliputi :
  - a. Aktivitas PKL, terdiri dari jenis usaha, waktu usaha, cara mendapatkan barang dagangan, pengelompokan, bentuk sarana dagang, luas ruang.
  - b. Persepsi PKL terhadap toko meliputi ijin/permisi berjualan ditrotoar, persaingan dengan toko, konflik dengan toko
  - c. Persepsi terhadap kebijakan pemerintah daerah tentang penataan kawasan perdagangan dan PKL.
3. Persepsi pembeli pada trotoar terhadap akses masuk ke pertokoan, pemilihan lokasi belanja antara PKL dan toko, serta persepsi terhadap kondisi trotoar dan penataan kawasan perdagangan. Persepsi pembeli sebagai analisis pendukung interaksi aktivitas pertokoan dan PKL.
4. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap PKL serta penataan kawasan perdagangan. Analisis ini juga sebagai analisis pendukung interaksi aktivitas pertokoan dan PKL pada trotoar.
5. Jenis interaksi aktivitas pertokoan dan PKL yang meliputi:
  - a. Interaksi sosial dengan indikator penerimaan atau penolakan pertokoan terhadap aktivitas PKL di trotoar, situasi sosial yang terjadi pada saat itu.
  - b. Interaksi ekonomi dengan indikator pertukaran barang dagangan, keterkaitan jenis dagangan.
  - c. Interaksi waktu dengan indikator keterkaitan waktu aktivitas pedagang kaki lima dengan pertokoan.


6. Bentuk Interaksi aktivitas pertokoan dan PKL pada trotoar, sebagai berikut:
  - a. Interaksi *mutualisme* yaitu interaksi yang saling menguntungkan.
  - b. Interaksi *parasialisme* yang terdiri atas pendapatan salah satu pihak turun, akses masuk ke toko tertutup, depan toko menjadi kumuh.
  - c. Persaingan atau kompetisi yang terdiri atas mengatur jenis dagangan.
  - d. Konflik atau pertentangan yang terdiri atas pemilik toko melarang atau menegur PKL berjualan di depan toko.
  - e. Akomodatif yang terdiri atas pemilik toko “*pasrah*” dengan adanya aktivitas PKL didepannya karena tidak mau konflik dengan PKL atau sama-sama mencari nafkah dan pemilik toko “*pasrah*” terhadap kebijakan pemda yang belum optimal dalam menata kawasan dan PKL.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Spasial**






Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah trotoar di sebelah barat Jalan Raya Selatan dan sebelah selatan Jalan Raya Barat pada Kawasan Perdagangan Banjaran Kecamatan Adiwerna. Adapun dalam menentukan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:



1. Tingginya aktivitas pedagang kaki lima yang menempati trotoar dan bahu jalan tersebut sehingga menimbulkan kemacetan dan kekumuhan kawasan.
2. Menggambarkan kondisi Kawasan Perdagangan Banjaran secara keseluruhan.
3. Kawasan Perdagangan Banjaran berada di jalur utama Tegal – Purwokerto, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



  
 PROGRAM PASCA SARJANA  
 MAGISTER TEKNOLOGI PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMARANG  
**TESIS**  
 KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS  
 PERTANAKAN DAN PKL  
 PADA TRITUKANGDI KAWASAN  
 PERDAGANGAN BAHARUAN  
 KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

**Judul :**  
 PETA KABUPATEN TEGAL

- Legenda :**
- Batas Kecamatan
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lokal Sekunder
  -  Ibukota Kabupaten
  -  Ibukota Kecamatan
  -  Batas Kabupaten
  -  atau Kota Kec. Adiwerna
  -  Kecamatan Adiwerna

UTARA  
  
 SKALA  
 1 : 75.000  
  
 NO. GAMBAR  
 1.  
 SUMBER  
 Bappeda Kabupaten Tegal  
 2024

## 1.5 Posisi Penelitian

Penelitian tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter Evers (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : 3), yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Penelitian terhadap PKL terutama di kota-kota besar di Indonesia yang merupakan bagian dari sektor informal dilakukan oleh Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, pada tahun 1990, yang disponsori oleh *United States Agency for International Development* (USAID). Dari penelitian yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya dikenali adanya kecenderungan munculnya perdagangan sektor informal yang berderet sepanjang jalan di setiap berdirinya gedung bertingkat (Rachbini dan Hamid, 1995 : 90-91).

Beberapa tesis yang melakukan penelitian PKL dapat dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Posisi Penelitian**

No	Nama	Judul	Rekomendasi
1	Srie Hany Ambarwaty, 2003	Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatn Ruang di Kota Salatiga	Perlunya mengenali aktivitas PKL dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya sehingga dapat dikenali lebih dalam apa dan siapa PKL, serta faktor apa yang mempengaruhi perilaku PKL.
2	Aulia Purnama Sari, 2003	Aspek-aspek yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Lokasi Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram	Perlunya penentuan lokasi PKL secara eksplisit yaitu penunjukan secara langsung lokasi yang sesuai bagi pedagang kaki lima berdasarkan kesepakatan <i>stakeholder</i> .
3	Agus Priono, 2004	Persepsi dan Preferensi PKL pindah ke lokasi taman di Tuk Buntung	Pentingnya mengalokasikan luas tempat berdagang PKL sesuai jenis sarana fisik dagangan sehingga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merencanakan penataan PKL di suatu lokasi.

No	Nama	Judul	Rekomendasi
4	Doddy Chamdany, 2004	Kajian dan Arahan Pengembangan Ruang Publik oleh Aktivitas PKL di Kawasan Stadion Manahan Kota Surakarta	Perlunya menentukan kapasitas suatu lokasi dalam memwadahi kegiatan PKL berdasarkan karakteristik kegiatan formal yang menjadi induk/ikutannya
5	Dessy Arifianto, 2006	Kajian Interaksi Aktivitas Pertokoan dan Pedagang Kaki Lima Pada Trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran Kabupaten Tegal	Penataan kawasan perdagangan dengan melibatkan semua <i>stakeholder</i> dengan memperhatikan interaksi yang terjadi

Sumber: Analisis, 2005

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk interaksi aktivitas pertokoan dan pedagang kaki lima pada trotoar dan bahu jalan di Kawasan Perdagangan Banjaran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan distribusi frekuensi.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Kawasan Perdagangan Banjaran dengan lokasinya yang sangat strategis yaitu berada di jalur utama Tegal – Purwokerto sudah saatnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Permasalahan PKL, terminal bayangan, parkir yang semrawut, sampah dan penyakit sosial adalah bukti kawasan tersebut perlu ditata.

Salah satu permasalahan kawasan yang perlu penanganan tersendiri adalah Pedagang Kaki Lima pertumbuhannya sangat cepat dan menimbulkan permasalahan bagi ruang publik seperti kemacetan dan kekumuhan lingkungan karena menempati trotoar dan bahu jalan. Pedagang Kaki Lima sudah saatnya mendapat tempat dalam perencanaan tata ruang kota. Untuk itu menganalisis

interaksi yang terjadi antara pertokoan dan PKL pada trotoar dan bahu jalan di kawasan perdagangan perlu dilakukan sebagai salah satu elemen dalam penataan dan pengelolaan kawasan secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan sasaran penelitian. Sasaran pertama adalah mengidentifikasi karakteristik aktivitas pertokoan dan PKL, dilanjutkan dengan identifikasi interaksi yang terjadi antar keduanya, untuk mendukung analisis interaksi aktivitas keduanya dilakukan juga identifikasi persepsi pembeli pada kawasan serta identifikasi kebijakan pemerintah terhadap penataan kawasan dan PKL. Langkah kedua adalah melakukan analisis penelitian, yaitu meliputi analisis karakteristik aktivitas pertokoan, analisis aktivitas PKL, analisis interaksi aktivitas pertokoan dan PKL, analisis persepsi pembeli pada trotoar dan identifikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dari hasil analisis dapat dihasilkan bentuk interaksi aktivitas pertokoan dan PKL pada trotoar. Untuk mendukung analisis, dilakukan kajian literatur interaksi, interaksi keruangan, interaksi sosial, aktivitas, PKL, lokasi aktivitas dan trotoar yang menjadi ruang aktivitasnya serta kajian empiris kebijakan pemerintah.

Dengan pendekatan dan metode penelitian yang tepat diharapkan diakhir penelitian dapat ditemukan suatu jawaban terhadap *research question*, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menangani PKL dan menata kawasan. Adapun gambar kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



## **1.7 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana interaksi aktivitas pertokoan dan pedagang kaki lima pada trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran Kabupaten Tegal?”. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan studi adalah pendekatan dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang sesuatu hal seperti apa adanya (Mukhtar dan Widodo, 2000:28). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh deskriptif atau gambaran tentang interaksi aktivitas pertokoan dengan PKL pada trotoar, jenis interaksi yang akan dilihat tidak hanya yang sifatnya interaksi aktivitas ekonomi namun juga interaksi sosial, hal ini dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang interaksi pertokoan dan PKL yang terjadi .

### **1.7.1 Metode Analisis**

Metode Analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sedangkan teknik analisis kuantitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan tabel distribusi frekuensi.

#### **1.7.1.1 Teknik Analisis Distribusi Frekuensi**

Teknik analisis distribusi frekuensi dipergunakan pada analisis sebagai berikut:

##### **A. Analisis Karakteristik Pertokoan**

Yaitu analisis terhadap pertokoan yang tertutup sebagian atau seluruhnya oleh aktivitas PKL. Sasaran dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi aktivitas pertokoan dengan lingkup pembahasan jenis

usaha, waktu usaha dan keterkaitan dengan aktivitas PKL. Pembahasan materi ini juga melihat analisis persepsi terhadap PKL, trotoar dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan pemetaan (distribusi frekuensi), dengan cara observasi lapangan, wawancara dan penyebaran kuesioner.

#### B. Analisis Karakteristik PKL

Yaitu analisis terhadap aktivitas PKL pada trotoar di Banjarnegara, tujuan dari analisis ini untuk mengetahui karakteristik aktivitas PKL. Adapun sasaran yang akan dicapai dalam analisis ini adalah untuk mengidentifikasi aktivitas PKL, seperti sumber dagangan, jenis dagangan, jenis sarana fisik berdagang, pola pelayanan, pengelompokan. Untuk mempertajam analisis dilakukan juga analisis persepsi PKL terhadap trotoar, pertokoan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Adapun metode yang akan digunakan dalam analisis ini adalah analisis deskriptif dengan pemetaan (distribusi frekuensi), dengan cara observasi lapangan dan penyebaran kuesioner. Sumber data lain yang dipergunakan yaitu dari Kantor Pengelolaan Pasar dan instansi terkait.

#### C. Analisis Persepsi Pembeli pada Trotoar

Yaitu analisis terhadap pembeli pada trotoar. Sasaran dari analisis ini yaitu untuk melihat pemilihan tempat berbelanja dan akses masuk ke pertokoan oleh pembeli. Analisis ini sebagai kajian pendukung dalam melihat interaksi aktivitas pertokoan dan PKL. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan pemetaan (distribusi frekuensi).

### **1.7.1.2 Analisis Deskriptif**

#### **A. Analisis Keberadaan PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran.**

Sasaran analisis ini yaitu faktor-faktor pendorong keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan bahu jalan. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor internal dan eksternal.

#### **B. Analisis Identifikasi Kebijakan Penataan Kawasan Perdagangan Banjaran dan PKL.**

Sasaran dari analisis ini yaitu peraturan daerah dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Analisis ini juga sebagai kajian pendukung dalam melihat interaksi aktivitas pertokoan dan PKL. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan wawancara terhadap dinas/instansi terkait.

### **1.7.1.3 Analisis Interaksi Aktivitas Pertokoan dan PKL**

Yaitu analisis terhadap interaksi aktivitas pertokoan dan pedagang kaki lima pada trotoar di Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui mekanisme interaksi yang terdiri atas jenis interaksi yaitu interaksi sosial, interaksi ekonomi, interaksi waktu dan bentuk interaksi yaitu mutualisme, parasialisme, persaingan, konflik, dan akomodatif. Analisis bentuk interaksi berdasarkan keterkaitan antar analisis yang telah dilakukan diatas.

Adapun variabel-variabel bentuk interaksi sebagaimana Tabel I.2 berikut ini.

**TABEL I.2**  
**VARIABEL-VARIABEL BENTUK INTERAKSI**

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Mutualisme	▪ Pertukaran atau saling membeli barang dagangan.
2	Parasialisme	▪ Akses masuk ke toko tertutup.
3	Persaingan (Kompetisi)	▪ Mengatur jenis dagangan PKL ▪ Pembeli ▪ Harga
4	Konflik (Pertentangan)	▪ Melarang PKL berjualan di depan toko. ▪ Menegur PKL yang berada di depan toko.
5	Akomodatif	▪ Pemilik toko “ <i>pasrah</i> ” atau menerima apa adanya PKL didepannya karena tidak mau konflik dengan PKL. ▪ Pemilik toko “ <i>pasrah</i> ” terhadap kebijakan pemda yang belum optimal dalam menata kawasan perdagangan dan PKL.

*Sumber : Hasil Analisis 2005*

#### **1.7.1.4 Analisis SWOT Kawasan Perdagangan Banjaran**

Yaitu analisis untuk mengetahui kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) terhadap Kawasan Perdagangan Banjaran berdasarkan interaksi aktivitas pertokoan dan Pedagang Kaki Lima.

Analisis SWOT menurut Santoso dan Tangkilisan (2004:37) sebagai alat alat identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan potensi dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman sehingga akan memberikan output berupa target atau perlakuan untuk mencapai tujuan. Adapun tabel analisis SWOT sebagai berikut.

**TABEL I.3**  
**METODE ANALISIS SWOT**

EKSTERNAL INTERNAL	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Strength (Kekuatan)	memanfaatkan kekuatan dan mengisi peluang	memanfaatkan kekuatan dan mengatasi ancaman
Weakness (Kelemahan)	mengatasi kelemahan dan mengisi peluang	mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman

*Sumber: Santosa dan Tangkilisan., 2004:111*

### 1.7.2 Kebutuhan Data

Kebutuhan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap objek penelitian dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu permasalahan dikawasan penelitian. Data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder.

#### A. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara langsung menggunakan kuesioner sebagai panduan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan sasaran penelitian, yaitu mengidentifikasi aktivitas dari setiap subjek penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Wawancara dan angket dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini , yang terdiri dari :

- Pelaku aktivitas pertokoan yaitu pemilik toko.
- Pelaku aktivitas PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan

- Pembeli pada ruang publik yaitu sedang berbelanja pada PKL atau toko.
- Untuk mengetahui gambaran tentang kebijakan-kebijakan terhadap sektor informal dan penataan serta pengelolaan kawasan dilakukan pula wawancara dengan nara sumber yaitu pihak Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini dinas atau instansi terkait.

#### B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber lain , seperti menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang tercatat oleh kantor/dinas/instansi terkait, diantaranya berupa gambaran wilayah Kabupaten Tegal dan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan terhadap sektor informal dan penataan serta pengelolaan.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Wawancara mendalam langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan yang diajukan kepada responden.
- 2 Angket (*questionnaire*), yakni dengan melalui daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.
- 3 Observasi lapangan atau pengamatan langsung dilapangan untuk meneliti atau mengukur obyek penelitian secara sistematis.

- 4 Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan.

#### **1.7.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Hasil dari data primer sifatnya masih mentah, sehingga agar data tersebut lebih berguna bagi penelitian diperlukan suatu pengolahan dan penyajian data . Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam teknik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Editing, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk, apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. Editing dilakukan dengan harapan akan diperoleh data yang benar-benar valid dan *reliable* , serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. *Coding*, proses berikutnya setelah editing adalah pemberian kode. Kode diberikan pada catatan-catatan lapangan, hasil observasi, data dari dokumentasi dan jawaban pertanyaan yang diberikan responden. Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan analisa, yaitu memungkinkan untuk menemukan dengan cepat dan menggolongkan seluruh bagian yang berhubungan dengan permasalahan tertentu, hipotesa, konsep maupun tema. Jadi kode-kode yang diberikan tersebut merupakan alat untuk mengorganisasikan dan menyusun data yang berupa kata-kata.
3. Tabulasi, yang merupakan tahap memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka sehingga mudah menganalisisnya. Penyajian data

dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sedangkan untuk data sekunder tidak diperlukan lagi pengolahan lebih lanjut, karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.

Rangkuman kebutuhan dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan secara rinci serta kerangka analisis dapat dilihat pada Tabel I.4 halaman 22 dan Gambar 1.3 halaman 23 berikut ini.





## **1.7.5 Populasi dan Sampel**

### **1.7.5.1 Populasi**

Berkaitan dengan teknik pengumpulan data primer, maka populasi yang menjadi sasaran penelitian di Kawasan Perdagangan Banjaran adalah pelaku aktivitas yaitu pemilik toko, PKL dan penduduk Kecamatan Adiwerna sebagai populasi pembeli.

### **1.7.5.2 Jumlah Sampel**

Agar sampel yang diambil cukup representatif untuk dapat mewakili keseluruhan populasi, maka diambil cara pengambilan sampel yang baik. Jumlah sampel yang digunakan untuk setiap objek dalam penelitian ini (pemilik toko, PKL, pembeli) ditentukan dengan rumus (Rakhmat, 2001:82) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

d = Persen Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (derajat kecermatan) sebesar 5-10 %

### **1.7.5.3 Metode dan Teknik Sampling**

Metode dan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu random stratifikasi yaitu peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok dan secara random memilih subsampel dari setiap kelompok. Metode ini menurut Kuncoro (2003:114) hasilnya lebih mewakili populasi secara keseluruhan sehingga meningkatkan efisiensi secara statistik karena peneliti mengontrol jumlah sampel dalam strata dan memberikan beberapa alternatif metode strata serta hasilnya tidak bias. Selanjutnya setelah distratifikasi, pengambilan jumlah

sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan prosentase jenis dagangan PKL maupun toko.

**A. Sampel Pedagang Kaki Lima:**

Informasi awal dari Kantor Pasar Adiwerna ada 178 pedagang dalam pasar yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, dan dari Kantor Pasar Banjaran sebanyak 55 pedagang dalam pasar yang berjualan luar pasar. Sedangkan dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada bulan Juli 2005 dapat diketahui populasi PKL sebanyak 322 yang terdiri dari PKL yang berada di trotoar sejumlah 204 (63%) dan PKL bahu jalan 118 (37%) ada selisih 89 PKL. Untuk memperoleh sampel yang lebih representatif maka penulis menggunakan data hasil observasi dalam penghitungan sampel. Dengan menggunakan rumus di atas maka sampel yang dibutuhkan yaitu :

$$\frac{322}{1 + 322 \times (0,1)^2} = 76,30 \text{ dibulatkan } 76 \text{ PKL}$$

Dari 76 PKL distratifikasi berdasarkan prosentase menjadi PKL trotoar sebanyak 48 dan PKL bahu jalan sebanyak 28. Selanjutnya masing-masing sampel di bagi secara proporsional berdasarkan prosentase jenis dagangan agar semua PKL terwakili.

Rincian populasi dan sampel dari PKL yang menmpati trotoar dan bahu jalan dapat dilihat dalam Tabel I.5 dan Tabel I.6 berikut ini.

**TABEL I.5**  
**POPULASI DAN SAMPEL PKL TROTOAR**

No	Jenis Dagangan	PKL Trotoar			
		Populasi	%	Sampel	Pembulatan
1	Sayuran	26	13%	6,12	6
2	Makanan/Jajanan	65	32%	15,29	15
3	Buah-buahan	30	15%	7,06	7
4	Kelontong/Alat Rumah Tangga	15	7%	3,53	4
5	Ayam Potong	3	1%	0,71	1
6	Jam/Asesoris/Mainan	12	6%	2,82	3
7	Pakaian/Tas/Sepatu	53	26%	12,47	12
	<b>JUMLAH</b>	<b>204</b>	<b>100%</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

**TABEL I.6**  
**POPULASI DAN SAMPEL PKL BAHU JALAN**

No	Jenis Dagangan	PKL Bahu Jalan			
		Populasi	%	Sample	Pembulatan
1	Sayuran	29	25%	6,88	7
2	Makanan/Jajanan	42	36%	9,97	10
3	Buah-buahan	16	14%	3,80	4
4	Kelontong/Alat Rumah Tangga	5	4%	1,19	1
5	Ayam Potong	9	8%	2,14	2
6	Jam/Asesoris/Mainan	5	4%	1,19	1
7	Pakaian/Tas/Sepatu	12	10%	2,85	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

### **B. Sampel Pertokoan:**

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui jumlah toko dan jenis usahanya sebagai berikut.

Populasi Toko : 48

Sampel Toko : 48  

$$\frac{48}{1 + 48 \times (0,1)^2} = 32,43 \text{ dibulatkan } 32 \text{ Toko}$$

Dari sampel toko yang diperoleh selanjutnya distratifikasi menurut jenis usaha, sebagaimana Tabel I.7 berikut ini.

**TABEL I.7**  
**POPULASI DAN SAMPEL PERTOKOAN**

No	Jenis Usaha	Toko		Sample	Pembulatan
		Jumlah	%		
1	Makanan/Jajanan	5	10%	3,33	3
2	Kelontong/Alat Rumah Tangga	9	19%	6,00	6
3	Jam/Asesoris/Mainan	1	2%	0,67	1
4	Pakaian/Tas/Sepatu	18	38%	12,00	12
5	Sembako	8	17%	5,33	5
6	Emas	2	4%	1,33	1
7	Salon	1	2%	0,67	1
8	Bahan Bangunan	1	2%	0,67	1
9	Buku / Alat Tulis	1	2%	0,67	1
10	Obat/Jamu	2	4%	1,33	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	100%	<b>32</b>	<b>32</b>

Sumber: Hasil Analisis 2005

### C. Sampel Pembeli :

Populasi dan sampel pembeli pada kawasan tidak ada perbedaan baik pembeli pada pertokoan maupun PKL.

Populasi Penduduk Kecamatan Adiwerna Tahun 2004 : 121.352

$$\text{Sampel Pengunjung} = \frac{121.352}{1 + 121.352 \times (0,1)^2} = 99,92 \text{ dibulatkan } 100 \text{ pengunjung}$$

Teknik menyebarkan kuesioner bagi pembeli dilakukan secara *Accidental Sampling* (kebetulan) pada saat pembeli sedang berbelanja di PKL atau toko.

## **1.8 Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang dipergunakan adalah

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, sasaran dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian (substansial dan spasial), kerangka pemikiran, pendekatan penelitian yang meliputi metode analisis, kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, populasi dan sample.

### **BAB II KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR**

Merupakan studi literatur yang berisi tentang konsep pertokoan, sektor informal, pedagang kaki lima, ruang publik yang meliputi trotoar dan bahu jalan, kebijakan pemerintah, interaksi sosial, bentuk interaksi, dan rangkuman kajian literatur. Kajian literatur ini merupakan kegiatan yang mengarah pada terjawabnya rumusan masalah yang diangkat sebagai bahan studi.

### **BAB III KONDISI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL**

Berisi gambaran umum Kabupaten Tegal dan Kecamatan Adiwerna. Bab ini berisi juga aktivitas pertokoan dan aktivitas PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran, aktivitas terminal bayangan, pengelolaan kawasan perdagangan dan permasalahan kawasan tersebut.

**BAB IV ANALISIS INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN  
DAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR  
DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN**

Berisi analisis penyebab PKL bertempat di trotoar, analisis interaksi aktivitas pertokoan dan PKL yang meliputi interaksi sosial, interaksi ekonomi dan interaksi waktu, analisis persepsi pembeli, analisis kebijakan pemerintah, temuan studi dan analisis SWOT. Analisis didasarkan pada data hasil survai primer dan observasi lapangan.

**BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang menjawab *research questions*. Dengan kesimpulan tersebut dibuat rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tegal yang berupa saran-saran dalam menetapkan pengaturan aktivitas PKL berdasarkan interaksinya dengan pertokoan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA**

#### *PADA TROTOAR*

Didalam bab ini akan dijelaskan kajian yang berkaitan dengan pertokoan, sektor informal, PKL, trotoar, bahu jalan, kajian empiris kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan PKL dan kawasan serta interaksi sosial. Bentuk interaksi yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan interaksi aktivitas pertokoan dan PKL serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

#### **2.1 Pertokoan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:1064) toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang, sedangkan pertokoan adalah tempat atau kompleks toko-toko.

Sedangkan menurut Neufert (1992:190) pertokoan biasanya ditempatkan pada posisi yang strategis di pusat keramaian yang mudah dicapai baik oleh kendaraan pribadi ataupun angkutan umum. Pada kawasan perdagangan, pertokoan menempati lokasi strategis di pinggir jalan dan di depannya ada trotoar.

#### **2.2 Sektor Informal**

Istilah informal pertama kali dimunculkan oleh Keith Hart (Manning dan Effendi, 1985:x) seorang antropolog asal Inggris, dalam tulisannya yang diterbitkan tahun 1973, setelah melakukan penelitian kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, Ghana. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Kelompok informal menggunakan teknologi produksi yang

sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan ketrampilan terbatas serta dilakukan oleh anggota keluarga.

Namun demikian sektor informal menurut Loekman Soetrisno dalam Agung Ridlo (2001:31) bukanlah suatu fenomena yang baru, sektor informal muncul ditengah kita sejak manusia berada didunia ini. Sejak manusia ada didunia mereka telah menunjang kehidupannya dengan menciptakan kerja sendiri atau sektor informal (*self employed*).

Menurut Hidayat dan Sumitro dalam Agung Ridlo (2001:32) sektor informal (*self employed*) diartikan sebagai unit-unit usaha yang berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya sendiri.

Dalam pengklasifikasian sektor informal El Shaks ( Jurnal Balairung, 2004 : 97 ) memberikan dua tipologi yaitu, pertama : unit usaha yang memberikan layanan vital bagi masyarakat kota dan bersifat melengkapi (*complement*) sektor formal seperti pengusaha transportasi, pedagang makanan, angkutan jasa kecil-kecilan. Kedua , kegiatan ekonomi yang cenderung bersifat personal, marjinal dan ilegal. Tipologi ini biasanya tanpa modal dan lebih mengandalkan pada kekuatan fisik seperti pembantu rumah tangga, pengamen, pengemis, pemulung.

Dari penjelasan di atas aktivitas sektor informal yang dikategorikan sebagai unit usaha kecil bisa bersifat mendukung aktivitas formal dan apabila diberdayakan dan dikembangkan dengan baik akan bersinergi dengan sektor formal perkotaan untuk saling melengkapi kebutuhan warga kota.

### **2.3 Pedagang Kaki Lima Dalam Sektor Informal**

Sektor informal yang dominan di daerah perkotaan adalah pedagang pinggir jalan dan merupakan kegiatan ekonomi skala kecil yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa yang selanjutnya dapat disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Mc. Gee dan Yeung (1977 : 25), memberikan pengertian PKL sama dengan "*hawkers*", yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian PKL ini menjadi semakin luas, dapat dilihat dari ruang aktivitas usahanya, yang hampir menggunakan ruang publik yang ada seperti jalur-jalur pejalan kaki, areal parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal, dan bahkan di perempatan jalan serta berkeliling dari rumah ke rumah melalui jalan-jalan kampung di perkotaan.

PKL di Indonesia saat ini dapat dikatakan mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat terutama di perkotaan. Perkembangan suatu kota selalu diikuti perkembangan jumlah PKL yang memenuhi ruang publik kota.

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi di sektor informal yang cukup fenomenal kehadirannya dan paling banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah kota, PKL memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik sektor informal secara umum.

Berdasarkan penelitian Kamala Chandrakirana dan Isono Sadoko (1994:37) ciri- ciri PKL antara lain:

1. Sebagai pedagang eceran yang menjual langsung ke konsumen;

2. Mendapatkan pasokan barang dagangan dari berbagai sumber seperti produsen, pemasok, toko pengecer maupun PKL sendiri;
3. Pada umumnya berperan sebagai pengusaha yang mandiri;
4. Berjualan dengan berbagai sarana: kios, tenda dan secara gelar di pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis;
5. Semakin besar modal usaha pedagang, semakin permanen sarana usahanya;
6. Pada umumnya mempekerjakan anggota keluarganya sendiri untuk membantu;
7. Kebanyakan pedagang menjalankan usahanya tanpa izin;
8. Rendahnya biaya operasional usaha PKL;
9. Cara pembayaran bahan mentah/barang dagangan secara kontan;
10. Bebas menentukan waktu usahanya atau tidak mengenal pembatasan waktu usaha.

Dari pengertian di atas PKL dapat didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan di lokasi yang strategis dan keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dan pinggir jalan, dan aktivitas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok atau secara individual.

### **2.3.1 Karakteristik Aktivitas PKL**

#### **2.3.1.1 Jenis Dagangan PKL**

Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82-83) menyatakan bahwa jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain. Demikian juga dikawasan pasar tradisional jenis dagangan PKL didominasi oleh dagangan basah.

Jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu:

- a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
- c. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
- d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut, dan lain sebagainya.

### **2.3.1.2 Bentuk Sarana Perdagangan PKL**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82-83) di kota-kota Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana perdagangan PKL sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjajanti, 2000 : 39-40) sebagai berikut :

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis makanan dan minuman.
4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
5. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat

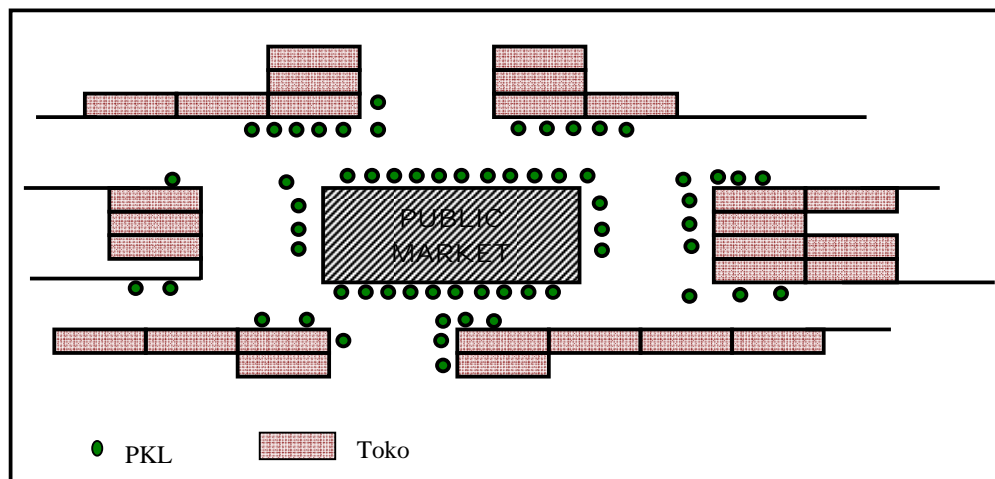
dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

### 2.3.1.3 Pola Penyebaran PKL

Pola penyebaran aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 36-37) dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu :

#### 1. Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

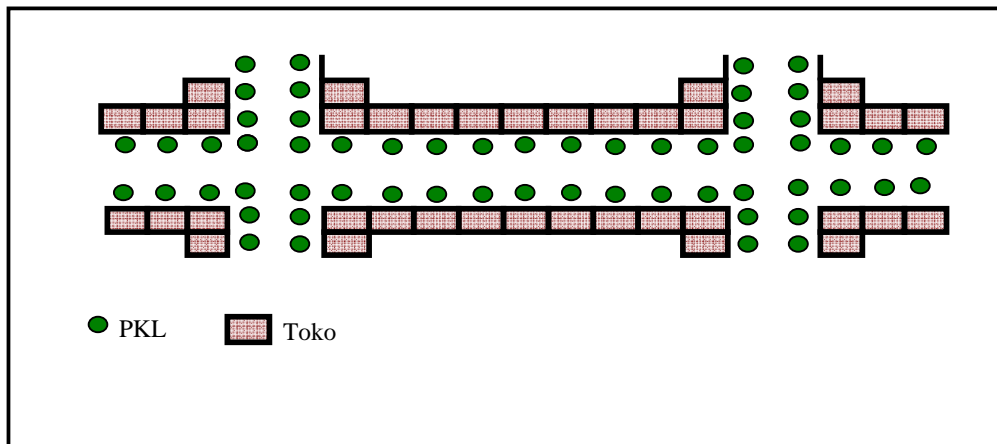
Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya terdapat pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya (Gambar 2.1). Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau menunjang.



**GAMBAR 2.1**  
**POLA PENYEBARAN MENGELOMPOK**  
*Sumber: Mc. Gee dan Yeung , 1977:37*

#### 2. Pola Penyebaran Memanjang (*Sreet Concentration*)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau *linier concentration* terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama (Gambar 2.2). Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan *linier* lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas yang tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen.



**GAMBAR 2.2**  
**POLA PENYEBARAN MEMANJANG**  
*Sumber: Mc. Gee dan Yeung, 1977:37*

#### **2.3.1.4 Pola Pelayanan Aktivitas PKL**

Pola pelayanan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 76) adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasarkan pengertian di atas maka pola pelayanan aktivitas PKL ini

dapat ditinjau dari aspek golongan pengguna jasa, skala pelayanan, waktu pelayanan, dan sifat pelayanan.

#### **A. Golongan Pengguna Jasa PKL**

Melihat lokasi dari PKL yang cenderung tidak tertata namun dekat dengan konsumen maka golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah dari toko atau supermarket, namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas perdagangan sektor informal, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental.

Rachbini dan Hamid (1994 : 92) menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya hubungan antara formal dan informal.

#### **B. Skala Pelayanan Aktivitas PKL**

Untuk mengetahui skala pelayanan suatu aktivitas jasa pedagang sektor informal dapat diketahui dari pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar (Manning dan Effendi, 1996 : 366-372).

### **C. Waktu Pelayanan Aktivitas PKL**

Mc. Gee dan Yeung (1977 : 76) menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti telah diuraikan diatas bahwa ada hubungan antara sektor formal dan informal maka waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal, namun demikian pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

### **D. Sifat Pelayanan Aktivitas PKL**

Sifat pelayanan PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Pedagang menetap (*static*).

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada.

b. Pedagang semi menetap (*semi static*).

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini dia akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut akan berkeliling.

c. Pedagang keliling (*mobile*)

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.

## **2.4 Ruang Publik Sebagai Ruang Interaksi Aktivitas**

Ruang umum atau ruang publik adalah tempat yang timbul karena kebutuhan akan suatu tempat bagi pertemuan bersama, dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antar orang banyak maka akan timbul bermacam-macam kegiatan. Carr (1992:3) menjelaskan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya yang dapat mempererat ikatan sebagai suatu komunitas. Sedangkan Hakim (1993:16) memberikan pengertian ruang umum sebagai suatu wadah yang dapat menampung aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok.

Dari pengertian di atas ruang publik kota merupakan suatu ruang baik di dalam atau di luar bangunan yang menjadi tempat aktivitas atau kegiatan bersama atau individu dalam berinteraksi sosial dan komunikasi pada suatu lingkungan atau kawasan, namun demikian ruang publik kota biasanya bersifat terbuka dan dapat dijangkau oleh publik baik perorangan maupun kelompok.

Dalam penelitian ini ruang publik yang dimaksud adalah trotoar dan bahu jalan yang fungsinya menurut Danisworo (1991:III:1) sebagai jalur pedestrian yang dipergunakan oleh pejalan kaki dalam melakukan perjalanan berupa suatu lintasan yang berbentuk jalur atau lintasan, yang biasanya dibedakan dengan

perkerasan jalan untuk kendaraan. Hampir di semua kota-kota di Indonesia kondisi trotoar dan bahu jalan sangat memprihatinkan karena dijadikan sebagai lokasi aktivitas oleh PKL, terutama di kawasan perdagangan.

#### **2.4.1 Trotoar**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:1073) trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Sebagai jalur bagi pejalan kaki maka salah satu fungsi trotoar menurut Danisworo (1991:III:2) adalah sebagai jalur untuk melihat-lihat jenis barang dagangan dalam etalase yang dijual oleh toko, pejalan kaki atau pembeli diharapkan dapat melihat dengan jelas dan selanjutnya tertarik untuk membeli.

Trotoar yang berada di depan pertokoan saat ini banyak yang ditempati oleh PKL untuk beraktivitas sehingga trotoar menjadi tidak nyaman untuk dilalui.

#### **2.4.2 Bahu Jalan**

Bahu jalan/ambang pengaman jalan (*road shoulder*) adalah struktur (bagian dari jalan) yang berdampingan dengan jalur gerak untuk melindungi perkerasan, menjamin kebebasan samping, dan menyediakan ruang untuk tempat berhenti sementara, parkir dan kadang-kadang dipakai oleh pejalan kaki atau bersepeda (Kamus Tata Ruang, 1998:9).

Dari pengertian diatas, fungsi dari bahu jalan yaitu sebagai tempat berhenti sementara atau parkir dan sebagai ruang pergerakan pejalan kaki, namun demikian bahu jalan seringkali digunakan oleh PKL untuk beraktivitas.

## 2.5 Pemanfaatan Trotoar

Pemanfaatan trotoar sebagai ruang publik salah satunya sebagai ruang pergerakan aktivitas sosial maupun ekonomi warga kota. Fungsinya dapat memberikan ciri khas bagi suatu kota dan pada umumnya memiliki fungsi interaksi sosial bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi.

Darmawan (2003:1) menjelaskan salah satu fungsi fungsi ruang publik adalah sebagai tempat kegiatan pedagang kaki lima yang menjajakan makanan, minuman, pakaian, souvenir, dan jasa entertainment seperti tukang sulap, tarian kera, ular dan sebagainya terutama dimalam hari.

Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dengan berbagai tingkat kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, tingkat pendidikan, perbedaan umur, motivasi atau tingkat kepentingan yang berlainan.

Lebih jauh Darmawan (2003:2) menyebutkan kriteria ruang publik secara esensial yang dapat juga diterapkan pada trotoar, sebagai berikut :

1. Tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan dapat mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang terbuka tersebut (*responsive*)
2. Dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa ada diskriminasi (*democratic*).
3. Dapat memberi makna atau arti bagi masyarakat setempat secara individual maupun kelompok (*meaningful*).

Jadi warga kota dapat memanfaatkan trotoar untuk aktivitas baik secara individu maupun berkelompok, namun kebebasan dalam memanfaatkan trotoar ini yang seringkali menimbulkan permasalahan, *democratic* tidak diartikan sebagai

kekebasan yang tanpa aturan untuk itu diperlukan pengendalian dalam pemanfaatan trotoar tersebut.

## **2.6 Permasalahan pada Ruang Publik**

Berdasarkan pemanfaatan ruang, aktivitas PKL dapat dikatakan hampir menempati semua ruang yang tersedia baik itu ruang umum atau ruang privat atau pribadi yang ada. Dimana ruang umum merupakan jenis ruang yang dimiliki pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh dari ruang umum adalah taman kota, trotoar, ruang terbuka, lapangan, dan sebagainya serta fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang terdapat di ruang umum tersebut, seperti halte, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Sedangkan ruang privat atau pribadi adalah jenis ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Karena penggunaan ruang-ruang inilah yang akhirnya menimbulkan *conflict of interest*, karena lahan tersebut seharusnya dipergunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, tidak saja bagi PKL. Pada kawasan perdagangan, aktivitas PKL dengan menempati trotoar dan bahu jalan yang berhadapan dengan pertokoan berpotensi untuk menimbulkan persaingan dan konflik terbuka, karena kawasan menjadi kumuh dan semrawut.

Sebagai elemen penting dalam kota, keberadaan ruang publik seringkali tidak berfungsi dengan baik. Berikut ini permasalahan di ruang publik :

1. Terbatasnya ruang publik dalam menampung semua aktivitas warga serta belum adanya penataan ruang tersebut seringkali menimbulkan pertentangan dalam penggunaannya.

2. Motivasi pengembangan ruang terbuka umumnya tidak merefleksikan kebutuhan penggunaanya dengan baik. Perubahan gaya hidup masyarakat mempengaruhi pengembangan ruang terbuka. Apabila hal ini diabaikan akan mengakibatkan kegagalan dalam desain dan manajemen ruang terbuka tersebut. (Carr, 1992:1).
3. Ketidakjelasan fungsi dan arahan kegiatan didalamnya mengakibatkan ruang publik dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai.

Sempitnya ruang publik dalam hal ini trotoar dan banyaknya aktivitas PKL di atasnya menimbulkan permasalahan ruang publik menjadi rumit dan kompleks.

## **2.7 Kajian Empiris Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Kawasan dan PKL**

Kota merupakan ajang pertempuran dinamika sosial masyarakat. Di situ segala fenomena berlangsung sehingga sering ditemukan konflik dalam pengaturan lingkungan. Keberadaan PKL menimbulkan konflik perebutan ruang antara kaum formal dan informal . Dalam perebutan tersebut pola usir gusur PKL dianggap terapi yang tepat hingga saat ini, dan dilakukan dengan alasan keberadaan PKL merusak wajah kota dan melanggar aturan (Suara Merdeka, 14/3/05) .

Pola usir gusur tersebut digunakan karena penerapan di dalam konteks yang keliru dari metoda Barat, standar tata ruang kota yang berlebihan, yang tidak cocok dengan karakter lokal. Para pendekar perjuangan teori tata ruang kota di Barat seperti Trancik, Lynch dan pendekar bagi kaum sektor informal de Soto

nampaknya belum menyentuh dunia pertempuran kaum informal di negara kita yang tumbuh secara alamiah, cepat dan sangat rumit (Siti Rukayah, Suara Merdeka, 19/03/05)

Pengelolaan ruang kota saat ini cenderung hanya mengatur dan melarang aktivitas yang ada namun lemah dalam penegakan hukumnya, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan atau dirugikan. Pemerintah yang belum sepenuh hati mengakui keberadaan PKL mengakibatkan pengaturannya tidak optimal.

### **2.7.1 Contoh-contoh Pengelolaan Pedagang Kaki Lima**

#### **A. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang**

Pemerintah Kota Semarang telah berusaha mengatur aktivitas PKL dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang sifatnya kebijakan sampai operasional dilapangan namun demikian hasilnya belum maksimal. Tabel II.1 berikut ini menunjukkan rangkuman peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang (Suara Merdeka, 8 April 2005).

**Tabel II. I**  
**Peraturan Kota Semarang yang berkaitan dengan Pengelolaan PKL**

No	Nomor Peraturan	Isi	Keterangan
1	Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000	Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.	
2	Keputusan Walikota No. 130.2/339 Tahun 2000	Penyerahan Sebagian Tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Dinas Pertamanan dan UPTD Pengelola PKL Kepada Kelurahan.	Dikenal sebagai SK “breakdown” karena adanya pelimpahan wewenang dari Dinas Pasar kepada kecamatan dan kelurahan untuk mendata PKL, memberikan rekomendasi perijinan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan laporan jika mengetahui adanya pelanggaran. Namun tidak semua kelurahan mampu melakukan penarikan.
3	Keputusan Walikota No. 511.3/16 Tahun 2001	Penataan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang.	Keputusan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak lokasi larangan tetap ditempati PKL, dan dipungut retribusi.
4	Keputusan Walikota No. 061.1/286 Tahun 2001	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pedagang Kaki Lima.	
5	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2003	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
6	Surat Sekretaris Daerah No. 11/940 Tahun 2005	Pelaksanaan Operasi Yustisi.	Penarikan retribusi terhadap PKL yang melanggar lokasi yang telah ditetapkan dihentikan.

Sumber : Diolah dari Suara Merdeka, 8 April 2005.

Ada satu lagi kegiatan yang berlangsung di Kota Semarang dengan melibatkan PKL dan pedagang formal yaitu Pusat Jajan Semarangan “WAROENG SEMAWIS” terletak di Gang Warung, Semarang Tengah, berkonsep wisata kuliner.

Menurut Pengelola Waroeng Semawis, Hidayat Pranadya (Kompas, 7 Juli 2005) kelas pedagang kaki lima ditargetkan 50 persen dapat tertampung diobyek wisata kuliner ini, namun demikian kualitas rasa serta kebersihan makanan tetap menjadi prioritas. Manajer Operasional Waroeng Semawis, Andy Setiawan menambahkan, bila pelaksanaan Waroeng Semawis berhasil, bisa menjadi *pilot project* daerah lain dalam memberikan solusi merelokasi PKL. Berikut ini denah lokasi Waroeng Semawis, Semarang Tengah



**GAMBAR 2.3**  
**RANCANGAN LOKASI PEDAGANG DI WAROENG SEMAWIS**

*Sumber : Kompas, 7 Juli 2005*

## **B. Pengelolaan PKL di Depan Pasar Proyek Bekasi**

Dalam mengatasi kesemrawutan PKL di depan Pasar Proyek Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi melalui Pengelola Pasar mewajibkan PKL yang berada

didepan pasar untuk membeli tenda bongkar pasang plastik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tenda Ukuran 2x2 seharga Rp. 550.000,- dan ukuran 2x3 seharga Rp. 700.000,- . Kegiatan perdagangan dibatasi mulai pukul 11.00 – 21.00 Wib agar tidak mematikan pemilik kios (*Kompas, 22 Oktober 2004*).

### **C. Penataan Kawasan Perdagangan Taman Sari Shopping Centre Salatiga**

Renovasi Kawasan Perdagangan Taman Sari Shopping Centre yang dulu emperan tokonya kumuh dan tidak beratap, sekarang lantainya keramik dan beratap sehingga pejalan kaki tidak lagi kehujanan maupun kepanasan. Bagian dalam kawasan diisi sejumlah PKL terlihat rapi dan tertata baik. Kebersihan di pelataran tengah relatif terjaga dan tidak sampai mengganggu kenyamanan orang berbelanja. Omzet pedagang selama satu setengah tahun cenderung meningkat setelah kawasan direnovasi dan PKL ditata (*Kompas, 18 Juli 2005*).



**GAMBAR 2.4**  
**SUASANA AKTIVITAS TAMAN SARI SHOPPING CENTRE SALATIGA**

*Sumber : Kompas, 18 Juli 2005*

## **2.8 Interaksi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:383) 1. interaksi adalah hal saling melakukan aksi; berhubungan; mempengaruhi; antar hubungan, 2. interaksi sosial: hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan dan orang perseorangan antara perseorangan dan kelompok dan antara kelompok dan kelompok. Sedangkan menurut Daldjoeni (1998:246) interaksi merupakan pengertian yang dikenal dalam sosiologi, sebagai gejala saling pengaruh yang ada diantara individu, karena sebagai makhluk individu dan sosial, manusia dituntut untuk melakukan hubungan sosial yang berdasarkan adanya kesadaran yang satu terhadap yang lain, ketika mereka saling berbuat, saling mengakui dan saling mengenal. Dalam sosiologi saling pengaruh juga diberlakukan untuk obyek dan ruang yang mewadahi obyek-obyek itu, sehingga ruang menjadi lokasi dari interaksi obyek.

### **2.8.1 Interaksi Keruangan**

Interaksi keruangan dapat dilihat dalam geografi, arus manusia, materi, informasi dan energi dicakup dalam pengertian interaksi keruangan, didalam istilah tersebut tercakup pula saling keterlibatan dan gejala-gejala yang ada, sedang gejala-gejala tersebut saling berpengaruh. Selanjutnya Daldjoeni (1992:194) menyimpulkan interaksi keruangan sebagai berikut:

1. Interaksi keruangan merupakan suatu sifat dari gejala yang terdapat di dalam ruang.
2. Interaksi keruangan mendorong diperolehnya jawaban atas pertanyaan: mengapa disitu atau mengapa di sana.

Atau dengan kata lain interaksi keruangan merupakan suatu permulaan dari usaha menerangkan lokasi dari gejala-gejala, distribusinya (pembagian, sebaran dalam ruang) dan difusinya (persebaran, perluasan).

Jenis-jenis interaksi keruangan menurut Daldjoeni (1992:195) yaitu:

1. Sistem interaksi keruangan ekonomis; misal antara penjual dan pelanggan.
2. Sistem interaksi keruangan politik; misal tata kerja di kalangan pendukung partai-partai tertentu di suatu wilayah menjelang pemilu;
3. Sistem interaksi keruangan sosial; misal kegiatan yang bercorak murni kemasyarakatan, seperti gerakan KB dan hidup hemat;
4. Sistem interaksi keruangan manusia-lingkungan; misal relasi manusia dengan kota sebagai lingkungan binaan.

Namun demikian beberapa penulis lain menurut Daldjoeni (1998:246) menjelaskan interaksi spasial sebagai konsep interaksi sosial, kemudian merumuskan interaksi spasial sebagai manifestasi keruangan dari kontak-kontak kemasyarakatan.

### **2.8.2 Interaksi Sosial**

Menurut Bintarto (1989:61) dalam interaksi berlangsung suatu proses sosial, proses ekonomi, ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan.

Harold Bethel dalam Santosa (2004:10) menjelaskan adanya the *basic condition of a common life* (syarat-syarat dasar adanya kehidupan bersama) sebagai unsur pengikat dalam kehidupan bermasyarakat yang tercermin pada:

- a. *Grouping of people*, artinya adanya kumpulan orang.

b. *Definite place*, artinya adanya wilayah/tempat tinggal tertentu.

c. *Mode of living*, artinya adanya pemilihan cara-cara hidup.

Dalam penelitian ini PKL dan pertokoan sebagai *grouping of people* yang berada dalam satu kawasan perdagangan dan memanfaatkan trotoar dan bahu jalan (sebagai *definite place*) yang dalam aktivitasnya tidak terlepas dari interaksi keduanya untuk menjaga keberlangsungan usaha (*mode of living*).

Sedangkan Daldjoeni (1998:246) menyebutkan salah satu kelompok yang saling mempengaruhi yaitu antara kegiatan manusia dan sifat politis-ekonomi suatu wilayah. Hal ini dapat menjelaskan keberadaan PKL yang menempati ruang publik dan kurang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan yaitu pemerintah kabupaten/kota atau diabaikan dalam rencana tata ruang, serta perilaku PKL yang selalu mendekati konsumen dengan pertimbangan ekonomi.

Dari berbagai pengertian di atas interaksi sosial merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik atau saling mempengaruhi terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu wadah atau ruang. Dalam penelitian ini pertokoan dan PKL merupakan pihak-pihak yang saling mempengaruhi dalam aktivitasnya di ruang publik, namun demikian kebijakan pemerintah kabupaten ikut berperan dalam interaksi keduanya sebagai pihak pengelola kawasan perdagangan dan ruang publik.

### **2.8.3 Faktor-faktor yang berpengaruh dalam interaksi sosial**

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, menurut Santoso (2004:12) yaitu :

a. *The nature of the social situation*

Situasi sosial yang memberi bentuk tingkah laku terhadap individu yang berada dalam situasi tersebut. Situasi sosial yang melingkupi interaksi aktivitas pertokoan dan PKL antara lain lemahnya penataan kawasan perdagangan dan tidak mengakomodir PKL.

*b. The norms prevailing in any given social group*

Kekuasaan norma-norma kelompok sangat berpengaruh terhadap terjadinya interaksi sosial antar individu. Keberadaan PKL di ruang publik yang jumlahnya besar, mempunyai norma-norma yang disepakati dalam paguyuban PKL, meskipun sifatnya longgar dan akan berpengaruh dalam interaksinya dengan pertokoan.

*c. Their own personality trends*

Masing-masing individu memiliki tujuan kepribadian sehingga berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Meskipun jumlah PKL besar dan ada paguyubannya namun demikian masing-masing mempunyai tujuan yang sifatnya pribadi sehingga akan mempengaruhi bentuk interaksinya dengan pertokoan demikian pula sebaliknya.

*d. A person's transitory tendencies*

Setiap individu berinteraksi sesuai dengan kedudukan dan kondisinya yang bersifat sementara. Interaksi pertokoan dan PKL akan dipengaruhi juga oleh kedudukan dan kondisi individu yang sifatnya sementara.

*e. The process of perceiving and interpreting a situation*

Setiap situasi mengandung arti bagi setiap individu sehingga hal ini mempengaruhi individu untuk melihat dan menafsirkan situasi tersebut.

Penafsiran dan penerimaan terhadap situasi sosial oleh pertokoan dan PKL yang berbeda-beda akan berpengaruh terhadap bentuk interaksi yang terjadi.

Jadi perlu pemahaman faktor situasi sosial, tujuan serta penafsiran dan penerimaan terhadap situasi sosial untuk melihat interaksi yang terjadi antara pertokoan dan PKL.

#### **2.8.4 Aktivitas**

Manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok hidup di dalam dan dengan lingkungannya. Dari hubungan yang erat dan timbal balik sifatnya, manusia menyesuaikan diri, memelihara serta mengelola lingkungannya. Dari hasil hubungan yang dinamik antara manusia dan lingkungannya dapat timbul suatu bentuk aktivitas atau kegiatan. Bentuk aktivitas ini menimbulkan beberapa perubahan, yaitu: perubahan perkembangan (*development change*), perubahan lokasi (*locational change*) dan perubahan tata laku (*behavioral change*).

Menurut Bintarto (1989:74) aktivitas manusia ditengah-tengah lingkungannya dapat dibedakan dalam tiga bidang, yaitu aktivitas dibidang keluarga, aktivitas dibidang usaha, dan aktivitas di bidang sosial dan kemasyarakatan.

Aktivitas dibidang usaha merupakan salah satu aktivitas yang pokok dalam rangka mempertahankan hidup manusia. Aktivitas usaha ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan kenegaraan.

## 2.8.5 Bentuk-bentuk interaksi sosial

Menurut Soerjono Soekanto dalam Ibrahim (2003:14) dasar dari terjadinya interaksi sosial adalah kontak dan komunikasi sosial yang didefinisikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama serta menyatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar dari proses-proses sosial. Dalam pengertian tersebut di atas interaksi sosial menunjuk pada hubungan–hubungan sosial yang dinamis.

Secara garis besar bentuk-bentuk interaksi sosial menurut para ahli seperti Merton Deuttah, Park, Burges, Krout dalam Santoso (2004:22:23) dan Ibrahim (2003:19) yaitu :

a. Kerjasama (*Cooperation*) atau *mutualisme*

Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial ketika tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan , atau interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

b. Persaingan (*Competition*)

Persaingan adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok saling berusaha dan berebut untuk mencapai keuntungan dalam waktu yang bersamaan.

c. Pertentangan (*Conflict*)

Konflik adalah suatu proses sosial ketika individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.

d. Persesuaian (*Accomodation*)

Akomodasi adalah usaha-usaha individu untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.

e. *Parasialisme*, adalah suatu interaksi sosial yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Dalam interaksi aktivitas perdagangan sektor formal-PKL pada ruang publik, proses dan bentuk-bentuk interaksi diatas mungkin sekali terjadi. Dalam penelitian ini kemungkinan bentuk interaksi yang akan terjadi yaitu kerjasama (mutualisme), persaingan (kompetisi), pertentangan (konflik), dan persesuaian (akomodasi) ataupun *parasialisme* yaitu interaksi sosial yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

## **2.9 Bentuk Interaksi Aktivitas Sektor Formal dengan PKL.**

Dalam melihat bentuk interaksi sektor formal dan PKL selain dilihat dari aktivitas usaha, ruang aktivitas serta kebijakan pemerintah juga perlu memahami situasi sosial yang terjadi di kawasan tersebut karena semuanya saling terkait.

### **2.9.1 Interaksi Mutualisme**

Beberapa peneliti sektor informal telah menunjukkan adanya bentuk interaksi mutualisme antara sektor formal dan informal. Paulus Wirutomo (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : xiii) menyatakan bahwa disamping sisi yang negatif, sektor informal memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kota, yaitu adanya ketergantungan pegawai sektor formal pada dagangan dan jasa dari sektor informal hal ini dapat dilihat dikawasan perkantoran dan perdagangan dikota-kota

besar, dimana sejumlah pegawai atau karyawan bergaji rendah membeli makan siang atau sejumlah kebutuhan di kios-kios yang berderet disepanjang jalan dekat perkantoran tersebut. Produk-produk sektor formal juga di pasarkan dengan luas oleh sektor informal. Sektor informal juga menjadi usaha sampingan dari pekerja sektor formal diwaktu luangnya.

Dalam interaksi antara pertokoan dengan PKL bentuk mutualismenya antara lain dapat dilihat dalam cara mendapatkan dagangan PKL yaitu apakah berasal dari pertokoan sekitar kawasan serta pertukaran pemenuhan kebutuhan keduanya. Lokasi aktivitas yang sama juga dapat menarik lebih banyak pembeli dan pengunjung kawasan, sehingga peluang untuk pemasaran lebih terbuka.

### **2.9.2 Interaksi Parasialisme**

Bentuk interaksi ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Moser (dalam Rachbini dan Hamid, 1994:3) menggambarkan hubungan sektor formal dan informal sebagai suatu bentuk hubungan yang *subordinatif*. Hubungan seperti ini didasarkan pada prinsip pertukaran yang tidak adil (*unequal exchange*), sehingga satu pihak cenderung melakukan eksploitasi terhadap lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, aktivitas PKL pada trotoar yang berhadapan dengan aktivitas pertokoan akan cenderung merugikan karena menutupi sebagian atau semua akses masuk ke pertokoan. Lebih jauh Rachbini dan Hamid (1994:49) menjelaskan adanya anggapan bahwa para pedagang asongan dianggap mengganggu kehidupan ekonomi yang formal dan pedagang kaki lima dianggap mengganggu perdagangan formal yang telah menempati tempat lebih mapan.

### **2.9.3 Interaksi Persaingan**

Hasil penelitian De Soto (1991:90) menjelaskan adanya persaingan antara pedagang formal dan pedagang jalanan di Kota Lima, Peru, hal ini terjadi ketika pedagang jalanan menyamai jenis dagangannya dengan pedagang formal seperti pakaian, parfum dan alat kecantikan, sehingga pedagang formal minta perlindungan kepada pemerintah untuk mengatur pedagang jalanan.

Aktivitas PKL pada ruang publik yang berhadapan dengan aktivitas pedagang formal berpotensi untuk terjadinya persaingan untuk meraih pembeli, lokasi PKL (trotoar dan bahu jalan) cenderung lebih dekat ke konsumen, karena sifat dari PKL yang lebih suka memakai jalan pintas dalam pemasarannya.

### **2.9.4 Interaksi Pertentangan (Konflik)**

Pertentangan atau konflik antara pedagang formal dan PKL seringkali merupakan kelanjutan dari persaingan yang tidak sehat ataupun aktivitas salah pihak mengganggu dan merugikan pihak lain sehingga terjadi perlawanan atau ancaman. Lokasi aktivitas dalam satu kawasan perdagangan berpotensi untuk menjadi penyebab konflik antara pedagang formal dan PKL.

Suara Merdeka, Senin, 15 Agustus 2005 memberitakan sekitar 2000 pedagang yang ada di Pasar Kliwon Temanggung mengancam tidak akan membayar retribusi apabila pemerintah tidak segera menertibkan PKL yang ada di luar pasar tersebut. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Wakil Bupati, paguyuban pedagang pasar menyatakan PKL di luar pasar membuat pasar bagian dalam menjadi sepi karena keberadaan PKL di trotoar maupun pintu masuk pasar sangat mengganggu calon pembeli yang akan masuk pasar dan calon pembeli

hanya membeli barang dagangan yang ada di luar pasar, hal ini membuat para pedagang bagian dalam pasar merasa dikalahkan.

### **2.9.5 Interaksi Akomodatif**

Bentuk interaksi ini merupakan bentuk interaksi yang saling meredakan ketegangan yang terjadi untuk menghindari konflik. Kebijakan pemerintah yang tidak jelas dan lemahnya penegakan hukum mengakibatkan pedagang formal cenderung “pasrah” dalam menghadapi situasi kawasan, yang dipenuhi dengan aktivitas PKL. Bentuk interaksi ini cenderung kepada penerimaan secara sosial (saling memahami terhadap kondisi yang ada) antara pedagang formal dan PKL dalam beraktivitas.

Kompas, Senin, 29 Agustus 2005, memberitakan tentang permintaan pedagang Pasar Johar kepada pemerintah dalam rembuk pedagang yang dihadiri segenap paguyuban agar lebih mengutamakan penataan daripada pembangunan dan tanpa menggusur PKL, salah satunya dengan memperluas akses masuk ke pasar dengan penertiban.

### **2.10 Rangkuman Kajian Literatur**

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut :

- 1 Toko adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang, sedangkan pertokoan adalah tempat atau kompleks toko-toko.
- 2 Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal dengan kualifikasi pedagang tanpa harus mempunyai ketrampilan khusus dan modal

besar. Cara dan pelayanan berdagang menggunakan sarana yang sederhana seperti gerobag, tenda dan gelaran dengan menempati trotoar dan bahu jalan.

- 3 Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Sebagai jalur bagi pejalan kaki maka salah satu fungsi trotoar adalah untuk melihat-lihat jenis barang dagangan dalam etalase yang dijual oleh toko, pejalan kaki atau pembeli diharapkan dapat melihat dengan jelas dan selanjutnya tertarik untuk membeli.
- 4 Jenis Interaksi yang terjadi antara pertokoan dan PKL yaitu, interaksi sosial yaitu suatu proses yang sifatnya timbal balik atau saling mempengaruhi terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu wadah atau ruang, Interaksi ekonomi seperti jual beli dagangan dan interaksi waktu yaitu keterkaitan waktu aktivitas PKL dan pertokoan.
- 5 Bentuk interaksi aktivitas pertokoan dan pedagang kaki lima yaitu, *Mutualisme* yaitu interaksi yang saling menguntungkan; *Parasialisme* yaitu interaksi yang merugikan salah satu pihak; Persaingan yaitu interaksi yang berusaha mencapai keuntungan dalam waktu bersamaan; Konflik atau pertentangan yaitu interaksi dengan jalan menentang atau melawan pihak lawan; Akomodatif dengan indikator pertokoan "*pasrah*" atau menerima apa adanya aktivitas PKL didepannya karena tidak mau konflik dengan PKL .

## **2.11 Variabel-variabel Penelitian**

Variabel-variabel penelitian yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik pertokoan, meliputi :

- a. Aktivitas pertokoan, dengan indikator jenis usaha dan waktu usaha.
  - b. Persepsi pertokoan terhadap aktivitas PKL yang ada di trotoar, dengan indikator ijin menempati trotoar, akses masuk ke pertokoan.
  - c. Persepsi pertokoan terhadap kebijakan pemerintah daerah tentang PKL dan penataan kawasan perdagangan.
2. Karakteristik PKL, meliputi :
- a. Aktivitas PKL dengan indikator jenis usaha, waktu usaha, pengelompokan usaha, bentuk sarana dagang, luas ruang yang digunakan.
  - b. Persepsi PKL terhadap toko dengan indikator ijin berjualan ditrotoar, persaingan dengan toko, konflik dengan toko.
  - c. Persepsi terhadap kebijakan pemerintah daerah tentang penataan kawasan perdagangan dan PKL.
3. Persepsi pembeli pada trotoar dengan indikator akses masuk ke pertokoan, pemilihan lokasi belanja antara PKL dan toko, serta persepsi terhadap kondisi trotoar dan penataan kawasan perdagangan. Persepsi pembeli sebagai analisis pendukung interaksi aktivitas pertokoan dan PKL pada trotoar.
4. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap PKL serta penataan kawasan perdagangan. Analisis ini sebagai pendukung analisis interaksi aktivitas pertokoan dan PKL pada trotoar.
5. Jenis Interaksi aktivitas pertokoan dan PKL, meliputi :
- a. Interaksi sosial dengan indikator penerimaan atau penolakan pertokoan terhadap aktivitas PKL di trotoar, situasi sosial yang terjadi pada saat itu.

- b. Interaksi ekonomi dengan indikator pertukaran barang dagangan, keterkaitan jenis dagangan.
  - c. Interaksi waktu dengan indikator keterkaitan waktu aktivitas pedagang kaki lima dengan pertokoan.
6. Bentuk Interaksi aktivitas pertokoan dan PKL pada trotoar, meliputi :
- f. *Mutualisme* dengan indikator pertukaran atau saling membeli barang dagangan, pendapatan keduanya meningkat,
  - g. *Parasialisme* dengan indikator pendapatan salah satu pihak turun, jalan masuk ketoko terganggu.
  - h. Persaingan atau kompetisi dengan indikator pertokoan mengatur jenis dagangan PKL.
  - i. Konflik atau pertentangan dengan indikator pertokoan melarang atau menegur PKL berjualan di depan toko.
  - j. Akomodatif dengan indikator pertokoan “*pasrah*” atau menerima apa adanya aktivitas PKL didepannya karena tidak mau konflik dengan PKL dan pertokoan “*pasrah*” terhadap kebijakan pemda yang belum optimal dalam menata kawasan perdagangan dan PKL.

### **BAB III**

## **KONDISI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN**

### **3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah , dengan pusat pemerintahan di Kota Slawi.

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara  $108^{\circ}57'06''$  BT- $109^{\circ}21'30''$  BT dan  $6^{\circ}50'41''$  LS- $7^{\circ}15'03''$  LS, terletak di pesisir utara bagian barat Propinsi Jawa Tengah, dalam posisi strategis pada jalur Semarang – Tegal – Cirebon serta Semarang – Tegal – Purwokerto.

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu :

1. Daerah pantai, meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Sedangkan batas wilayah administratif Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal

- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang.

Batas wilayah tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 halaman 9. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Tegal 87.879 hektar yang berupa tanah sawah dan tanah kering.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah , Kabupaten Tegal termasuk dalam Wilayah Pembangunan III yang berpusat di Kota Tegal yang mencakup wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.

Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 Kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan .

**TABEL III.1**  
**PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF**  
**DI KABUPATEN TEGAL**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Margasari	13	
2	Bumijawa	18	
3	Bojong	17	
4	Balapulang	20	
5	Pagerbarang	13	
6	Lebaksiu	15	
7	Jatinegara	17	
8	Kedungbanteng	10	
9	Pangkajene	23	
10	Slawi	5	5
11	Dukuhwaru	10	
12	Adiwerna	21	
13	Dukuhturi	18	
14	Talang	19	
15	Tarub	20	
16	Kramat	19	1
17	Suradadi	11	
18	Warureja	12	
Jumlah		281	6

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2003

Dalam PROPEDA (Program Pembangunan Daerah) Kabupaten Tegal terdapat 4 ( empat ) Sub Wilayah Pembangunan, dan Kecamatan Adiwerna masuk dalam Sub Wilayah Pembangunan I yang meliputi wilayah Kecamatan Slawi, Lebaksiu, Dukuhwaru, Pangkah, Adiwerna, Dukuhturi , Talang, Tarub, Kedungbanteng dan Jatinegara dengan pusat pertumbuhan di Slawi. Potensi utama wilayah ini adalah pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri kecil dan pertanian tanaman pangan. Potensi yang dapat dikembangkan adalah perkebunan, peternakan, perikanan darat dan kegiatan jasa.

### **3.2 Gambaran Umum Kecamatan Adiwerna.**

Dalam RUTRK IKK Adiwerna 2004-2013 (2004, III:2) kota IKK Adiwerna (terutama di Pasar Banjaran) ditetapkan sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota/regional.

Menurut statistik, perkembangan Kecamatan Adiwerna ternyata melampaui Slawi sebagai ibukota kabupaten. PDRB Kecamatan Tahun 2002 , menunjukkan bahwa Kecamatan Adiwerna menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tegal yaitu sebesar Rp. 342.579.350 (12,50 % ) diikuti Slawi sebesar Rp. 238.736,070 (8,71%). Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tegal Tahun 2002 sebesar 4,65%, demikian pula dengan Kecamatan Adiwerna mencapai angka tertinggi sebesar 8,73%, diikuti Kecamatan Pangkah 6,34%, Kecamatan Dukuhwaru 6,15%, dan Kecamatan Slawi 6,11%. (*Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2002, Bappeda-BPS* ).

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka aktivitas perekonomian di Kecamatan Adiwerna relatif tinggi. Industri yang berkembang di kecamatan ini yaitu industri logam yang berada di Desa Kalimati, industri konfeksi di Desa Tembok Luwung, Tembok Kidul, Tembok Lor dan Tembok Banjaran, industri tahu di Desa Adiwerna, industri makanan kecil di Desa Ujungrusi dan Pabrik Teh Dua Tang di Desa Tembok Kidul.

Batas wilayah Kecamatan Adiwerna sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Sebelah Timur : Kecamatan Talang dan Pangkah Kab. Tegal

Sebelah Selatan : Kecamatan Slawi Kab. Tegal

Sebelah Utara : Kecamatan Dukuhturi dan Talang Kab. Tegal

Batas wilayah tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 halaman 68.

Sedangkan Luas Wilayah Kecamatan Adiwerna seluas 23,86 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 21 desa dan tingkat kepadatannya dapat dilihat dalam Tabel III.2 dibawah ini. Desa-desa yang berciri kekotaan di Kecamatan Adiwerna sesuai RUTRK IKK Adiwerna 2004-2013 memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Desa Tembok Banjaran dan Kalimati dengan tingkat kepadatan penduduk diatas 10000 Km<sup>2</sup> /Jiwa, Desa Tembok Kidul dan Tembok Luwung diatas 9000 Km<sup>2</sup> /Jiwa, Desa Adiwerna, Pesarean dan Ujungrusi diatas 8000 Km<sup>2</sup> /Jiwa.

Kepadatan di desa tersebut tidak terlepas dari urbanisasi dan perkembangan industri yang ada serta posisi desa-desa tersebut dalam jalur transportasi utama di Kabupaten Tegal.

**TABEL III.2**  
**LUAS WILAYAH DESA DAN KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2001**  
**DI KECAMATAN ADIWERNA**

No	Nama Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Km <sup>2</sup> /Jiwa)
1	Pedeslohor	3,130	4916	1571
2	Lumingser	1,130	4859	4300
3	Kedungsukun	0,869	2383	2742
4	Pagiyanten	1,868	4948	2649
5	Penarukan	1,458	5738	3936
6	Harjosari Lor	1,292	7197	5570
7	Harjosari Kidul	1,477	7645	5176
8	Tembok Lor	0,432	3012	6972
9	Tembok Kidul	0,442	4334	9805
10	Tembok Banjaran	0,435	4671	10738
11	Tembok Luwung	0,983	9042	9198
12	Adiwerna	1,320	11581	8773
13	Kalimati	0,491	5141	10470
14	Lemah Duwur	0,568	3426	6032
15	Pesarean	1,308	11137	8515
16	Ujungrusi	0,962	7774	8081
17	Pagedangan	0,801	4815	6011
18	Kaliwadas	1,337	3641	2723
19	Pecangakan	0,842	2635	3129
20	Gumalar	1,546	5393	3488
21	Bersole	1,170	3918	3349
<b>JUMLAH</b>		<b>23,861</b>	<b>118206</b>	<b>4954</b>

*Sumber : Adiwerna Dalam Angka , 2001*

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar Kecamatan Adiwerna hanya mempunyai 3 buah pasar umum dan 1 pasar khusus yaitu pasar sepeda, sebagaimana pada Tabel III.3 dibawah ini.

Dari 3 buah pasar umum, yaitu Pasar Banjaran, Pasar Adiwerna dan Pasar Kedungsukun. Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna jaraknya hanya 1 km dan saling menyambung, sedangkan Pasar Kedungsukun berjarak sekitar 12 km dari kedua pasar tersebut ke arah barat. Dengan adanya 3 pasar umum, 2 diantaranya yaitu Pasar Adiwerna dan Pasar Banjaran berdekatan lokasinya dan letaknya sangat strategis dijalur Tegal-Purwokerto, serta sifatnya sebagai pasar regional untuk melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal dan daerah

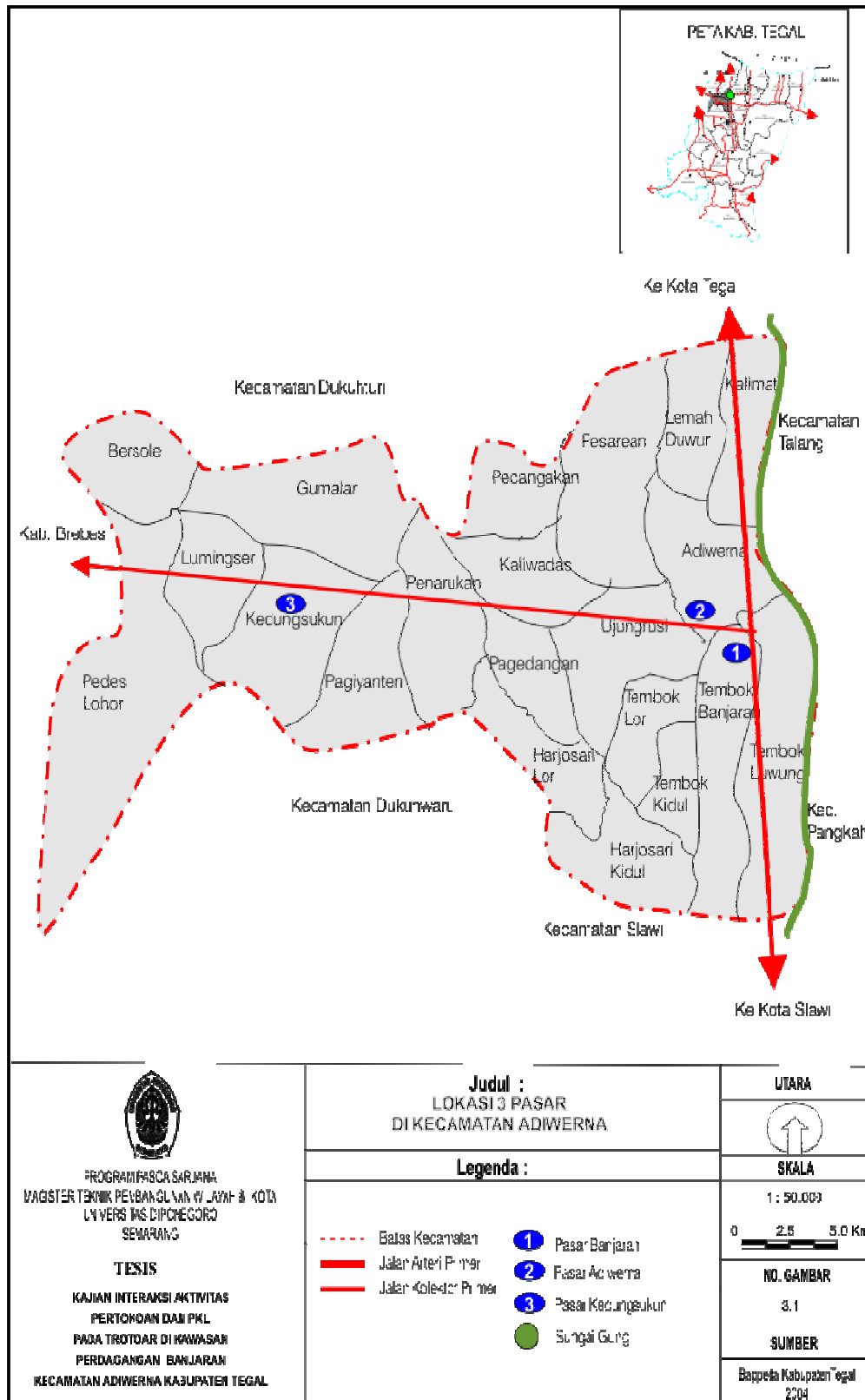
sekitarnya dan menjadi rujukan bagi pedagang dan pembeli untuk bertransaksi yang kemudian didistribusikan ke daerah lain.


**TABEL III.3**  
**JUMLAH PASAR DAN TOKO**  
**DI KECAMATAN ADIWERNA**

No	D e s a	P a s a r		Toko/kios/ Warung
		Umum	Khusus	
1	Pedeslohor	-	-	8
2	Lumingser	-	-	26
3	Kedungsukun	1	-	10
4	Pagiyanten	-	-	22
5	Penarukan	-	-	9
6	Harjosari Lor	-	-	18
7	Harjosari Kidul	-	-	16
8	Tembok Lor	-	-	16
9	Tembok Kidul	-	-	10
10	Tembok Banjaran	1	1	166
11	Tembok Luwung	-	-	131
12	Adiwerna	1	-	202
13	Kalimati	-	-	22
14	Lemahduwur	-	-	26
15	Pesarean	-	-	44
16	Ujungrusi	-	-	54
17	Pegadean	-	-	31
18	Kaliwadas	-	-	20
19	Pecangakan	-	-	10
20	Gumalar	-	-	25
21	Bersole	-	-	14
	Jumlah	3	1	880

*Sumber : Adiwerna Dalam Angka , 2001*

Peta lokasi ketiga pasar tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.1, berikut ini.



  
 PROGRAM SARJANA  
 MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN IV JAWA & KOTA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMARANG  
**TESIS**  
 KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS  
 PERTONJARAN DAN PKL  
 PADA TROTOAR DI KAWASAH  
 PERDAGANGAN BANJARAN  
 KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

**Judul :**  
LOKASI 3 PASAR  
DI KECAMATAN ADIWERNA

**Legenda :**

- Batas Kecamatan
- Jalar Arteri Primer
- Jalar Kolektor Primer
- 1 Pasa Banjara
- 2 Pasa Adiwerna
- 3 Pasa Kecungsukun
- Sungai Gung

UTARA

↑

SKALA

1: 50.000

0 2.5 5.0 Km

NO. GAMBAR

3.1

SUMBER

Bappeda Kabupaten Tegal  
2004

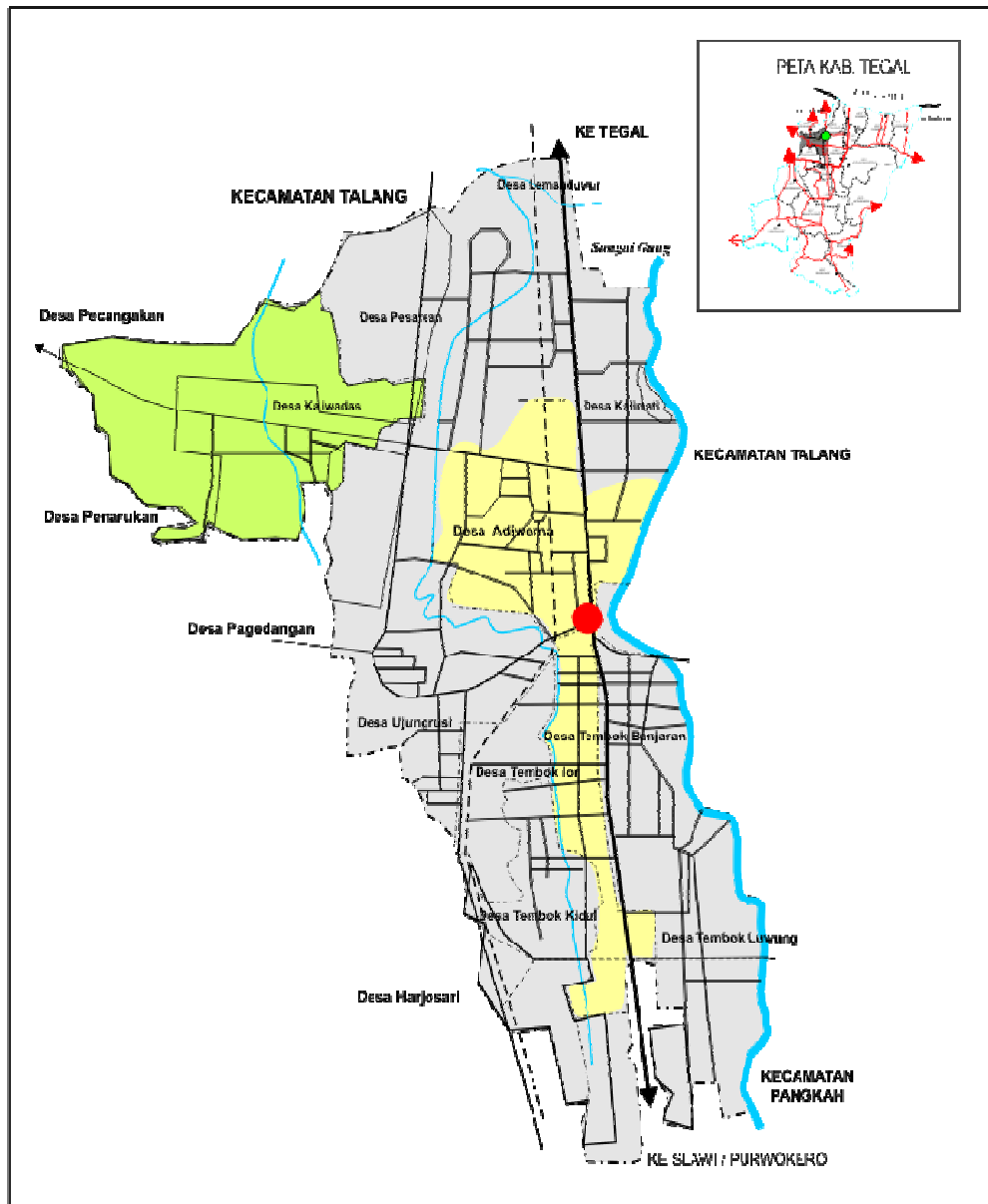
### **3.3 Gambaran Umum Kawasan Perdagangan Banjaran**




Kawasan Perdagangan Banjaran, secara administratif mencakup dua desa yaitu Desa Adiwerna dan Desa Tembok Banjaran. Kedua desa tersebut sebagian besar penduduknya bekerja disektor swasta (konfeksi, tahu, logam, pedagang). Perkembangan kawasan perdagangan ini tidak terlepas statusnya sebagai ibukota kecamatan.

Kawasan Perdagangan Banjaran merupakan pusat aktivitas perdagangan teramai di Kabupaten Tegal dengan pusatnya di Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna. Masyarakat Kabupaten Tegal menyebut kawasan ini dengan nama “*Sentral*”, karena pertigaan lampu merah di kawasan ini membagi menjadi tiga jalur utama yaitu Jalan Raya Utara yang menuju ke arah Kota Tegal , Jalan Raya Selatan menuju ke Slawi terus ke Purwokerto dan Jalan Raya Barat menuju Desa Ujungrusi.

Letaknya yang sangat strategis karena menjadi titik pertemuan jalur transportasi menjadikan kawasan ini sangat ramai dan menimbulkan kemacetan pada pagi hari maupun sore hari.

Peta Kota Adiwerna dapat dilihat dalam Gambar 3.2 berikut ini, yang menunjukkan letak yang strategis kawasan.



 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG	<b>Judul :</b> KOTA ADIWERNA	<b>UTARA</b> 
	<b>Legenda :</b>	<b>SKALA</b> 1 : 25.000 
<b>TESIS</b> KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKKAN DAN PKL PADA TROTOAR DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL	- - - - - Batas Wilayah Kota - - - - - Batas Desa/Kelurahan - - - - - Jalan Kolektor Primer - - - - - Jalan Kolektor Sekunder - - - - - Jalan Lokal - - - - - Jalan Rute As	- - - - - Sungai ● Klor Perdagangan Banjaran ● Pusat Kota ■ Sektor Pusat Kota ■ Perumahan Kota
	<b>NO. GAMBAR</b> 3.2 <b>SUMBER</b> Peta Kota Kabupaten Tegal 2024	

### 3.3.1 Pasar Banjaran

Pasar yang terlebih dahulu ada di kawasan ini yaitu Pasar Banjaran yang kemudian direhab pada tahun 1996, menjadi dua lantai, lantai pertama untuk pasar tradisional dan lantai atas untuk Swalayan Banjaran Permai. Jumlah pedagang dan kapasitas yang ada di Pasar Banjaran dapat dilihat dalam Tabel III.4 dan Tabel III.5 berikut ini.

**TABEL III.4**  
**JUMLAH PEDAGANG PASAR BANJARAN**

No	Lokasi Pedagang	Jumlah
1	Kios	131
2	Loos	327
3	Awning Semi Permanen	12
4	Lemprakan, Kaki Lima (Depan Pasar)	55
	<b>JUMLAH</b>	525

*Sumber: Kantor Pasar Banjaran, 2005*

**TABEL III.5**  
**KAPASITAS PASAR BANJARAN**

No	Lokasi Pedagang	Ukuran	Jumlah
1	Kios	3 x 5 m <sup>2</sup>	246
		4 x 5 m <sup>2</sup>	
2	Loos	2 x 2 m <sup>2</sup>	672
	<b>JUMLAH</b>		918

*Sumber: Kantor Pasar Banjaran, 2005*

Dari kedua tabel tersebut diatas jika diperbandingkan, kapasitas Pasar Banjaran masih mampu menampung jumlah pedagang yang ada bahkan masih berlebih, namun dalam realitanya banyak kios dan loos yang kosong karena pedagang lebih memilih berjualan di luar yaitu trotoar, bahu jalan dan tempat parkir. Berikut ini foto Pasar Banjaran, lahan parkir menjadi pangkalan becak dan lapak-lapak PKL.



**GAMBAR 3.3**  
**Aktivitas Di Depan Pasar Banjaran**

*Sumber: Observasi Lapangan, Juni 2005*

### 3.3.2 Pasar Adiwerna

Pasar Adiwerna yang dibangun sekitar tahun 1984, lebih dikenal sebagai Pasar Bawang, karena pada awalnya sebagai pusat jual-beli hasil bumi terutama bawang. Pada Tahun 1996 pasar ini menerima titipan pedagang dari Pasar Banjaran yang sedang direhab. Karena kapasitasnya tidak mencukupi maka banyak pedagang yang menggelar dagangannya di trotoar dan bahu jalan yang menghubungkan kedua pasar. Jumlah pedagang dan kapasitas Pasar Adiwerna dapat dilihat pada Tabel III.6 dan Tabel III.7 berikut ini.

**TABEL III.6**  
**JUMLAH PEDAGANG PASAR ADIWERNA**  
**(PASAR BAWANG)**

No	Lokasi Pedagang	Jumlah
1	Kios	63
2	Loos Belakang	235
3	Loos Depan	88
4	Lemprakan dalam pasar	120
5	Sekitar Pasar ( Bahu Jalan dan Trotoar)	178
6	PKL depan Kantor Pasar pakai Gerobag	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>689</b>

*Sumber: Kantor Pasar Adiwerna, 2005*

**TABEL III.7**  
**KAPASITAS PASAR ADIWERNA**  
**(PASAR BAWANG)**

No	Lokasi Pedagang	Ukuran	Jumlah
1	Kios	5 x 4 m <sup>2</sup>	22
2	Kios	4 x 3 m <sup>2</sup>	96
3	Loos	2x2 m <sup>2</sup>	504
<b>JUMLAH</b>			622

*Sumber: Kantor Pasar Adiwerna, 2005*

Dari hasil perbandingan tabel diatas, jumlah pedagang dan kapasitas Pasar Adiwerna sebenarnya mampu untuk menampung pedagang yang ada, namun diakui oleh Kepala Pasar Adiwerna, ada sekitar 178 pedagang dalam pasar yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, sehingga banyak loos yang kosong. Berikut ini foto aktivitas di depan Pasar Adiwerna, yang tampak semrawut.



**GAMBAR 3.4**  
**Aktivitas Di Depan Pasar Adiwerna**

*Sumber: Observasi Lapangan, Juni 2005*

### **3.4 Aktivitas Pertokoan di Kawasan Perdagangan Banjaran**

Jenis usaha yang dilakukan pertokoan dikawasan ini relatif bervariasi seperti: sembako, pakaian (konveksi), bahan bangunan, toko emas, salon, toko buku. Pertokoan di kawasan ini melayani pembelian secara eceran namun

demikian keberadaan pertokoan yang sudah relatif lama menjadikan pertokoan di kawasan ini menjadi tempat belanja warga kecamatan lain seperti dari Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Talang.

Waktu aktivitas pertokoan dimulai pada pukul 07.00 WIB seiring dengan mulai ramainya kawasan yang dipenuhi oleh transportasi anak sekolah, pekerja dan PKL. Secara visual keberadaan etalase toko di kawasan ini terhalangi oleh aktivitas PKL yang berada di trotoar dan bahu jalan dan ini merugikan bagi pertokoan, karena depan toko menjadi kumuh dengan berbagai alat dagang PKL dan menyulitkan apabila akan bongkar muat barang.

### **3.5 Aktivitas PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran**

Aktivitas PKL di kawasan ini dapat dibedakan menjadi dua jalur trotoar yaitu trotoar dan bahu jalan di Jalan Raya Barat dan Jalan Raya Selatan. Pola persebaran PKL ini *linier* mengikuti pola jalan yang ada.

#### **3.5.1 Aktivitas PKL di Trotoar Jalan Raya Selatan**

Jenis dagangan PKL yang mendominasi trotoar ini adalah konveksi, dan mainan anak-anak. PKL di kawasan ini menempati trotoar di pertigaan lampu merah yang terhubung dengan Pasar Banjaran. Waktu aktivitas PKL relatif bersamaan dengan waktu aktivitas pertokoan yaitu pukul 07.00 WIB. Sifat pelayanan PKL ini adalah menetap ditrotoar dengan menggunakan alat dagang lapak, lapak beratap dan gelaran. Sedangkan skala pelayanan PKL cukup luas karena tidak hanya melayani masyarakat Kecamatan Adiwerna.

### 3.5.2 Aktivitas PKL di Trotoar Jalan Raya Barat

Aktivitas PKL didominasi oleh pedagang sayuran dengan menggelar lapak-lapak di trotoar dan bahu jalan. Jalur ini terhubung dengan Pasar Bawang yang merupakan pasar tradisional. Aktivitas pasar ini dimulai pukul 03.00 WIB dengan kegiatan bongkar muat sayuran dari daerah luar Kabupaten Tegal, aktivitas ini dilakukan di jalan raya karena tidak ada tempat khusus untuk bongkar muat. Sayuran dari pasar ini didistribusikan ke pasar-pasar lainya serta warung-warung di desa, sehingga skala layanannya cukup luas. Sifat layanan PKL di trotoar ini mayoritas adalah menetap di trotoar dan bahu jalan.

### 3.5.3 Sifat Usaha Pedagang Kaki Lima

Dalam Tabel III.8, berikut ini sejumlah 96% PKL menyatakan usaha mereka merupakan pekerjaan pokok. Maka kebijakan penggusuran tanpa diberikan solusi bukan merupakan tindakan yang tepat untuk menangani PKL, karena akan berdampak sosial yang tinggi, banyak anggota keluarga yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan PKL .

**TABEL III.8**  
**SIFAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

No	Sifat	Jumlah	%
1	Pokok	73	96
2	Sampingan	3	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

### 3.5.4 Alat Dagang PKL

Alat dagang PKL sebagaimana dalam Tabel III.9 dibawah ini didominasi oleh gelaran atau dasaran sejumlah 45% terutama digunakan oleh PKL sayuran dan jajanan. PKL Pakaian/Tas/Sepatu lebih banyak menggunakan alat dagang lapak beratap yaitu sejumlah 34%, lapak beratap biasanya di trotoar dan atapnya menyambung dengan atap toko. Kondisi yang demikian mengakibatkan trotoar menjadi gelap dan panas, karena pencahayaan dan sirkulasi udara sangat kurang, kondisi demikian menjadikan pembeli tidak nyaman untuk berbelanja.

**TABEL III.9  
ALAT DAGANG PKL**

No	ALAT DAGANG	JUMLAH	%
1	Warung Tenda	1	1
2	Lapak beratap	26	34
3	Gerobag	7	9
4	Pikulan/Keranjang	5	7
5	Gelaran/Dasaran	34	45
6	Lapak/Meja	3	4
	JUMLAH	76	100

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

### 3.5.5 Luas Ruang Usaha PKL

Jenis alat dagang PKL tentunya berpengaruh terhadap luas ruang yang digunakan PKL untuk beraktivitas. Dari Tabel III.10 berikut ini, 67% PKL memanfaatkan ruang kurang dari 2 m<sup>2</sup>, luas ruang ini sebagian besar dari jenis dagangan sayuran dan jajanan. Sedangkan ruang berukuran 2 – 5 m<sup>2</sup> sejumlah 32% yang sebagian besar dilakukan oleh PKL yang menggunakan alat dagang lapak beratap. Kondisi demikian sangat menyita trotoar yang lebarnya hanya 2,5

meter dan letak PKL yang tidak teratur dengan jenis sarana dagang yang beraneka ragam.

**TABEL III.10**  
**LUAS RUANG USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

No	Luas Ruang	Jumlah	%
1	< 2.00 m <sup>2</sup>	51	67
2	2.00 m <sup>2</sup> - 5.00 m <sup>2</sup>	24	32
3	> 5.00 m <sup>2</sup>	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Gambar 3.5 berikut ini menunjukkan alat dagang dan luas ruang yang digunakan PKL sangat menyita ruang trotoar.



**GAMBAR 3.5**  
**ALAT DAGANG PKL YANG LUAS**  
**DENGAN MENUTUP TROTOAR**

*Sumber : Observasi Lapangan, Agustus 2005*

### 3.5.6 Penyimpanan Alat Dagang PKL

Dalam Tabel III.11 dibawah ini sejumlah 45% PKL setelah selesai berjualan menitipkan alat berjualan dan pada pihak lain dengan membayar, 27% ditinggal begitu saja dan hanya 4% yang dititipkan di toko.

Dari observasi di lapangan alat-alat dagang yang ditinggal di trotoar dan bahu jalan mengakibatkan kondisi trotoar tampak semrawut.

**TABEL III.11  
PENYIMPANAN ALAT DAGANG PKL**

No	Simpan Alat Dagang	Jumlah	%
1	Dititipkan Ke Toko	3	4
2	Ditinggal Begitu Saja	21	27
3	Dititipkan Pada Pihak Lain	34	45
4	Dibawa pulang	18	24
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*



**Lapak-lapak Yang Ditinggal PKL  
Menutupi Trotoar**



**Lapak-lapak Yang Ditinggal PKL  
Tampak Semrawut**

**GAMBAR 3.6  
ALAT DAGANG PKL YANG DITINGGAL, MENYITA RUANG TROTOAR**

*Sumber: Observasi Lapangan, Agustus 2005*

### 3.6 Aktivitas Terminal Bayangan

Aktivitas terminal bus bayangan di kawasan mulai berlangsung pada sore hari pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Bus yang mangkal bertrayek Tegal–Jakarta yaitu Bus Dewi Sri, Dedy Jaya dan Sinar Jaya yang berjumlah sekitar 7 bus. Namun demikian pada pagi hari ada beberapa bus yang mangkal dan mencari penumpang untuk pemberangkatan ke Jakarta pada pukul

09.00 WIB, kondisi ini memperparah kemacetan kawasan karena warga kota mulai beraktivitas dan Jalan Raya Barat tersita oleh bus yang mangkal. Ada beberapa pertokoan dan PKL yang memanfaatkan terminal bayangan ini terutama penjual makanan dan minuman.

### **3.7 Pengelolaan Kawasan Perdagangan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal**

Instansi yang terkait dalam pengelolaan kawasan yaitu Kantor Pengelolaan Pasar untuk menarik retribusi dari pedagang, Dinas Pekerjaan Umum yang memelihara dan membangun fisik kawasan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang mengatur yang menarik retribusi angkutan kota, Kantor Satpol PP yang bertugas mengamankan perda, dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang bertugas mengelola sampah.

Banyaknya instansi yang terkait dan lemahnya koordinasi antar instansi menjadikan kebijakan pemerintah tidak berlangsung dengan efektif bahkan cenderung jalan sendiri-sendiri. Seperti dikemukakan oleh Kepala Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna (Wawancara, Nopember 2005), ada persaingan terselubung antara petugas sampah dan petugas retribusi pasar dalam penanganan sampah, apabila sampah terlambat diambil maka pedagang komplain kepada petugas retribusi pasar, petugas sampah yang dilapori oleh petugas pasar kadang-kadang minta uang lagi buat pengangkutan sampah.

Aktivitas PKL di kawasan tersebut bukan semata-mata karena kesalahan PKL akan tetapi kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pemeliharaan pasar, dari observasi di lapangan dan wawancara dengan Kepala Pasar Adiwerna

(Maret 2005) , diketahui kondisi Pasar Adiwerna yang rusak, mengakibatkan beberapa pedagang di dalam pasar keluar untuk menjajakan dagangannya.

Kebijakan yang sering dikaitkan dengan operasi yustisi (penertiban PKL) hanya peraturan daerah tahun 2001 tentang retribusi dan kebersihan, didalamnya mengatur larangan untuk berjualan di trotoar dan bahu jalan. Ada satu hal yang menarik ketika dilakukan operasi penertiban PKL pada bulan Maret 2005 yang lalu, salah seorang PKL mempertanyakan mengapa hanya mereka yang ditertibkan sedangkan terminal bayangan tidak terkena penertiban (*Harian Radar Tegal, Maret 2005*).

### **3.7.1 Kebijakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar**

Pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar masih sangat minim sekali yaitu hanya berorientasi pada peningkatan retribusi tanpa memperhatikan kenyamanan pedagang dan pembeli, hal tersebut mengakibatkan pasar dan kawasan perdagangan secara keseluruhan menjadi semrawut dan kumuh.

Kantor Pengelolaan Pasar dalam jangka dekat belum akan melakukan penataan PKL dan Kawasan Perdagangan Banjaran karena kondisi yang belum memungkinkan dan banyaknya instansi lain yang harus dilibatkan, namun demikian dalam tahun 2006 direncanakan akan ada penataan kawasan tersebut termasuk kenyamanan pembeli dan pedagang akan menjadi prioritas dari Kantor Pengelolaan Pasar. (Wawancara, 12 November 2005).

Berkaitan dengan kebijakan penarikan retribusi bagi PKL, pemerintah tidak konsisten, bagi PKL yang berada di Jalan Raya Selatan kebijakan yang

diambil adalah tidak dipungut retribusi namun dalam kenyataan dilapangan mereka dipungut retribusi sampah dan pasar, meskipun secara formal pemerintah tidak mengakui.

Dengan adanya pungutan dan tidak diakuinya PKL di jalan raya selatan dan penanganan yang berbeda dengan PKL Jalan Raya Barat mengakibatkan ketidakjelasan penanganan PKL mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kebijakan yang tidak sejalan antara di atas dan di bawah mengakibatkan PKL merasa mendapat hak untuk tetap menempati trotoar dan bahu jalan tersebut. Apalagi pegawai yang berada di bawah dituntut untuk memenuhi target setoran retribusi yang telah ditetapkan.

Retribusi yang dikenakan bagi pedagang yang dipungut oleh petugas pasar dapat dilihat dalam Tabel III.12 berikut ini.

**TABEL III.12**  
**RETRIBUSI PASAR**

No	Lokasi Pedagang	Rp.
1	Kios	1.000
2	Loos Belakang	500
3	Loos Depan	400
4	Lemprakan dalam pasar	300
5	Sekitar Pasar ( Bahu Jalan dan Trotoar)	300

*Sumber: Kantor Pasar Adiwerna, 2005*

### **3.7.2 Kebijakan oleh Kantor SATPOL PP**

Tugas utama kantor Satpol PP adalah penegakan perda, dalam kasus PKL yang menempati trotoar dan bahu jalan, operasi penegakan perda yaitu penertiban PKL, SATPOL PP merasa kurang adanya dukungan politik (*political will*) yang

kuat dari pihak yang lebih tinggi baik eksekutif maupun legislatif, satpol PP merasa dibenturkan dengan masyarakat kecil, yang hanya mencari nafkah dan hasilnya dimakan saat itu juga. Ada pertimbangan manusiawi dari aparat satpol PP yang bertugas melaksanakan penertiban.

Seringkali PKL yang ditertibkan kemudian demo ke pihak legislatif, beberapa anggota dewan yang membawa kepentingan tertentu (politis) menyayangkan penertiban yang dilakukan pemda dan mempersilahkan PKL berjualan kembali. Tidak adanya komunikasi yang baik antar instansi atau lembaga mengakibatkan kebijakan yang dilakukan dinas teknis tidak berhasil dengan maksimal.

Foto berikut ini memperlihatkan operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, operasi penertiban seperti ini seringkali menimbulkan pertentangan dengan PKL dan hati nurani Satpol PP yang melaksanakan penegakan perda.



**GAMBAR 3.7**  
**OPERASI PENERTIBAN PKL KAWASAN PERDAGANGAN**  
**BANJARAN OLEH SATPOL PP , MARET 2005**

*Sumber: Radar Tegal, 23 Maret 2005*

### **3.7.3 Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP)**

Salah satu akibat aktivitas PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran adalah sampah yang cenderung berserakan dan menumpuk dengan berbagai jenis serta menimbulkan bau tak sedap. DLHKP yang salah satu tugasnya adalah menangani sampah dan memungut retribusi sampah. Aktivitas juru sampah dimulai sore hari karena pagi hari tidak memungkinkan untuk membersihkan kawasan yang dipenuhi oleh PKL di trotoar dan bahu jalan. Retribusi sampah yang besarnya mulai Rp. 150,- yang dikenakan pada PKL setiap hari serta toko mulai dari Rp. 3.000,- sampai dengan Rp 7.000,- yang dibayar setiap bulan. Adanya pungutan retribusi sampah yang dilakukan setiap hari kepada PKL mengakibatkan PKL merasa mendapat pengakuan dari pemerintah dalam berusaha. DLHKP memungut retribusi sampah karena sesuai Perda nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang sifatnya melayani, baik pelaku tersebut melanggar aturan atau tidak selama minta dilayani pembuangan sampahnya maka DLHKP akan menungut sampah tersebut dan wajib membayar retribusi sampah.

### **3.7.4 Kebijakan Oleh Kantor Kecamatan Adiwerna**

Kawasan Perdagangan Banjaran merupakan Ibukota Kecamatan Adiwerna yang menurut RUTRK IKK Adiwerna peruntukkannya memang buat perdagangan, namun demikian kondisi yang semrawut jika dibiarkan akan merugikan semua pihak. Kecamatan Adiwerna sampai saat ini tidak mengusulkan bagaimana penataan kawasan tersebut, karena sedemikian parahnya kondisi yang

ada sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu dan diambil oleh *decision maker* yang lebih tinggi.

Pengaduan lewat telepon yang dilakukan oleh salah seorang pemilik toko mengenai tergenangnya air dikawasan tersebut yang tidak segera surut karena tersumbat sampah, pemilik toko dan rekan-rekannya sanggup menyediakan dana untuk pembersihan saluran.

### **3.7.5 Kebijakan oleh Kantor Desa Adiwerna dan Tembok Banjaran**

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang kawasan tersebut, disamping kewenangan yang tidak ada juga tidak dilibatkan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten. Desa Adiwerna pernah menerima pengaduan dari salah satu toko bahwa saluran air di depan toko mampet karena ada PKL yang membuang sampah di saluran namun pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.

### **3.7.6 Peraturan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pedagang Kaki Lima**

Tidak ada peraturan daerah Kabupaten Tegal yang mengatur khusus tentang pedagang kaki lima. Hanya ada peraturan daerah yang terkait dengan aktivitas PKL yaitu Perda Nomor: 21 Tahun 1994 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang salah satu pasalnya melarang berjualan di trotoar atau jalan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- yang sampai saat ini masih dipasang di trotoar Kawasan Perdagangan Banjaran yang dipenuhi dengan PKL dan sangsi tersebut

belum pernah di terapkan. Perda tersebut digantikan dengan Perda Kab. Dati II Tegal nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang dalam pasal 12 disebutkan untuk menjaga keindahan dilarang :

- Berjualan diatas trotoar , tepi jalan kecuali pada hari-hari tertentu dan seizin Bupati Kepala Daerah;
- Menempatkan, menaruh barang-barang diluar dinding pembatas bangunan tempat usahanya dan atau pagar/dinding batas tanah miliknya;
- Memberikan izin/kesempatan dan atau membiarkan pihak lain menempatkan menjajakan barang dagangannya didepan toko/warung/tempat usaha;
- Memanfaatkan jalan/trotoar diluar fungsinya tanpa seizin Bupati Kepala Daerah.

Tidak ada sangsi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan diatas. Perda ini kemudian digantikan dengan Perda nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, hanya ada perubahan salah satu point dalam pasal 12 diatas menjadi larangan berjualan diatas trotoar, tepi jalan, badan jalan, kecuali pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu seizin Bupati. Dan tambahan sangsi hukum dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sampai saat ini sanksi bagi pelanggar peraturan daerah diatas belum pernah diterapkan, dan nampaknya tidak akan pernah diterapkan karena pertimbangan kemanusiaan dan lemahnya *political will* dari pemerintah untuk menata PKL.

Tabel III.13 berikut ini merupakan rangkuman peraturan daerah tersebut di atas yang berkaitan dengan PKL. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima jika dibandingkan dengan Kota Semarang yang sejak Tahun 2000 telah menerbitkan Perda No. 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima maka tertinggal cukup jauh, termasuk penetapan lokasi dan instansi yang bertanggungjawab membina PKL telah berfungsi meskipun sampai saat ini masih terus disempurnakan.

**TABEL III.13**  
**RANGKUMAN PERATURAN DAERAH**

No	Perda	Isi	Sanksi
1	21 Tahun 1994 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Dalam Wilayah Kab. Dati II Tegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Larangan berjualan di trotoar atau jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hukuman selama-lamanya 3 bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-</li> </ul>
2	4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Larangan berjualan diatas trotoar , tepi jalan kecuali pada hari-hari tertentu dan seizin Bupati Kepala Daerah.</li> <li>● Larangan memberikan izin/kesempatan dan atau membiarkan pihak lain menempatkan menjajakan barang dagangannya didepan toko/warung/tempat usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tidak ada sanksi .</li> </ul>
3	12 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Larangan berjualan diatas trotoar, tepi jalan, badan jalan, kecuali pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu seijin Bupati.</li> <li>● Larangan memberikan izin/kesempatan dan atau membiarkan pihak lain menempatkan menjajakan barang dagangannya didepan toko/warung/tempat usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</li> </ul>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

### 3.8 Permasalahan Kawasan dan Pemanfaatan Trotoar

Tingginya aktivitas PKL pada trotoar dan bahu jalan dikawasan Perdagangan Banjaran mengakibatkan fungsi trotoar menjadi menurun, karena alat dagang dan dagangan PKL menyita ruang trotoar tersebut serta menutupi etalase toko dan menyusahkan warga yang berjalan di trotoar. Bahu jalan yang biasanya buat parkir kendaraan tersita ruangnya oleh PKL.

Kekumuhan dan kesemrawutan menjadikan kawasan tidak nyaman untuk dinikmati dan akhirnya merugikan semua pihak. sehingga kawasan tersebut sampai saat ini masih kumuh dan semrawut. Foto dibawah ini menunjukkan aktivitas yang berlangsung di Kawasan Perdagangan Banjaran .



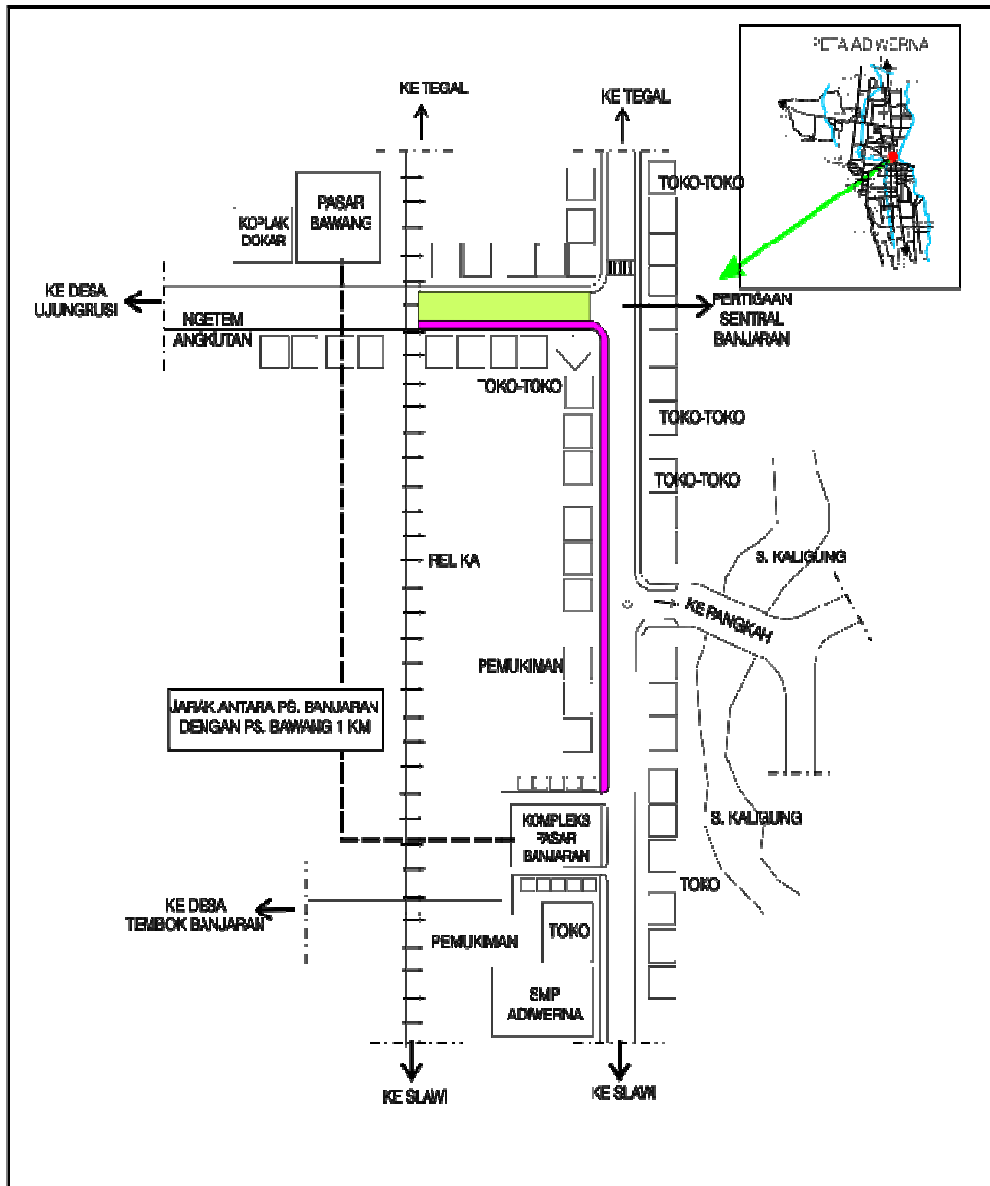
Pertigaan Sentral Banjaran yang dipenuhi Pedagang Kaki Lima







Jalur Tegal – Slawi dekat Pertigaan Sentral yang dipenuhi PKL

#### **GAMBAR 3.8 FOTO AKTIVITAS KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN**

*Sumber: Observasi Lapangan, Juni 2005*

Denah Kawasan Perdagangan, sebagai lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut.



 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  <b>TESIS</b> KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PKL PADA TROTOAR DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL	<b>Judul :</b> SKETSA KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN	UTARA 
	<b>Legenda :</b>	<b>SKALA</b> 1 : 10.000 
	 : PKL yang memenuhi trotoar dan bahu jalan (Lokasi Penelitian)  Terminal Bayangan  Rel Kereta Api Jurusan Tegal-Purwokerto	<b>NO. GAMBAR</b> 3.0  <b>SUMBER</b> Observasi Lapangan, Juni 2008

### **3.9 Kasus : Kebakaran Toko di Banjaran, Kamis 15 September 2005**

Ada peristiwa kebakaran toko yang terjadi di Kawasan Banjaran, yang menjadi lokasi penelitian penulis, pada hari Kamis, 25 September 2005 yang menimpa 5 buah toko, yaitu toko konfeksi dan toko sepatu. Kebakaran diakibatkan konsleting atau hubungan arus pendek pada salah satu toko, peristiwa terjadi pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, kerugian di taksir Rp. 400.000.000,-. Pada saat kebakaran PKL yang ada di depan toko belum mulai beraktivitas. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena banyaknya kerumunan.

Dari kasus terbakarnya toko di Kawasan Perdagangan Banjaran, sebenarnya dapat dijadikan pelajaran atau peringatan bagi pemilik toko, PKL maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, bahwa kondisi kawasan perdagangan yang kumuh dan semrawut dengan PKL menempati trotoar dan bahu jalan rawan terjadinya kebakaran, baik itu hubungan arus pendek maupun dari puntung rokok atau percikan api kompor. Proses pemadaman api juga akan mengalami kesulitan karena kawasan semrawut dan berada di jalur utama Tegal – Purwokerto. Sudah saatnya pemda untuk menata kawasan tersebut dengan memperhatikan kepentingan semua pihak demi kenyamanan dan keselamatan warga kota.

Foto-foto berikut ini menggambarkan suasana pada saat kebakaran terjadi.



Toko yang terbakar, sementara PKL belum mulai beraktivitas



Warga berusaha memadamkan api dengan menyiram air.



Warga melihat sisa-sisa kebakaran



Barang dagangan yang berhasil diselamatkan.



Warga yang berkerumun melihat proses pemadaman api, Jalur Tegal-Purwokerto dialihkan lewat jalan 2.

**GAMBAR. 3.10**  
**KEBAKARAN TOKO DI JALAN RAYA SELATAN, BANJARAN**

*Sumber: Suara Merdeka dan Radar Tegal, 16 September 2005*

## **BAB IV**

### *ANALISIS INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA TROTOAR DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL*

Dalam bab ini akan diuraikan terlebih dahulu analisis mengenai karakteristik kawasan yang meliputi analisis keberadaan PKL di kawasan perdagangan, analisis persepsi PKL, persepsi pertokoan, persepsi pembeli, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis interaksi aktivitas PKL dan pertokoan yaitu interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi waktu. Dari analisis jenis interaksi kemudian dilakukan analisis bentuk interaksi yaitu mutualisme, parasialisme, persaingan, konflik dan akomodatif.

#### **4.2 Analisis Karakteristik Kawasan**

Analisis ini untuk mengetahui karakteristik pelaku utama kawasan yaitu keberadaan pedagang kaki lima, pertokoan dan pembeli berdasarkan observasi lapangan dan persepsi pelaku tersebut.

##### **4.1.1 Analisis Keberadaan PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran**

Analisis ini untuk mengetahui secara makro latar belakang dan alasan Pedagang Kaki Lima menempati trotoar dan bahu jalan di Kawasan Perdagangan Banjaran baik yang sifatnya eksternal maupun internal yang berkaitan langsung dengan karakteristiknya dan mengakibatkan interaksi aktivitas dengan pertokoan.

#### **4.1.1.1 Faktor Eksternal**

Perilaku PKL yang memotong jalur distribusi dengan mendekati konsumen dan menempati ruang-ruang kota yang strategis sudah menjadi perilaku PKL di semua kota, hal ini sesuai dengan definisi Pedagang Kaki Lima menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 25) yaitu sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Keberadaan PKL ditrotoar dan bahu jalan di Kawasan Perdagangan Banjaran jika dilihat dari faktor eksternal ada beberapa faktor pendorong bagi PKL bertempat dikawasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1996 saat rehab Pasar Banjaran, pedagangnya dititipkan di Pasar Adiwerna atau Pasar Bawang, karena kapasitasnya tidak mencukupi maka pedagang menggelar dagangannya di trotoar dan bahu jalan. Setelah Pasar Banjaran selesai, pedagang yang akan masuk ke pasar mengalami kesulitan karena harus membayar sewa loos dan kios yang harganya cukup tinggi yaitu sekitar Rp. 4 jutaan, akhirnya mereka tetap menempati trotoar dan bahu jalan. Sedangkan pedagang yang berjualan di dalam pasar, akhirnya ada juga yang ikut berjualan di trotoar dan bahu jalan, loos yang di dalam pasar menjadi tempat menyimpan barang dagangan. Penjelasan di atas sesuai dengan Tabel IV.1 tentang Lama Usaha PKL bertempat di Trotoar dan Bahu Jalan berikut ini. Sejumlah 69% PKL bertempat di trotoar dan bahu jalan lebih dari 5 tahun, hal ini dapat dimengerti karena rehab Pasar Banjaran yang dilakukan pada tahun 1996 sampai sekarang sudah 9 tahun.

**TABEL IV. 1**  
**LAMA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

No	Lama Usaha	Jumlah	%
1	Di atas 5 tahun	52	69
2	1 – 5 tahun	23	30
3	Kurang dari 1 tahun	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

- b. Adanya jual-beli pangkalan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti menjual trotoar dan tempat parkir kepada PKL, harganya bervariasi antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 3.000.000,-
- c. Ada kepentingan politis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, pada saat penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP agar PKL masuk ke dalam pasar dengan menempati loos, mereka mengadukan ke DPRD yang selanjutnya oleh DPRD mereka tetap diijinkan menempati trotoar.
- d. PKL iri dengan terminal bayangan yang berada sekitar kawasan Pasar Adiwerna, yaitu mulai pagi hari dan sore hari, terminal bayangan tersebut tidak dilarang sedangkan PKL di *oprak-oprak* untuk masuk ke dalam pasar.

Dari faktor eksternal diatas maka Pedagang Kaki Lima di kawasan ini dirugikan yaitu tidak ada kepastian hukum dan menjadi obyek pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

#### **4.1.1.2 Faktor Internal**

Analisis ini untuk mengetahui alasan khusus PKL menempati trotoar dan bahu jalan. Dalam Tabel IV.2 dibawah ini menjelaskan tempat aktivitas PKL sebelum di trotoar dan bahu jalan yaitu, sejumlah 53% PKL tadinya berada di dalam pasar dan 42% selalu menempati trotoar dan bahu jalan atau bisa dikatakan berlokasi ditrotoar dan bahu jalan merupakan tujuan PKL karena adanya aktivitas

kawasan. Data ini menunjukkan pasar bukan merupakan tempat yang menguntungkan berdagang bagi PKL. Dan data tersebut juga menunjukkan bahwa PKL yang bertempat ditrotoar dan bahu jalan ada yang PKL murni dan ada pedagang resmi dari dalam pasar yang berperilaku sebagai PKL.

**TABEL IV.2**  
**TEMPAT PKL SEBELUM DI TROTOAR/BAHU JALAN**

No	Tempat Usaha	Jumlah	%
1	Di Dalam Pasar	40	53
2	Selalu di Trotoar/Bahu Jalan	32	42
3	Lainnya: Di Rumah	4	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Selanjutnya dari Tabel IV.3 dapat diketahui, dari sejumlah 53% PKL yang tadinya berada di dalam pasar, semuanya keluar dari pasar dengan alasan pembeli berkurang.

**TABEL IV. 3**  
**ALASAN KELUAR DARI PASAR**

No	Alasan	Jumlah	%
1	Pembeli Berkurang	40	100
2	Pasar Rusak/Kumuh	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Alasan di atas diperkuat lagi dari Tabel IV.4 dibawah ini yaitu ada sejumlah 89% PKL mengaku mendekati keramaian, dan hanya 7% yang menganggap lokasi lama kurang strategis. Mendekati keramaian di sini dapat dikatakan PKL mendekati konsumen yang berada diluar pasar, hal tersebut sesuai penelitian Kamala Chandrakirana dan Isono Sadoko (1994:37) tentang ciri-ciri PKL antara lain sebagai pedagang eceran yang menjual langsung ke konsumen, karena tidak ada pembeli yang masuk ke pasar maka mereka mendekati konsumen dengan berjalan di trotoar dan bahu jalan.

**TABEL IV.4**  
**ALASAN PKL BERTEMPAT DI TROTOAR/BAHU JALAN**

No	Alasan	Jumlah	%
1	Lokasi Lama Kurang Strategis	5	7
2	Dekat Pusat Keramaian	68	89
3	Dekat Tempat Kulakan	3	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Beberapa penjual menjelaskan bahwa pembeli lebih suka belanja di luar dan tidak mau masuk pasar, sehingga mereka *jemput bola* dengan mendekati pembeli di trotoar dan bahu jalan. Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa kondisi Pasar Adiwerna atau Pasar Bawang yang buruk seperti kumuh dan bocor pada beberapa bagian menyebabkan pasar menjadi becek sehingga mengurangi kenyamanan untuk berbelanja.

Kepala Pasar Banjaran dan Kepala Pasar Adiwerna menjelaskan bahwa ada beberapa pedagang bermain petak umpet dengan petugas, sebenarnya mereka mempunyai tempat di dalam pasar, karena pembeli berkurang, mereka berjualan di trotoar atau bahu jalan, jika ada penertiban mereka masuk ke dalam pasar.

Alasan PKL menempati trotoar dan bahu jalan semakin diperkuat oleh kenaikan pendapatan mereka setelah menempati lokasi tersebut. Tabel IV.5 di bawah ini menjelaskan bahwa sejumlah 93% PKL yang mengaku pendapatan mereka bertambah dengan berjualan di trotoar atau bahu jalan.

**TABEL IV.5**  
**PENDAPATAN PKL DI TROTOAR/BAHU JALAN**

No	Pendapatan	Jumlah	%
1	Bertambah	71	93
2	Tetap	5	7
3	Berkurang	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Dari analisis penyebab tempat aktivitas PKL di atas, dapat diketahui ada faktor pendorong yang berasal dari luar yaitu seperti rehab pasar dan terminal bayangan dan faktor pendorong dari dalam PKL sendiri yang berperilaku mendekati konsumen dengan menempati trotoar dan bahu jalan dan pendapatannya bertambah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



**GAMBAR 4.1**  
**PENYEBAB PKL BERTEMPAT DI TROTOAR DAN BAHU JALAN**

*Sumber: Hasil Analisis, 2005*

Dari hasil analisis keberadaan PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik PKL dikawasan tersebut disebabkan oleh adanya rehab Pasar Banjaran dan sebagian PKL merupakan pedagang yang tadinya berjualan di dalam pasar.

Jika dilihat dari kapasitas Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna, berikut ini.

- a. Pasar Banjaran: Jumlah pedagang 525, kapasitas yang tersedia 918 pedagang.
- b. Pasar Adiwerna: Jumlah pedagang yaitu 689 termasuk 183 pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, kapasitas yang tersedia 622 pedagang.

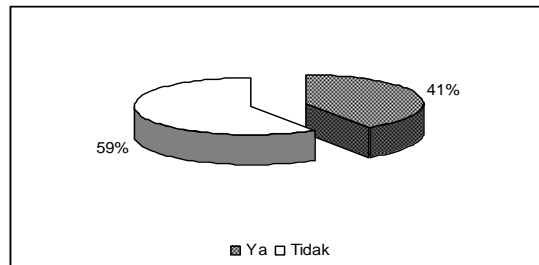
Dari perbandingan data di atas, sebenarnya keberadaan PKL di trotoar dan bahu jalan dapat ditata dan ditempatkan di dalam Pasar banjaran maupun Pasar Adiwerna.

#### 4.1.2 Analisis Persepsi Pedagang Kaki Lima

Analisis ini untuk mengetahui persepsi PKL terhadap tempat berdagang dan peraturan serta kebijakan pemerintah daerah.

##### 4.1.2.1 Persepsi PKL Terhadap Kondisi Tempat Berdagang

Dari Gambar 4.2 di bawah ini sejumlah 59% PKL tahu bahwa kondisi trotoar dan bahu jalan tidak sesuai untuk berdagang, namun kepentingan untuk mendekati pembeli menjadikan kondisi trotoar tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas berjualan.



**GAMBAR 4.2**  
**PERSEPSI PKL TERHADAP TEMPAT BERDAGANG**  
**DI TROTOAR**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

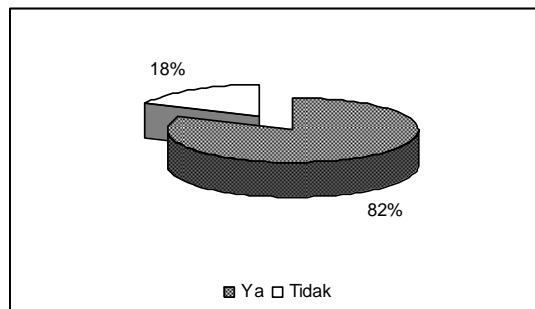
Dari sejumlah 45 PKL atau 59% (Gambar 4.2) yang menyatakan bahwa trotoar tidak sesuai untuk berdagang, dalam Tabel IV.6 dibawah ini, sejumlah 91% PKL menganggap trotoar kurang lebar, hal ini dapat dimengerti karena lebar trotoar yang hanya sekitar 2,5 meter yang harus diisi alat dagang dan barang dagangan serta jalur pengunjung atau pembeli, muka toko jangan terlalu tertutup.

**TABEL IV.6**  
**ALASAN PKL TIDAK SESUAI BERDAGANG**  
**DI TROTOAR/BAHU JALAN**

No	Alasan	Jumlah	%
1	Trotoar Kurang Lebar	41	91
2	Trotoar Bergelombang	2	4
3	Trotoar Kurang Nyaman	2	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

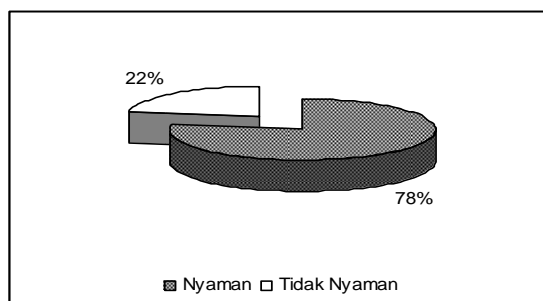
Sedangkan dari segi keamanan sebagaimana dalam Gambar 4.3 dibawah ini sejumlah 82% PKL menyatakan bahwa trotoar dan bahu jalan aman untuk berdagang.



**GAMBAR 4.3**  
**PERSEPSI PKL TERHADAP KEAMANAN**  
**TEMPAT BERDAGANG**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Meskipun sebagian besar PKL (59%, Gambar 4.2) menyatakan bahwa kondisi trotoar dan bahu jalan tidak sesuai untuk berdagang namun berdasarkan data Gambar 4.4 dibawah ini, sejumlah 78% PKL mengaku nyaman dengan kondisi berdesak-desakan.



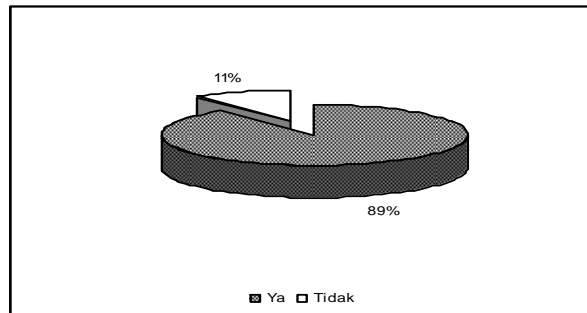
**GAMBAR 4.4**  
**PERSEPSI PKL TERHADAP KONDISI**  
**BERDESAKAN DI TROTOAR**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Tempat yang strategis yaitu trotoar dan bahu jalan dan banyak pembeli mampu mengalahkan ketidaksesuaian berdagang di trotoar dan bahu jalan, hal ini

sesuai dengan pendapat Mc. Gee dan Yeung (1977:37) bahwa dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi maka akan mempunyai kesempatan yang tinggi pula dalam meraih konsumen.

Ketidaksesuaian trotoar dan bahu jalan untuk berdagang menjadikan PKL setuju untuk diadakan penataan kawasan perdagangan sebagaimana dalam Gambar 4.5 berikut ini



**GAMBAR 4.5**  
**PERSETUJUAN PKL TERHADAP PENATAAN KAWASAN**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Usulan penatan kawasan oleh PKL dapat dilihat dalam Tabel IV.7, berikut ini.

**TABEL IV.7**  
**USULAN PENATAAN OLEH PKL**

No	Usulan Penataan
1	Tetap di Trotoar Namun ditata lebih Rapi
2	Dibuatkan Loos Khusus PKL
3	Diatur Jenis Dagangannya

*Sumber: Hasil Analisis, 2005*

#### 4.1.2.2 Persepsi PKL Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Tabel IV.8 berikut ini menunjukkan sejumlah 56% PKL mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan, meskipun 83% PKL mengaku belum pernah mendapat sosialisasi tentang perda tersebut. Dan 68% PKL responden mengaku pernah ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

**TABEL IV.8  
PERSEPSI PKL TERHADAP PERATURAN DAERAH**

No	Kebijakan	Ya	Tidak	Jumlah
1	Mengetahui Larangan Berjualan di Trotoar	56 (74%)	20 (26%)	76
2	Sosialisasi oleh Pemda Tentang Perda tersebut	13 (17%)	63 (83%)	76
3	Pernah Di Tertibkan Oleh Pemda	52 (68%)	24 (32%)	76

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Dari persepsi PKL terhadap kebijakan pemerintah daerah, PKL dengan sengaja melanggar perda tersebut karena meskipun PKL mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan nampaknya kepentingan *perut* lebih utama dibandingkan harus mematuhi larangan pemda, yang sampai saat ini sanksinya belum pernah diterapkan, kondisi ini sesuai dengan pendapat Chandrakirana dan Sadoko (1994:37) yaitu sebagai pedagang eceran yang menjual langsung ke konsumen dengan memotong jalur distribusi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan kebanyakan pedagang menjalankan usahanya tanpa izin atau melanggar peraturan.

Gambar 4.6 berikut ini menunjukkan papan pengumuman larangan berjualan di trotoar dan tepi jalan yang sudah kadaluwarsa, karena peraturan daerah yang baru yaitu Perda No. 12 Tahun 2001 dengan ancaman kurungan 6 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-.



**GAMBAR 4.6**  
**PAPAN PENGUMUMAN LARANGAN BERJUALAN**  
**DITROTOAR JALAN RAYA SELATAN**  
**YANG KADALUWARSA**

*Sumber : Observasi Lapangan, Agustus 2005*

Persepsi PKL terhadap retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dalam Tabel IV.9 dibawah ini, sejumlah 96% PKL mengaku membayar retribusi sampah dan pasar, meskipun ada kebijakan dari Pemda bahwa PKL yang terletak di Jalan Raya Selatan tidak ditarik retribusi namun kenyataannya dilapangan retribusi tetap dipungut.

**TABEL IV.9**  
**PERSEPSI PKL TERHADAP RETRIBUSI**

No	Retribusi Yang Dibayar	Jumlah	%
1	Retibusi Sampah	2	3
2	Retibusi Pasar	1	1
3	Keduanya	73	96
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Kebijakan yang tidak sejalan (tidak konsisten) antara aturan dan teknis operasional dilapangan menandakan adanya pihak-pihak yang bermain dalam *ruang abu-abu* dengan mengatasnamakan instansi tertentu atau menggunakan kekuatan yang dimilikinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi PKL karena

sudah membayar retribusi yang seharusnya keberadaannya di akui namun ternyata hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

#### 4.1.3 Analisis Persepsi Pertokoan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Analisis ini untuk melihat persepsi pertokoan dan PKL terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan aktivitas PKL dan penataan.

Dari Tabel IV.10 dibawah ini, sejumlah 100% pertokoan mengetahui adanya peraturan daerah yang melarang berjualan ditrotoar atau bahu jalan dan ada sejumlah 81% pertokoan yang setuju penertiban. Data ini menunjukkan bahwa pertokoan merasa terganggu dengan adanya aktivitas PKL di trotoar dan bahu jalan serta menghendaki adanya penertiban.

**TABEL IV.10  
PERSEPSI PERTOKOAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMDA**

No	Persepsi Toko	Ya	Tidak	Jumlah
1	Mengetahui Larangan Berjualan Di Trotoar	32 (100%)	0	32
2	Setuju Penertiban	26 (81%)	6 (19%)	32

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Alasan penertiban yang diinginkan oleh 81% pertokoan sesuai Tabel IV.11 adalah, 54% karena sesuai dengan perda, 11% supaya etalase toko lebih terlihat, dan sebanyak 4%. agar bongkar muat barang tidak terganggu.

**TABEL IV.11  
ALASAN PERSETUJUAN PERTOKOAN  
TERHADAP PENERTIBAN**

No	Alasan Penertiban	Jumlah	%
1	Sesuai Perda Larangan Berjualan di Trotoar	14	54
2	Etalase toko menjadi lebih terlihat	11	42
3	Bongkar Muat Barang Lebih Mudah	1	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

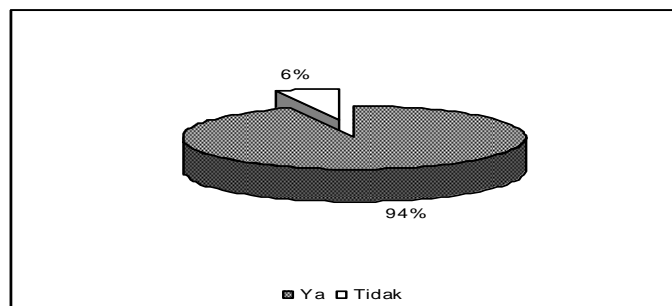
Sedangkan ketidaksetujuan pertokoan terhadap penertiban sebagaimana Tabel IV.12 dibawah ini karena 3-4 hari setelah penertiban PKL dapat dipastikan kembali lagi dan kawasan menjadi sepi.

**TABEL IV.12**  
**ALASAN KETIDAKSETUJUAN PERTOKOAN**  
**TERHADAP PENERTIBAN**

No	Alasan	Jumlah	%
1	Karena 3-4 hari PKL Kembali Lagi	2	33
2	Setelah Penertiban Kawasan Menjadi Sepi	4	67
	JUMLAH	<b>6</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Dalam Gambar 4.7 berikut ini sejumlah 94 % pertokoan menghendaki adanya penataan kawasan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang terkait, karena ada rasa pesimis dari pemilik toko bahwa setiap kali dilakukan penertiban PKL pasti kembali lagi.



**GAMBAR 4.7**  
**PERSETUJUAN PERTOKOAN TERHADAP**  
**PENATAAN KAWASAN**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Usulan penataan yang disampaikan oleh pertokoan dalam Tabel IV.13 sebagai berikut:

**TABEL IV.13**  
**USULAN PENATAAN OLEH PERTOKOAN**

No	Usulan Pertokoan
1	Penertiban dan Penataan PKL
2	Pembongkaran Pagar BRC
3	Pembuatan Loos Khusus PKL
4	Dimasukkan ke Dalam Pasar
5	PKL di Trotoar dan Bahu Jalan Jangan di Tarik Retribusi

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

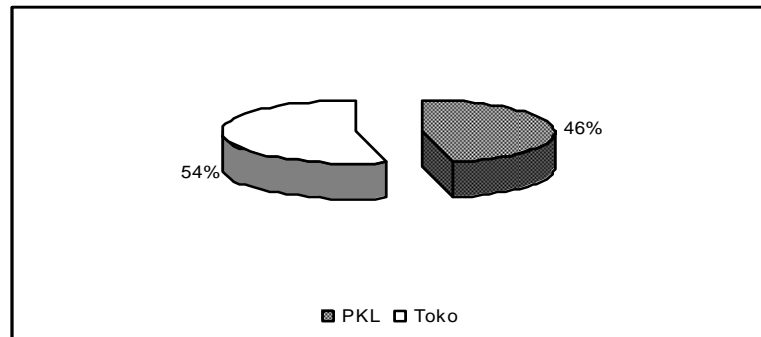
#### **4.1.4 Analisis Persepsi Pembeli**

Analisis ini untuk mengetahui persepsi pembeli terhadap pemilihan tempat belanja, kondisi tempat belanja dan persepsi pembeli terhadap penataan kawasan.

##### **4.1.4.1 Persepsi Pembeli Terhadap Pemilihan Tujuan Berbelanja**

Dalam Gambar 4.8 dibawah ini tidak ada perbedaan yang besar bagi pembeli untuk membeli barang yang dijual di PKL atau toko, sejumlah 54% pembeli memilih belanja di pertokoan dan 46% pembeli memilih belanja di PKL. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa pembeli mempunyai pilihan tempat untuk belanja yaitu pertokoan dan PKL yang keberadaannya memang dibutuhkan oleh pembeli. Jadi antara pertokoan dan PKL bersama-sama dimanfaatkan pembeli yang berkunjung di kawasan tersebut, sehingga ini dapat menunjukkan bahwa PKL juga memiliki pangsa pasarnya yang besar dan menunjukkan adanya persaingan dalam meraih pembeli.

Ada informasi dari pembeli bahwa dengan berbelanja di toko dan menjadi langganan, biasanya menjelang lebaran ada bingkisan seperti gelas atau makanan, dan pada akhir tahun bisa minta kalender.



**GAMBAR 4.8**  
**PERSEPSI PEMBELI TERHADAP TUJUAN BERBELANJA**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

#### **4.1.4.2 Persepsi Pembeli Terhadap Keberadaan PKL**

Dalam Tabel IV.14 berikut ini, ada sejumlah 53% pembeli menyatakan ketidaksetujuannya terhadap PKL dan 61% pembeli menyatakan terganggu oleh PKL dan sejumlah 72% pembeli merasa tidak nyaman berjalan di trotoar dan bahu jalan. Trotoar menjadi sempit, panas, pengap, gelap, bau, susah untuk berjalan dua arah, jalan masuk ke toko tertutup menjadi faktor pembeli menyatakan ketidaksetujuan dan terganggu dengan adanya PKL demikian juga dengan adanya tindak kriminalitas pencopetan.

Sedangkan pembeli yang menyatakan persetujuannya terhadap PKL sejumlah 47% dan PKL dianggap tidak mengganggu sejumlah 39% pembeli. Alasan pembeli setuju dengan keberadaan PKL di trotoar dan bahu jalan yaitu, dekat dengan jalan raya dan jenis dagangan yang bervariasi.

Dari data di atas jika dikaitkan dengan pemilihan tempat belanja pembeli maka ada keterkaitan antara persetujuan terhadap PKL dan tempat belanja pembeli di PKL, jadi keberadaan PKL memang dibutuhkan oleh pembeli namun demikian perlu ditata keberadaannya.

**TABEL IV.14**  
**PERSEPSI PEMBELI TERHADAP KEBERADAAN PKL DI KAWASAN**

No	Persepsi	Ya	Tidak	Jumlah
1	Setuju keberadaan PKL di Trotoar dan Bahu Jalan	47 (47%)	53 (53%)	100
2	Terganggu PKL di Trotoar dan Bahu Jalan	61 (61%)	39 (39%)	100
3	Kenyamanan Berjalan di Trotoar/Bahu Jalan	28 (28%)	72 (72%)	100

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Dalam Tabel IV.15 di bawah ini pembeli beranggapan kondisi PKL yang berdesakan menyulitkan memilih dagangan sejumlah 85% dan 15% lainnya menyatakan mereka harus jongkok atau membungkuk untuk memilih barang dagangan, terhalang tenda atau alat dagang serta kalau ada orang yang lewat harus mepet atau menyingkir.

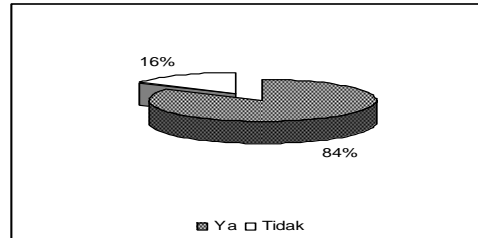
**TABEL IV.15**  
**PERSEPSI PEMBELI TERHADAP PKL**  
**YANG BERDESAKAN**

No	Persepsi	Jumlah	%
1	Menyulitkan Memilih Dagangan	85	85
2	Memudahkan Memilih Dagangan	0	0
3	Lainnya	15	15
	JUMLAH	100	100

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Sebagai jalur bagi pejalan kaki maka salah satu fungsi trotoar menurut Danisworo (1991:III:2) adalah sebagai jalur untuk melihat-lihat jenis barang dagangan dalam etalase yang dijual oleh toko, pejalan kaki atau pembeli diharapkan dapat melihat dengan jelas dan selanjutnya tertarik untuk membeli, namun kondisi trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran sebaliknya, karena trotoar di penuh oleh PKL sehingga menyulitkan pembeli memilih dagangan meskipun keberadaan PKL dibutuhkan oleh pembeli.

Berdasarkan kondisi diatas dapat dimengerti jika sejumlah 84% pembeli menghendaki adanya penataan kawasan perdagangan sebagaimana dalam Gambar 4.9 berikut ini



**GAMBAR 4.9**  
**PERSETUJUAN PEMBELI TERHADAP**  
**PENATAAN KAWASAN**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Usulan penataan oleh pembeli dapat dilihat dalam Tabel IV.16 berikut ini.

**TABEL IV.16**  
**USULAN PENATAAN OLEH PEMBELI**

No	Usulan Penataan
1	PKL dilokalisir pada satu tempat
2	PKL masuk ke dalam pasar
3	Penataan yang manusiawi
4	PKL dikumpulkan menurut jenis dagangannya
5	Penataan juga menyentuh angkutan umum dan becak
6	Penataan jalur angkutan
7	Terminal bayangan di pindahkan

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

#### **4.2 Analisis Jenis Interaksi Aktivitas Pertokoan dan Pedagang Kaki Lima**

Analisis ini untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara pertokoan dan PKL yaitu interaksi sosial, interaksi ekonomi dan interaksi waktu.

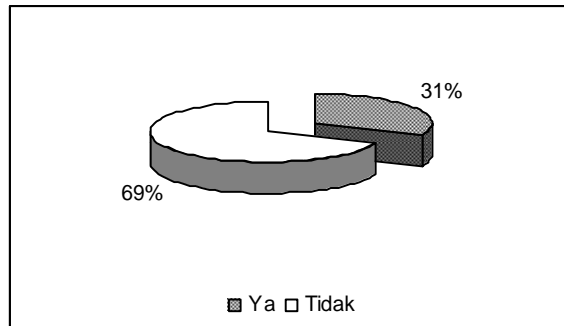
#### 4.2.1 Interaksi Sosial

Interaksi sosial yang terjadi antara pemilik toko dan PKL tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dan situasi politik yang terjadi saat itu. Menurut Santoso (2004:12) salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu *The nature of the social situation* , yaitu situasi sosial pada saat itu turut memberi bentuk tingkah laku terhadap individu yang berada dalam situasi tersebut. Situasi sosial yang terjadi yaitu rehab Pasar Banjaran pada Tahun 1996 dan Reformasi Tahun 1998.

Pada saat rehab Pasar Banjaran, semua pedagang dititipkan di Pasar Adiwerna, karena daya tampung tidak mencukupi maka pedagang tersebut menggelar dagangannya di trotoar/bahu jalan yang berlangsung sampai saat ini. Situasi saat itu yang bisa dikatakan darurat maka PKL dengan leluasa menempati trotoar/bahu jalan tanpa ijin (permisi) dengan pemilik toko, pemerintah daerah yang tidak bisa membatasi jumlah PKL di trotoar dan bahu jalan akhirnya membangun pagar BRC yang membatasi trotoar dan bahu jalan dengan tujuan agar PKL ditrotoar tidak menggelar dagangannya sampai ke jalan, namun pagar tersebut malah dijadikan pembatas antara PKL di trotoar dan bahu jalan dan dijadikan sarana untuk menggantungkan barang dagangan.

Situasi sosial yang lain yaitu Reformasi 1998 sebagaimana diceritakan oleh Faizun (Wawancara, Nopember 2005) salah seorang perangkat Desa Adiwerna, bahwa pada saat peristiwa reformasi tahun 1998, dengan adanya PKL di depan toko peristiwa pengrusakan atau pembakaran toko dapat dihindari atau dicegah dan pemilik toko merasa aman, ada orang pribumi di depan tokonya.

Dari Gambar 4.10 di bawah ini hanya 31% pemilik toko yang dimintai ijin (*permisi/kulonuwun*) oleh PKL yang akan menempati trotoar, sedangkan 69% pemilik toko tidak dimintai ijin.



**GAMBAR 4.10**  
**PERSEPSI PERTOKOAN: DIMINTAI IJIN OLEH PKL**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Penjelasan diatas didukung persepsi PKL sebagaimana dalam Tabel IV.17 berikut ini, sejumlah 65% PKL yang menempati trotoar atau bahu jalan tidak ijin (*permisi*), hanya 22% yang ijin dengan pemilik toko dan 12% yang ijin dengan petugas pasar dan 1% yang ijin dengan PKL lainnya.

**TABEL IV.17**  
**PERSEPSI PKL IJIN (PERMISI)**  
**MENEMPATI TROTOAR/BAHU JALAN**

No	Ijin (Permisi)	Jumlah	%
1	Tidak Ijin	49	65
2	Ijin Toko	17	22
3	Ijin Petugas Pasar	9	12
4	Ijin Aparat Kelurahan	-	0
5	Ijin Aparat Kecamatan	-	0
6	Lainnya, Ijin PKL Lain	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Tidak adanya kewenangan pertokoan memberikan ijin atau menolak keberadaan PKL dan situasi sosial yang terjadi pada saat itu merugikan pertokoan

karena dengan adanya aktivitas PKL yang tidak tertata mengganggu pertokoan dan pembeli, meskipun dengan adanya PKL di kawasan tersebut juga ada keuntungan yang diperoleh pertokoan yaitu kawasan menjadi ramai dan adanya rasa aman bagi pertokoan.

#### 4.2.2 Interaksi Ekonomi

Analisis ini untuk mengetahui interaksi ekonomi antara pertokoan dan PKL yang dilihat dari keterkaitan jenis dagangan, pertukaran atau jual-beli dagangan.

##### 4.2.2.1 Keterkaitan Jenis Dagangan

Jenis usaha pertokoan sebagaimana Tabel IV.18 dibawah ini sebagian besar adalah usaha konfeksi yaitu pakaian/tas/sepatu sebesar 38%, kelontong 19% dan sembako 17%.

**TABEL IV.18  
JENIS USAHA PERTOKOAN**

No	Jenis Usaha	Toko	
		Jumlah	%
1	Makanan/Jajanan	3	9
2	Kelontong/Alat Rumah Tangga	6	19
3	Jam/Asesoris/Mainan	1	3
4	Pakaian/Tas/Sepatu	12	38
5	Sembako	5	16
6	Emas	1	3
7	Salon	1	3
8	Bahan Bangunan	1	3
9	Buku / Alat Tulis	1	3
10	Obat/Jamu	1	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Analisis 2005

Dari Tabel IV.19 berikut ini menunjukkan jenis dagangan PKL relatif bervariasi, mulai dari makanan/jajanan yang basah maupun kering serta sayuran.

Sejumlah 33% PKL berdagang makanan dan jajanan, 20% berdagang konfeksi serta 17% berdagang sayuran. Dari data tersebut PKL yang ada di kawasan ini jenis dagangannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

**TABEL IV.19**  
**JENIS DAGANGAN PEDAGANG KAKI LIMA**

No	Jenis Dagangan	Jumlah	%
1	Sayuran	13	17
2	Makanan/Jajanan	25	33
3	Buah-buahan	11	14
4	Kelontong/Alat Rumah Tangga	5	7
5	Ayam Potong	3	4
6	Jam/Asesoris/Mainan	4	5
7	Pakaian/Tas/Sepatu	15	20
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Dari analisis diatas ada keterkaitan jenis dagangan antara pertokoan dan PKL dapat dilihat dari jenis dagangan PKL yang mengikuti jenis usaha formal kawasan. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82-83) bahwa jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain.

#### **4.2.2.2 Pola Pengelompokan dan Penyebaran**

Ada dua pengelompokan jenis dagangan antara pertokoan dan PKL dikawasan ini yaitu jenis dagangan pakaian/tas/sepatu di Trotoar Jalan Raya Selatan, dan pengelompokan jenis dagangan sayuran dan makanan di Trotoar Jalan Raya Barat. Dengan mengelompok dalam satu tempat maka akan saling menunjang keberadaannya yaitu lebih dikenal oleh pembeli.

Sedangkan pola penyebaran PKL dikawasan ini cenderung *linier*, yaitu mengikuti pola jalan yang ditunjukkan dari aktivitasnya dengan menempati trotoar dan bahu jalan di sepanjang Jalan Raya Selatan dan Jalan Raya Barat.

Pola penyebaran ini menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 37) ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan *linier* lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi PKL itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas yang tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen. Sedangkan apabila dilihat dari segi pertokoan, pola ini akan menutupi mula toko dan menghalangi akses masuk ke toko.

Berikut ini Gambar 4.11, PKL yang mengelompok berdasarkan jenis dagangannya di Trotoar jalan Raya Barat dan Trotoar Jalan Raya Selatan. Dan Gambar 4.12, yang menjelaskan tempat pengelompokkan tersebut di Kawasan Perdagangan Banjaran.



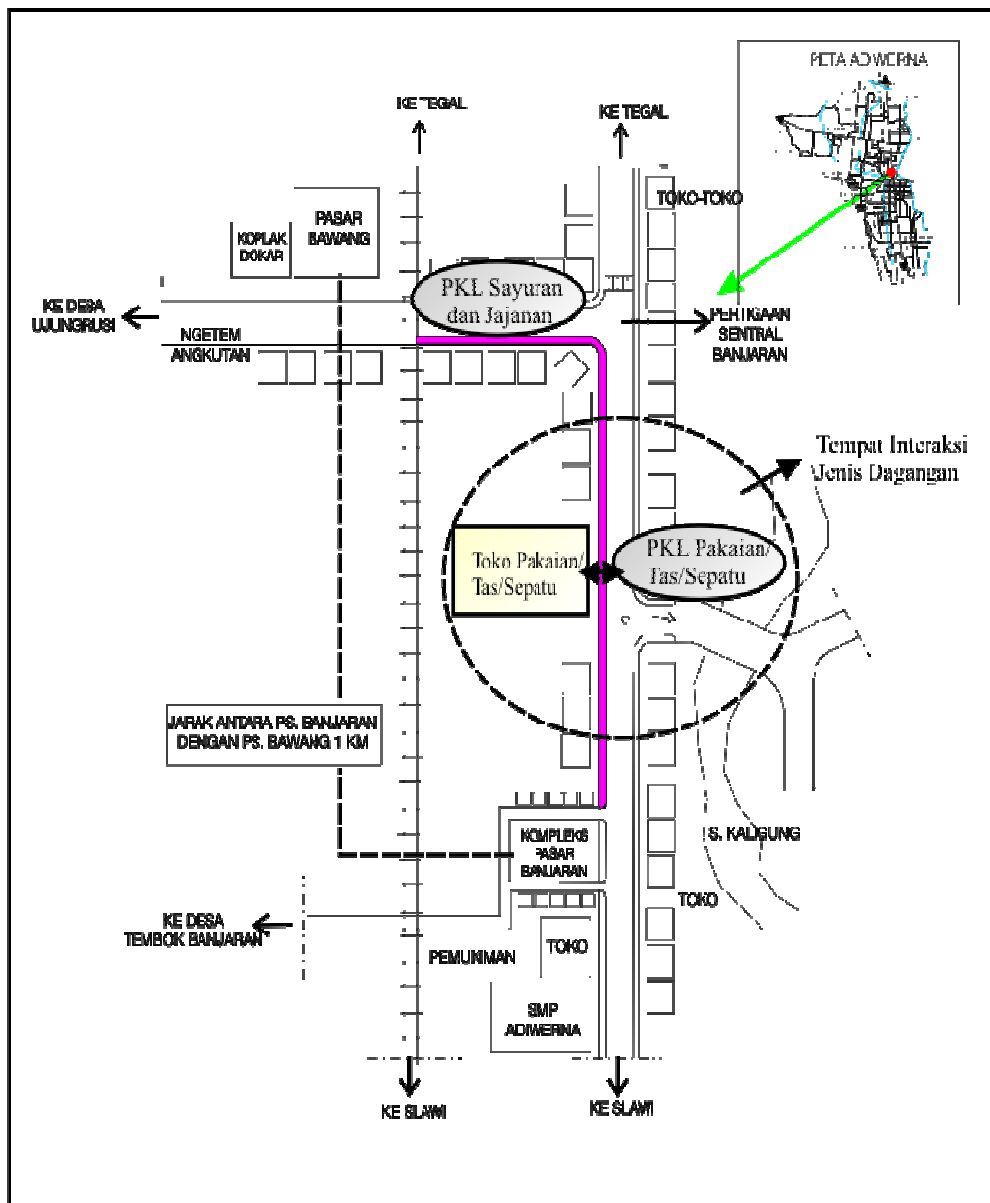
**Pengelompokan PKL Makanan/Jajanan di Trotoar Jalan Raya Barat**








**Pengelompokan Jenis Dagangan Pakaian/Tas/Sepatu Pertokoan dan PKL di Trotoar Jalan Raya Selatan**

**GAMBAR 4.11  
PENGELOMPOKAN JENIS DAGANGAN**

*Sumber: Observasi Lapangan, Agustus 2005*



 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN IV, JAWAH & KOTA LA WERS TAS DIPONEGORO SURABAYA  <b>TESIS</b> KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PKL PADA TROTOAR DI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN KECAMATAN ADIWIJANA KABUPATEN TEGAL	<b>Judul :</b> INTERAKSI JENIS DAGANGAN PERTOKOAN DAN PKL	<b>UTARA</b> 
	<b>Legenda :</b>	<b>SKALA</b> 1 : 10.000 
	 : PKL yang memenuhi trotoar dan bahu jalan (Lokasi Penelitian)	<b>10. GAMBAR</b> 4.12
	 Rel Kereta Api Jurusan Tegay-Purwokerto	<b>SUMBER</b> Observasi Lapangan Noverber 2006

#### **4.2.2.3 Interaksi Dagangan antara Pertokoan dan PKL**

Dalam Tabel IV.20 di bawah ini menurut persepsi pertokoan ada sejumlah 62% karyawan atau pemilik toko yang membeli dagangan PKL, dan sejumlah 44% PKL yang membeli dagangan toko Jenis dagangan yang di beli oleh karyawan atau pemilik toko biasanya makanan yang berupa jajanan serta sayuran.

**TABEL IV.20  
INTERAKSI DAGANGAN  
(PERSEPSI PERTOKOAN)**

No	Interaksi	Ya	%	Tidak	%	Jumlah
1	Beli Dagangan PKL	20	62	12	38	32
2	PKL Beli di Toko	14	44	18	56	32

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Sedangkan menurut persepsi PKL sebagaimana Tabel IV.21, sejumlah 49% toko membeli dagangan PKL dan 92% PKL membeli dagangan di toko.

**TABEL IV.21  
INTERAKSI DAGANGAN  
(PERSEPSI PKL)**

No	Interaksi	Ya	%	Tidak	%	Jumlah
1	Toko Membeli di PKL	37	49	39	51	76
2	PKL Membeli di Toko	70	92	6	8	76

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Dari analisis di atas terjadi interaksi yang saling menguntungkan yaitu terjadinya transaksi barang dagangan antara karyawan atau pemilik toko dengan Pedagang Kaki Lima

Menurut pengakuan PKL dalam Tabel IV.22, ada keuntungan yang diperoleh toko dengan adanya PKL di sekitar pertokoan, karena sejumlah 24% PKL membeli bahan baku dagangannya dari pertokoan disekitar kawasan, seperti

terigu, minyak, kacang hijau, bumbu-bumbuan. Hal ini sesuai dengan penelitian Kamala Chandrakirana dan Isono Sadoko (1994:37) yaitu PKL mendapatkan pasokan barang dagangan dari berbagai sumber seperti produsen, pemasok, toko pengecer maupun PKL sendiri. Namun demikian 51% PKL mendapatkan bahan baku dagangan dari pasar hal ini dapat dipahami karena 53% PKL tadinya berasal dari dalam pasar.

**TABEL IV.22**  
**SUMBER BAHAN BAKU PKL**

No	Sumber Bahan Baku	Jumlah	%
1	Pasar	39	51
2	Toko Sekitar Kawasan	18	24
3	Buat/Hasil Usaha Sendiri	3	4
4	Titipan Orang Lain	16	21
5	Lainya	0	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Interaksi ekonomi antara pertokoan dan pedagang kaki lima cenderung menguntungkan kedua belah pihak.

#### **4.2.3 Interaksi Waktu**

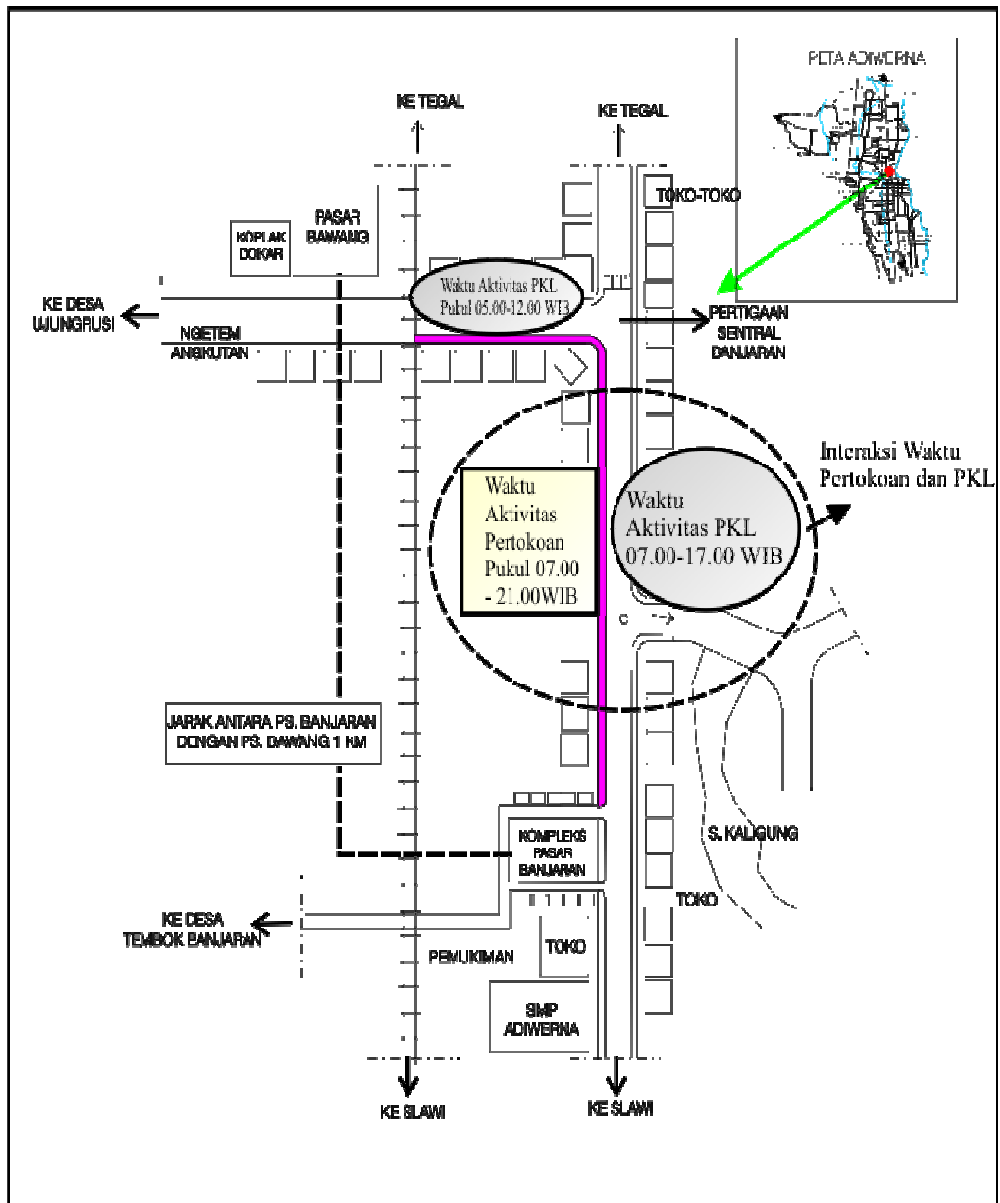
Mc. Gee dan Yeung (1977 : 76) menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari, maka waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal.


Waktu aktivitas PKL berlangsung mulai pagi hari yaitu mulai jam 05.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Aktivitas PKL pada jam 05.00 WIB mengikuti aktivitas bongkar muat sayuran di Pasar Adiwerna. Aktivitas PKL yang berlangsung pada pagi hari didominasi jenis dagangan makanan/jajanan dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada pagi hari dan siang hari khususnya makan pagi dan makan siang.

Waktu aktivitas pertokoan berlangsung mulai 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.00 WIB. Dari hasil pengamatan di lapangan, aktivitas toko yang berlangsung sampai malam hari kondisinya tidak begitu ramai, dari luar terlihat lapak-lapak yang ditinggalkan oleh PKL, sehingga kurang nyaman untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan. Alasan itu pula yang dikemukakan oleh salah seorang pemilik toko yaitu Toko Gentong Pusaka Putra yang berjualan kelontong, toko tutup petang hari karena meskipun PKL sudah tidak berjualan, alat dagangnya tetap berada di depan toko, sehingga keberadaan toko tetap menghalang pandangan dari jalan, namun kondisi kawasan yang mulai sepi dipengaruhi juga oleh menurunnya tingkat aktivitas masyarakat, yang diakibatkan juga sudah tidak beroperasinya angkutan kota ke dan dari kawasan permukiman sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas pertokoan.

Kondisi kawasan yang sangat ramai dan menimbulkan kemacetan dimulai pada pukul 07.00 WIB, yaitu ketika aktivitas pekerja dan pelajar mulai melintas di jalur kawasan perdagangan dan dimulainya aktivitas pertokoan dan PKL dengan jenis dagangan konfeksi.

Gambar 4.13 berikut ini menunjukkan interaksi waktu aktivitas pertokoan dan PKL di kawasan tersebut.



 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  <b>TESIS</b> KAJIAN INTERAKSI AKTIVITAS PERTOKOAN DAN PKL PADA TROTOAR DI HAWAGANI PERDAGANGAN BANJARAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL	<b>Judul :</b> INTERAKSI WAKTU PERTOKOAN DAN PKL	<b>UTARA</b> 
	<b>Legenda :</b>	<b>SKALA</b> 1 : 10.000 
	 : PKL yang memenuhi trotoar dan baru jalan (Lokasi Penelitian)	<b>NO. GAMBAR</b> 4.13
	 : Rel Kereta Api Jurusan Tegal-Purwokerto	<b>SUMBER</b> Ossewas, Lapangar Nopember 2006

### **4.3 Analisis Bentuk Interaksi Pertokoan dan Pedagang Kaki Lima**

Analisis ini untuk mengetahui bentuk interaksi yang terjadi khususnya antara pertokoan dan PKL berdasarkan interaksi keduanya.

#### **4.3.1 Mutualisme**

Analisis ini untuk melihat interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan persepsi pertokoan dan PKL. Sebagaimana telah diketahui beberapa peneliti sektor informal telah menunjukkan adanya bentuk interaksi mutualisme antara sektor formal dan informal. Paulus Wirutomo (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : xiii) menyatakan adanya ketergantungan pegawai sektor formal pada dagangan dan jasa dari sektor informal hal ini dapat dilihat dikawasan perkantoran dan perdagangan dikota-kota besar, dimana sejumlah pegawai atau karyawan bergaji rendah membeli makan siang atau sejumlah kebutuhan di kios-kios yang berderet disepanjang jalan dekat perkantoran tersebut. Analisis jenis interaksi ekonomi di atas menunjukkan adanya bentuk interaksi yang saling menguntungkan (*mutualisme*).

Bentuk interaksi mutualisme lainnya yaitu pada saat dilakukan operasi penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam Tabel IV.23 dapat diketahui ada sejumlah 46% PKL meninggalkan alat dagangannya, 42% dibawa pulang dan 12% yang dititipkan kepada pemilik toko. Penitipan alat dagang PKL kepada pertokoan menunjukkan adanya hubungan mutualisme antara PKL dan pertokoan, karena pertokoan juga terbantu dengan adanya PKL yaitu merasa aman dan PKL juga merupakan pembeli di pertokoan.

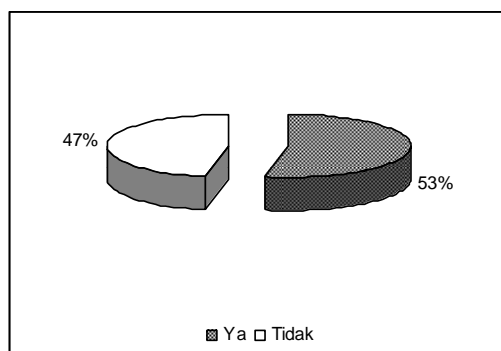
**TABEL IV.23  
TITIP ALAT SAAT PENERTIBAN**

No	Titip Alat Saat Penertiban	Jumlah	%
1	Ditinggal Begitu Saja	35	46
2	Dititipkan Ke Toko	9	12
3	Dibawa pulang	32	42
4	Lainya	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

### 4.3.2 Parasialisme

Bentuk interaksi parasialisme dapat dilihat dari gangguan yang dirasakan oleh pertokoan. Dari Gambar 4.14 berikut ini sejumlah 53% pertokoan (17 Toko) merasa terganggu dengan adanya PKL di trotoar dan bahu jalan. Namun sejumlah 47% pertokoan yang tidak merasa terganggu atau merasakan manfaat dengan adanya aktivitas pedagang kaki lima dikawasan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis interaksi ekonomi.



**GAMBAR 4.14  
PERTOKOAN TERGANGGU OLEH PKL**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Adapun gangguan yang dirasakan oleh 17 pertokoan dapat dilihat dalam Tabel IV.24 dibawah ini, sejumlah 12 pertokoan menyatakan jalan masuk ke toko

tertutup, 4 pemilik toko menyatakan depan toko menjadi kumuh, dan sisanya menyatakan bongkar muat barang terganggu.

**TABEL IV.24  
ALASAN TOKO TERGANGGU**

NO	Alasan	JUMLAH	%
1	Jalan Masuk Ketoko Tertutup	12	71
2	Depan Toko Menjadi Kumuh	4	23
3	Bongkar Muat Barang Terganggu	1	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Dari penjelasan diatas sebetulnya terjadi interaksi sosial yang berat sebelah karena ada pihak yang lebih banyak dirugikan yaitu pemilik toko, sesuai dengan pendapat Rachbini dan Hamid (1994:49) menjelaskan adanya anggapan bahwa pedagang kaki lima dianggap mengganggu kehidupan ekonomi yang formal dan mengganggu perdagangan formal yang telah menempati tempat lebih mapan. Dalam kasus penelitian ini anggapan tersebut benar, bahwa aktivitas PKL pada trotoar dan bahu jalan mengganggu aktivitas pertokoan.

Gambar 4.15 berikut ini menunjukkan aktivitas PKL yang menutup jalan masuk ke toko.



**GAMBAR. 4.15  
AKTIVITAS PKL DI JALAN RAYA SELATAN  
YANG MENUTUP JALAN MASUK KE TOKO**

*Sumber : Observasi Lapangan, Agustus 2005.*

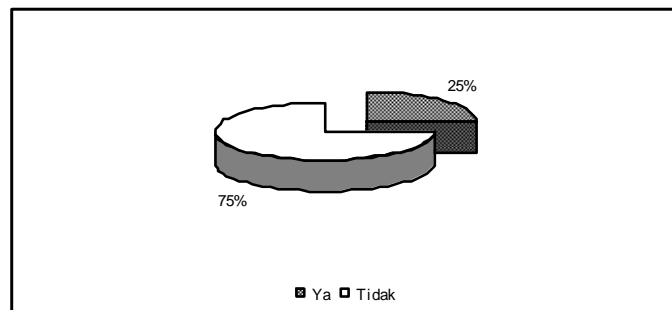
Dalam Tabel IV.25 berikut ini, sejumlah 84% pertokoan menganggap kawasan menjadi ramai namun hanya 16% yang menyatakan banyak pembeli. Jadi keramaian yang ditimbulkan karena memang banyak aktivitas seperti PKL, angkutan kota, becak, dokar atau bisa dikatakan semrawut.

**TABEL IV.25  
PERSEPSI PERTOKOAN DENGAN ADANYA PKL**

No	Persepsi Toko	Jumlah	%
1	Ramai	27	84
2	Banyak Pembeli	5	16
	<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Jika dicermati lebih jauh dalam Gambar 4.16 di bawah ini, pertokoan memang mengakui bahwa kawasan menjadi ramai namun bukan berarti mereka menjadi pembeli, karena sejumlah 75% pertokoan tidak merasakan adanya peningkatan penghasilan dengan adanya aktivitas PKL di trotoar dan bahu jalan. Hal ini berbanding terbalik dengan penghasilan sejumlah 93 % PKL (Tabel IV.5) yang meningkat dengan menempati trotoar dan bahu jalan.

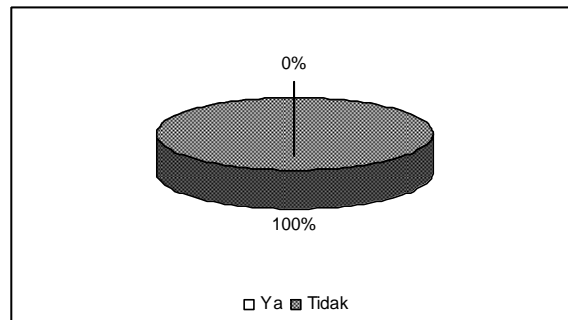


**GAMBAR 4.16  
PENINGKATAN PENGHASILAN PERTOKOAN**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

### 4.3.3 Persaingan

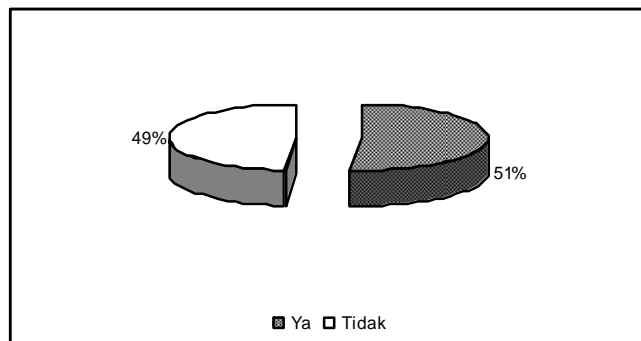
Analisis ini untuk melihat persaingan yang terjadi antara pertokoan dan PKL. Dari Gambar 4.17 dibawah ini sejumlah 100% pertokoan menyatakan tidak merasa bersaing dengan PKL. Namun demikian dari Tabel IV.10 (Teguran Pertokoan Terhadap PKL) ada satu pemilik toko responden yang mengatur dagangan PKL didepannya agar tidak menyamai dagangan toko dan dapat menjelaskan sebenarnya ada persaingan jenis dagangan dengan PKL.



**GAMBAR 4.17**  
**PERSEPSI PERTOKOAN TERHADAP**  
**PERSAINGAN DENGAN PKL**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Lebih jelas lagi dalam Gambar 4.18, sejumlah 51% PKL mengaku bersaing dengan toko, dari PKL yang bersaing tersebut dalam Tabel IV.26 ada sejumlah 51% PKL mengaku bersaing dalam hal harga, 38% PKL bersaing dalam jenis barang dan 10% PKL bersaing dalam hal pembeli.



**GAMBAR 4.18**  
**PERSEPSI PKL TERHADAP PERSAINGAN**  
**DENGAN PERTOKOAN**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

**TABEL IV.26**  
**PERSEPSI PKL TERHADAP**  
**JENIS PERSAINGAN DENGAN PERTOKOAN**

No	Persaingan	Jumlah	%
1	Harga	20	51
2	Jenis Barang	15	38
3	Pembeli	4	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Adanya persaingan antara pertokoan dan PKL sesuai dengan hasil penelitian De Soto (1991:90) yang menjelaskan adanya persaingan antara pedagang formal dan pedagang jalanan di Kota Lima, Peru, yaitu ketika pedagang jalanan menyamai jenis dagangannya dengan pedagang formal seperti pakaian, parfum dan alat kecantikan, sehingga pedagang formal minta perlindungan kepada pemerintah untuk mengatur pedagang jalanan.

Dari analisis persaingan di atas nampak jelas adanya persaingan antara pertokoan dan PKL terutama dalam jenis dagangan.

#### 4.3.4 Konflik

Analisis ini untuk melihat konflik atau pertentangan yang terjadi antara pemilik toko dan PKL. Menurut Santoso (2004:22:23) konflik dalam proses sosial adalah menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.

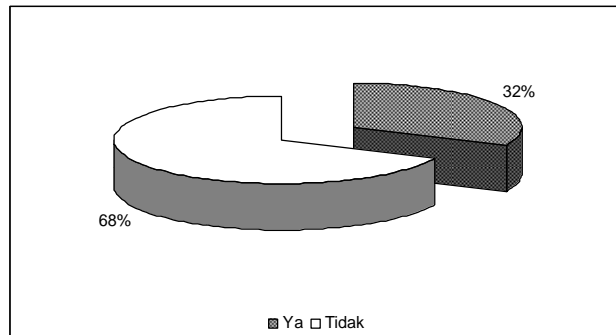
Konflik yang menjurus fisik antara pemilik toko dan PKL memang belum pernah terjadi. Dari Tabel IV.27 di bawah ini, sejumlah 50% pertokoan pernah menegur/melarang PKL didepannya meskipun bentuk tegurannya tidak keras, seperti saat akan membuka toko karena PKL yang waktu aktivitasnya pagi telah menggelar dagangannya di trotoar. Kemudian pada saat akan bongkar muat barang yang harus menunggu PKL sepi, ataupun kalau akan membongkar saat itu akan mengakibatkan jalan macet parah dan mendapat cemoohan dari PKL, hal ini seperti diceritakan oleh pemilik toko bahan bangunan dan salon. Hampir 100% pemilik toko responden tidak pernah mengatur jenis dagangan dan waktu berdagang PKL, hanya satu pemilik toko yang mengatur jenis dagangan PKL dan lebih menunjukkan adanya persaingan jenis dagangan.

**TABEL IV.27**  
**TEGURAN PERTOKOAN TERHADAP PKL**

No	Bentuk Teguran	Ya	Tidak	Jumlah
1	Pernah Menegur PKL di Depan Toko	16 (50%)	16 (50%)	32
2	Mengatur Jenis Dagangan PKL	1 (3%)	31 (97%)	32

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Teguran yang dilakukan oleh pemilik toko terhadap PKL diakui sejumlah 32% PKL sebagaimana dalam Gambar 4.19, meskipun teguran yang dilakukan agar menjaga kebersihan trotoar, jangan terlalu menutup akses masuk ke pertokoan.



**GAMBAR 4.19**  
**PERSEPSI PKL TERHADAP TEGURAN**  
**OLEH PERTOKOAN**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

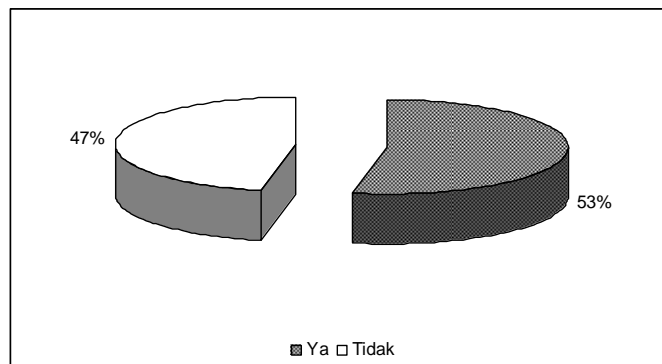
Dari hasil wawancara (Nopember 2005) penulis dengan Pak Agus pemilik Toko Batik Ibu, Ketua Yayasan Karunia Dharma, yaitu Yayasan yang membawahi Kelenteng Banjaran serta Ketua Organisasi Informal Paguyuban Warga Kota yang beranggotakan warga etnis keturunan di Adiwerna, menceritakan, sebetulnya ada toko yang memiliki kepercayaan, jika didepan toko tertutup PKL maka *hongshui* nya tidak baik, namun mereka tidak berani untuk untuk melarang PKL berjualan didepan tokonya.

Ada satu hal lagi berkaitan dengan perilaku PKL yang membuang sampah dengan memasukannya ke dalam saluran air, sehingga mengakibatkan saluran mampet, pemilik toko telah menegur PKL berulang kali dan kemudian melaporkan ke aparat desa pada saat aparat tersebut menarik PBB, namun hal ini juga tidak terselesaikan dengan baik, karena tetap tidak ada tindak lanjutnya. Jadi ada potensi konflik antara pertokoan dan PKL.

#### 4.3.5 Akomodatif

Analisis akomodatif untuk melihat bentuk penerimaan pertokoan terhadap PKL yang menempati trotoar dan bahu jalan didepannya. Menurut Santoso (2004:22:23) interaksi akomodatif adalah suatu usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau konflik untuk mencapai suatu kestabilan

Dari Gambar 4.20 di bawah ini pertokoan yang menerima keberadaan PKL sejumlah 53% sedangkan yang tidak menerima sejumlah 47%. Data ini menunjukkan adanya penerimaan pertokoan terhadap keberadaan PKL di trotoar dan bahu jalan meskipun ada juga yang tidak menerima.



**GAMBAR 4.20**  
**PENERIMAAN TOKO TERHADAP PKL**

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Tabel IV.28 di bawah ini menggambarkan penerimaan 17 pertokoan (53%) terhadap PKL, sejumlah 76% pertokoan menerima keberadaan PKL karena sama-sama mencari nafkah dan mereka menganggap sebagai "urusan weteng" yang sangat penting bagi orang kebanyakan, namun demikian sejumlah 18%

pertokoan menganggap ketidakberhasilan pemerintah menertibkan PKL menjadi alasan mereka menerima PKL dengan terpaksa karena kondisinya memang mengharuskan seperti ini.

**TABEL IV.28**  
**ALASAN PENERIMAAN PERTOKOAN TERHADAP PKL**

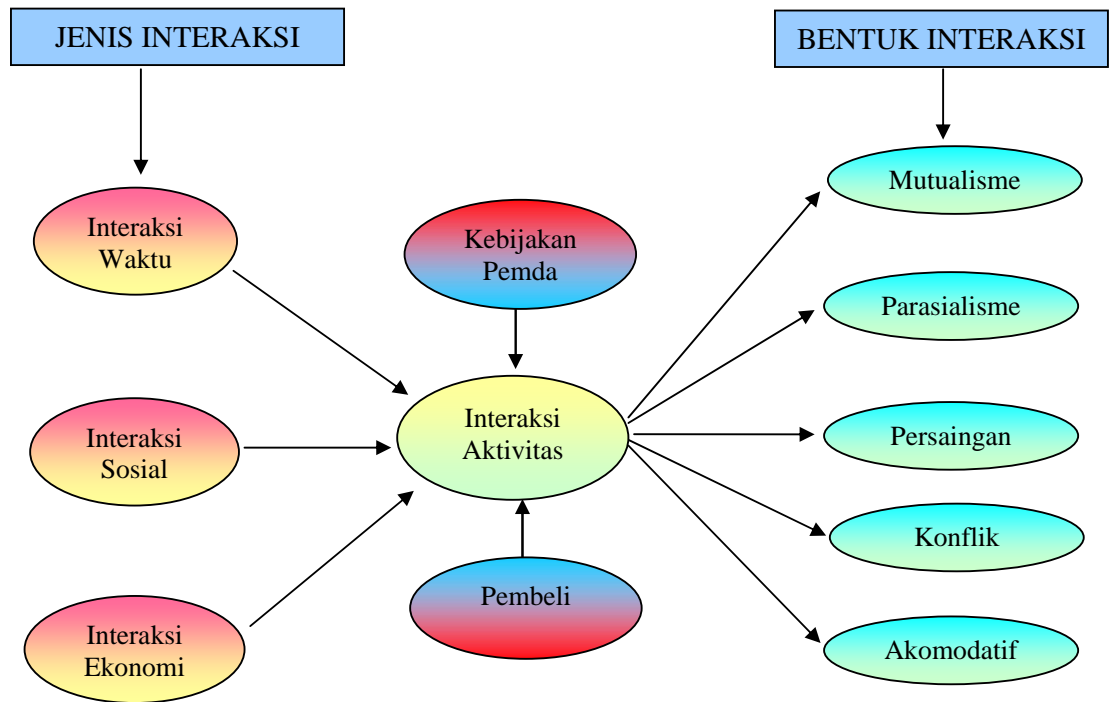
No	Alasan	Jumlah	%
1	Sama-sama mencari nafkah	13	76
2	Tidak Berwenang Melarang PKL	1	6
3	Lainnya, Pemerintah tidak bisa menertibkan	3	18
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Analisis 2005*

Dari analisis di atas penerimaan pertokoan terhadap PKL yang beraktivitas di trotoar dan bahu jalan karena sama-sama mencari nafkah, meskipun ada potensi konflik dan kerugian dipihak pertokoan.

#### **4.4 Interaksi Aktivitas Pertokoan dan PKL pada Trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran Kabupaten Tegal**

Dari beberapa analisis diatas maka interaksi aktivitas pertokoan dan PKL dan implikasinya bagi pembeli dan pemerintah daerah, dapat digambarkan melalui hubungan antara jenis interaksi yaitu interaksi sosial, waktu dan ekonomi dengan bentuk interaksi yang saling terkait yaitu sebagai berikut:



**GAMBAR 4.21**  
**MEKANISME INTERAKSI AKTIVITAS**  
**PERTOKOAN DAN PKL PADA TROTOAR DI KAWASAN**  
**PERDAGANGAN**

*Sumber : Hasil Analisis 2005*

Dari Gambar 4.21 di atas terlihat bahwa interaksi sosial, waktu dan ekonomi serta kebijakan pemda dan pembeli akan terjadi dalam interaksi aktivitas pertokoan dan PKL yang selanjutnya akan membentuk interaksi mutualisme, parasialisme, persaingan, konflik dan akomodatif, sesuai dengan pendapat Daldjoeni (1998:246) yang menyebutkan adanya suatu kelompok yang saling mempengaruhi yaitu antara kegiatan manusia dan sifat politis-ekonomi suatu wilayah. Hal ini dapat menjelaskan keberadaan PKL yang menempati trotoar dan bahu jalan yang selalu mendekati konsumen dengan pertimbangan ekonomi dan

kondisi politis yaitu tidak berjalannya peraturan daerah yang ada dan situasi pada saat PKL pertama kali menempati trotoar dan bahu jalan atau menurut Santoso (2004:12) yaitu : *The nature of the social situation* atau situasi sosial yang memberi bentuk tingkah laku terhadap individu yang berada dalam situasi tersebut yaitu rehab Pasar Banjaran Tahun 1996 dan Reformasi Tahun 1998 dan *The process of perceiving and interpreting a situation* atau penafsiran/penerimaan dari pertokoan dan PKL terhadap situasi sosial tersebut.

Bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara pertokoan dan Pedagang Kaki Lima pada trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran jika dibandingkan dengan bentuk interaksi sosial menurut Santoso (2004:22:23) dan Ibrahim (2003:19) sebagai berikut :

1. Kerjasama (*Cooperation*) atau *mutualisme*.

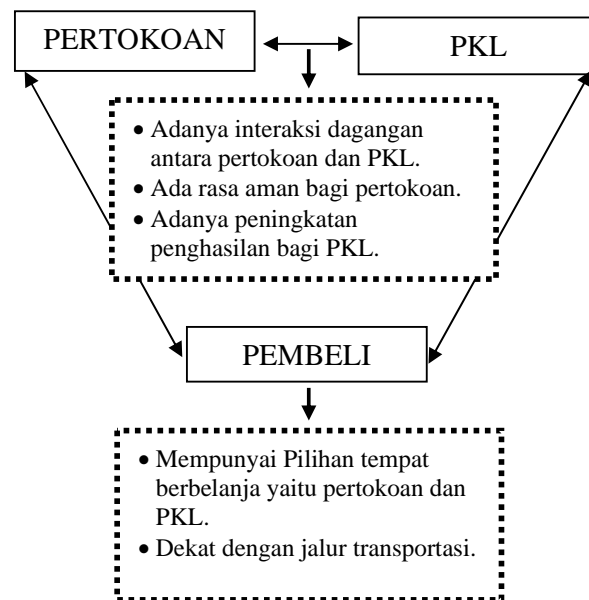
Yaitu interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, interaksi ini dapat dilihat dalam interaksi ekonomi antar pertokoan dan PKL yaitu terjadinya pertukaran barang dagangan, serta memudahkan karyawan toko membeli keperluan di PKL khususnya makanan, hal ini sesuai juga dengan pendapat Paulus Wirutomo (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : xiii) menyatakan bahwa karyawan bergaji rendah membeli makan siang atau sejumlah kebutuhan di kios-kios PKL yang berderet disepanjang jalan.

Sedangkan bagi pembeli, keuntungan yang diperoleh yaitu dekat dengan jalur transportasi dan mempunyai pilihan tempat belanja. Keuntungan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu 96% PKL (Tabel IV.9) membayar retribusi sampah dan pasar.

Penyebab interaksi yang saling menguntungkan yaitu PKL juga membeli barang dagangan dan bahan baku dari pertokoan demikian juga sebaliknya, dan pertokoan menganggap kawasan menjadi aman dan ramai.

Implikasi dari interaksi mutualisme yaitu terjadinya transaksi dagangan antara pertokoan dan PKL.

Bentuk Interaksi Mutualisme dapat digambarkan sebagai berikut:



**GAMBAR 4.22**  
**BENTUK INTERAKSI MUTUALISME**  
**PERTOKOAN DAN PKL**

*Sumber : Hasil Analisis 2005*

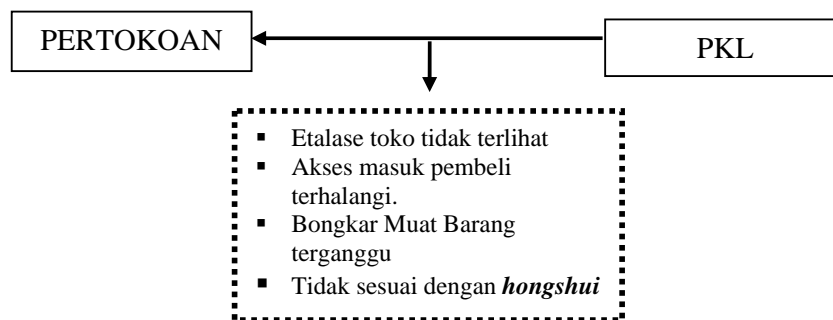
2. *Parasialisme*, adalah suatu interaksi sosial yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Jika dilihat secara sepintas memang hanya PKL yang diuntungkan dengan beraktivitas di trotoar dan bahu jalan karena pendapatannya meningkat, dan pertokoan sebagai pihak yang paling dirugikan karena etalase toko tidak terlihat, akses masuk pembeli terhalangi,

bongkar muat barang terganggu, tidak sesuai dengan *hongshui*. Tapi jika dicermati lebih jauh semua *stakeholder* kawasan dirugikan dengan kondisi saat ini. Seperti PKL yang menjadi obyek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyebab dari interaksi parasialisme yaitu keberadaan PKL yang tidak teratur dan tertata di trotoar dan bahu jalan sehingga aktivitas yang berlangsung tidak terkendali.

Sedangkan implikasi dari bentuk interaksi parasialisme yaitu semua *stakeholder* kawasan yaitu pertokoan, PKL, pembeli dan pemerintah daerah dirugikan baik secara fisik kawasan yaitu kekumuhan dan kesemrawutan dan secara sosial yaitu kenyamanan dan kriminalitas.

Bentuk interaksi parasialisme dapat digambarkan sebagai berikut:



**GAMBAR 4.23**  
**BENTUK INTERAKSI PARASIALISME**  
**PERTOKOAN DAN PKL**

*Sumber : Hasil Analisis 2005*

3. Persaingan (*Competition*) Persaingan adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok saling berusaha dan berebut untuk mencapai keuntungan dalam waktu yang bersamaan. Persaingan yang terjadi di

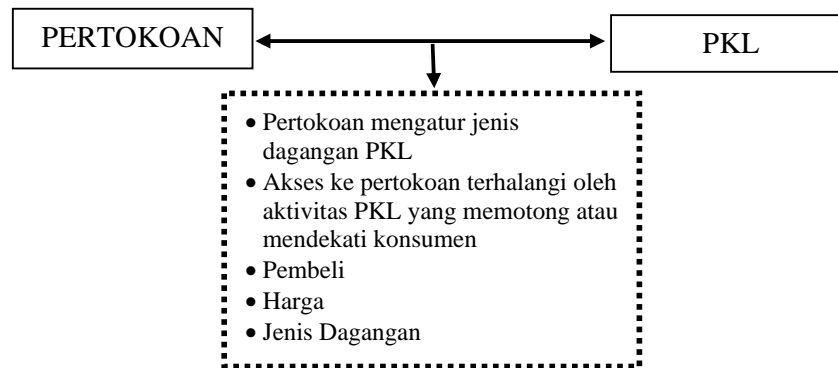
Kawasan Perdagangan Banjaran, dapat dilihat dengan adanya pertokoan yang mengatur jenis dagangan PKL dan akses masuk ke pertokoan terhalang PKL yang memotong atau mendekati konsumen. Sedangkan menurut PKL persaingan terjadi dalam harga dan jenis barang serta pembeli.

Bentuk persaingan tersebut belum melibatkan pemerintah untuk mengatur jenis dagangan PKL sebagaimana yang terjadi di Kota Lima, Peru, ketika pedagang jalanan menyamai jenis dagangannya dengan pedagang formal seperti pakaian, parfum dan alat kecantikan, sehingga pedagang formal minta perlindungan kepada pemerintah untuk mengatur pedagang jalanan (De Soto, 1991:90). Persaingan yang terjadi di Kawasan Perdagangan Banjaran tidak keras karena adanya jual-beli dagangan antara pertokoan dan konsumen mempunyai alternatif tujuan berbelanja ke pertokoan dan PKL.

Penyebab interaksi persaingan yaitu kesamaan jenis dagangan dan tempat berdagang dalam lokasi yang sama serta harga.

Implikasi interaksi persaingan yaitu pertokoan yang akses masuknya terhalangi oleh PKL akan dirugikan karena display atau etalase tokonya menjadi tertutup.

Bentuk interaksi persaingan dapat dilihat dalam Gambar 4.24 sebagai berikut:



**GAMBAR 4.24**  
**BENTUK INTERAKSI PERSAINGAN**  
**PERTOKOAN DAN PKL**

*Sumber : Hasil Analisis 2005*

#### **4. Pertentangan (*Conflict*)**

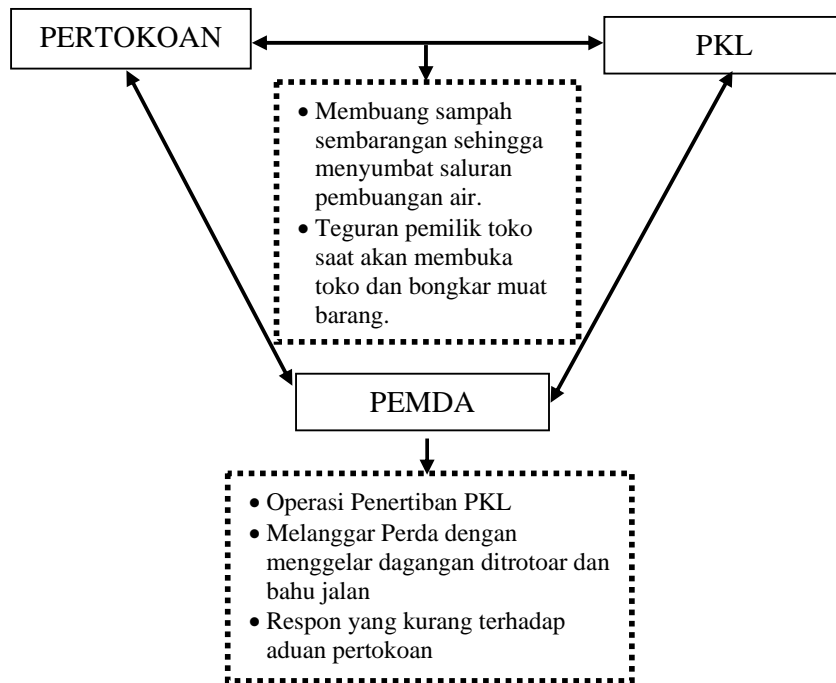
Konflik adalah suatu proses sosial ketika individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Konflik terbuka antara pertokoan dan PKL memang tidak terjadi namun dengan adanya laporan atau pengaduan dari pertokoan kepada aparat desa mengenai perilaku PKL yang membuang sampah sembarangan dan teguran pertokoan terhadap aktivitas PKL yang mengganggu aktivitas pertokoan seperti pada saat akan membuka toko dan bongkar muat barang dapat dikatakan adanya konflik. Jika dilihat dari kepentingan pemerintah daerah maka sudah terjadi konflik yaitu pada saat dilakukan operasi penertiban PKL oleh SATPOL PP, jadi ada perda yang dilanggar oleh PKL dan sampai saat ini perda tersebut masih dilanggar atau bisa dikatakan ada konflik pemanfaatan tata ruang karena 74% PKL (Tabel IV.8) mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan dan 68% PKL (Tabel IV.8) mengaku pernah ditertibkan oleh pemerintah daerah.

Kasus ini memang belum seperti kasus di Temanggung (Suara Merdeka, Senin, 15 Agustus 2005) yang memberitakan sekitar 2000 pedagang yang ada di Pasar Kliwon Temanggung mengancam tidak akan membayar retribusi apabila pemerintah tidak segera menertibkan PKL yang ada di luar pasar karena keberadaan PKL di trotoar maupun pintu masuk pasar sangat mengganggu calon pembeli yang akan masuk pasar dan calon pembeli hanya membeli barang dagangan yang ada di luar pasar, hal ini membuat para pedagang bagian dalam pasar merasa dikalahkan.

Penyebab interaksi konflik yaitu tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran perda yang dilakukan oleh PKL dan dampak aktivitas PKL seperti kekumuhan dan sampah yang dibuang sembarangan.

Implikasi interaksi konflik yaitu pertokoan yang telah berusaha melaporkan dampak aktivitas PKL menjadi apatis karena tidak adanya sanksi dan tidak terselesainya aduan dari pertokoan.

Bentuk interaksi konflik dapat digambarkan sebagai berikut:



**GAMBAR 4.25**  
**BENTUK INTERAKSI KONFLIK**  
**PERTOKOAN DAN PKL**

*Sumber : Hasil Analisis 2005*

#### 5. Akomodatif (*Accommodation*)

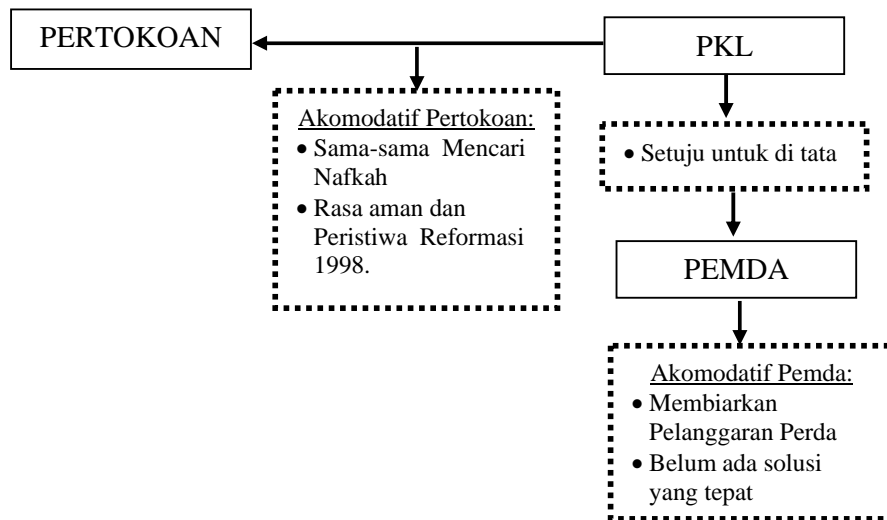
Akomodatif adalah usaha-usaha individu untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Dalam kasus interaksi aktivitas pertokon dan PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran, interaksi akomodatif dilakukan oleh pertokoan selaku pihak yang lebih banyak dirugikan karena etalase depan toko tertutup aktivitas PKL, mereka mengaku bisa menerima karena sama-sama mencari nafkah dan peristiwa Reformasi 1998 dimana pertokoan milik warga keturunan tionghoa terhindar dari pengrusakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal juga bisa dikatakan bersifat akomodatif karena sampai saat ini masih membiarkan PKL menempati trotoar dan bahu jalan meskipun melanggar perda yang ada, tapi

bentuk akomodatif pemda karena ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan yang ada dikawasan tersebut sehingga permasalahan yang ada dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya *problem solving* yang pasti dan juga dampak sosial yang tinggi apabila PKL digusur begitu saja tanpa diberikan solusi yang tepat. PKL juga bisa dikatakan akomodatif karena 89% PKL (Gambar 4.5) setuju untuk dilakukan penataan.

Penyebab interaksi akomodatif yang ditunjukkan oleh pertokoan karena merasa bahwa PKL harus mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya.

Sedangkan implikasi dari sikap akomodatif pertokoan yaitu pertokoan meskipun merasa dirugikan tetapi lebih menjaga sikap untuk tetap bisa menerima keberadaan PKL.

Bentuk interaksi akomodatif dapat dilihat pada Gambar 4.25 berikut ini:



**GAMBAR 4.26**  
**BENTUK INTERAKSI AKOMODATIF**  
**PERTOKOAN DAN PKL**

Sumber : Hasil Analisis 2005

Rangkuman bentuk interaksi aktivitas pertokoan dan PKL dan implikasinya bagi pembeli dan pemerintah daerah dapat dilihat dalam Tabel IV.29 berikut ini:

**TABEL IV.29**  
**RANGKUMAN BENTUK INTERAKSI**

<b>Bentuk Interaksi</b>	<b>Pertokoan</b>	<b>PKL</b>	<b>Pembeli</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>
Mutualisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karyawan atau pemilik toko membeli keperluan di PKL, terutama sayuran atau buah-buahan.</li> <li>▪ Ada rasa aman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PKL membeli bahan baku dagangan di toko, seperti tepung, minyak, gula dan lain sebagainya</li> <li>▪ Pendapatan meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempunyai pilihan tempat berbelanja yaitu pertokoan dan PKL.</li> <li>▪ Dekat jalur transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retribusi pasar dan sampah oleh PKL</li> </ul>
Parasialisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etalase toko tidak terlihat</li> <li>▪ Akses masuk ke pertokoan terhalangi.</li> <li>▪ Bongkar Muat Barang terganggu</li> <li>▪ Tidak sesuai dengan <i>hongshui</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjadi Obyek pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak nyaman berbelanja karena becek, panas, pengap dan sempit trotoarnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Perdagangan Banjaran Menjadi Kumuh</li> <li>▪ Banyak pihak atau oknum yang memanfaatkan kondisi kawasan yang semrawut seperti jual beli pangkalan di trotoar dan bahu jalan.</li> <li>▪ Peraturan Daerah Tidak Berjalan</li> </ul>
Persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengatur Jenis dagangan PKL</li> <li>▪ Akses masuk ke pertokoan terhalang PKL yang memotong atau mendekati konsumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harga</li> <li>▪ Jenis Barang / kualitas dagangan</li> <li>▪ Pembeli</li> </ul>		
Konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaporkan PKL yang membuang sampah disaluran sehingga tersumbat.</li> <li>▪ Menegur PKL jika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuang sampah sembarangan</li> <li>▪ Tidak mentaati peraturan</li> <li>▪ Menggelar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sulit atau tidak nyaman untuk berjalan dan berbelanja di trotoar atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operasi Penertiban yang selalu gagal.</li> <li>▪ Tidak respon</li> </ul>

<b>Bentuk Interaksi</b>	<b>Pertokoan</b>	<b>PKL</b>	<b>Pembeli</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>
	akan membuka toko atau bongkar muat barang.	dagangan di muka toko sehingga menghalangi akses masuk ke pertokoan.	mengganggu masuk ke pertokoan.	terhadap keluhan pertokoan terhadap PKL <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PKL melanggar Perda</li> </ul>
Akomodatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemilik toko dapat menerima keberadaan PKL di depannya karena sama-sama mencari nafkah.</li> <li>▪ Peristiwa Sosial dan Politik yaitu Reformasi 1998 dimana pemilik pertokoan yang sebagian besar warga keturunan tionghoa merasa aman dengan adanya PKL didepan tokonya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mau untuk ditata</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membiarkan PKL tetap beraktivitas di trotoar dan bahu jalan.</li> </ul>

*Sumber: Hasil Analisis, 2005*

## **4.5 Analisis SWOT Untuk Rekomendasi Penataan Kawasan Perdagangan**

### **Banjaran**

Analisis SWOT ini untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau hambatan yang ada di Kawasan Perdagangan Banjaran berdasarkan interaksi aktivitas pertokoan dan PKL yang selanjutnya dapat dirumuskan suatu strategi dalam mengatasi kelemahan dan hambatan dalam menata Kawasan Perdagangan Banjaran.

#### **4.5.1 Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan yang ada di Kawasan Perdagangan Banjaran yaitu adanya interaksi ekonomi antara pertokoan dan PKL, serta keberadaan PKL dibutuhkan oleh pembeli dan berdasarkan persepsi dari pelaku utama kawasan yaitu

pertokoan, PKL dan pembeli yang sebagian besar menghendaki adanya penataan yang menyeluruh terhadap kawasan seperti pemindahan terminal bayangan, sampah dan tempat berdagang PKL. Kekuatan ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### **4.5.2 Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan yang ada di Kawasan Perdagangan Banjaran antara lain, akses masuk ke pertokoan yang terhalangi oleh aktivitas PKL, kekumuhan kawasan, tidak adanya peraturan daerah dan institusi khusus yang mengatur PKL, Lebar trotoar yang tidak mampu menampung aktivitas PKL, pembeli tidak nyaman berbelanja karena sulit memilih barang dagangan. Kelemahan yang ada di kawasan tersebut jika dibiarkan berlarut-larut akan menambah rumit penyelesaian permasalahan yang ada saat ini.

#### **4.5.3 Peluang (*Opportunity*)**

Peluang yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi mengatasi permasalahan kawasan yaitu kapasitas Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna yang masih mampu menampung PKL yang ada di trotoar dan bahu jalan dengan catatan harus dibenahi dahulu kerusakan di Pasar Adiwerna, serta keberadaan PKL dan pertokoan yang dibutuhkan pembeli.

#### **4.5.4 Ancaman (*Treath*)**

Ancaman yang ada di kawasan ini antara lain, adanya konflik terbuka antara pertokoan dan PKL, dan dimanfaatkannya kekumuhan dan kesemrawutan kawasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti jual beli pangkalan.

#### **4.5.5 Strategi SWOT**

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di atas maka dapat disusun suatu strategi yang dapat mengatasi kelemahan dan ancaman sebagai berikut:

1. Strategi memanfaatkan kekuatan dan mengisi peluang.

Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan menata kawasan dengan melibatkan pelaku utama kawasan yaitu pertokoan, PKL dan pembeli yang sebagian besar menghendaki adanya penataan kawasan hal ini sesuai juga dengan ditetapkannya Banjaran sebagai kawasan perdagangan yang harus mendapat perhatian dari semua pihak untuk menjadikan Banjaran sebagai kawasan perdagangan yang nyaman.

Dalam menata PKL ada peluang untuk relokasi ke dalam Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna karena kapasitas kedua pasar tersebut masih mencukupi dan sebagian besar PKL tadinya berasal dari dalam pasar. Relokasi PKL tetap harus memperhatikan kenyamanan berdagangnya, untuk itu perlu dilakukan perbaikan bagian pasar yang rusak.

2. Strategi memanfaatkan kekuatan dan mengatasi ancaman.

Strategi yang dapat dilakukan yaitu menjadikan kawasan lebih aman dan nyaman dengan memperhatikan kepentingan pertokoan, PKL, pembeli.

3. Strategi mengatasi kelemahan dan mengisi peluang.

Strategi yang dilakukan yaitu membuat peraturan daerah yang khusus mengatur PKL dan membuat institusi yang khusus menangani PKL, karena

sebagai realitas kota yang akan selalu ada sehingga perlu diajak dan dibina dalam aktivitasnya.

4. Strategi mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman.

Strategi yang dilakukan yaitu penegakan peraturan daerah dan penerapan sanksinya secara tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dan pebingkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perdagangan.

Rangkuman analisis SWOT dapat di lihat dalam Tabel IV.30 berikut ini

**TABEL IV.30**  
**SWOT REKOMENDASI KAWASAN PERDAGANGAN BANJARAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

<b>EKSTERNAL</b>          <b>INTERNAL</b>	<p><b>Peluang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kapasitas Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna yang masih mampu menampung PKL yang bertempat di Trotoar dan Bahu Jalan.</li> <li>– Keberadaan PKL dan pertokoan dibutuhkan oleh pembeli.</li> </ul>	<p><b>Ancaman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Konflik Terbuka antara Pertokoan dan PKL.</li> <li>– Menjadi Kawasan Abu-abu atau kawasan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti jual-beli pangkalan.</li> </ul>
<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terjadinya interaksi ekonomi antara pertokoan dan PKL.</li> <li>– Pelaku utama kawasan yaitu Pertokoan, PKL dan Pembeli menghendaki adanya penataan kawasan secara menyeluruh.</li> </ul>	<p><b>memanfaatkan kekuatan dan mengisi peluang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Menata kawasan dengan melibatkan pelaku utama atau <i>stakeholder</i> kawasan.</li> <li>– Relokasi PKL ke dalam pasar dengan catatan pasar diperbaiki terlebih dahulu terutama Pasar Adiwerna.</li> <li>– Stabilisasi</li> </ul>	<p><b>memanfaatkan kekuatan dan mengatasi ancaman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Menata kawasan dengan membuat kawasan perdagangan menjadi lebih nyaman dan aman bagi pertokoan, PKL dan pembeli.</li> </ul>
<p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tidak adanya perda yang mengatur PKL.</li> <li>– Tidak adanya Institusi yang khusus menangani PKL.</li> <li>– Lebar trotoar tidak mampu menampung aktivitas PKL</li> <li>– Pembeli tidak nyaman berbelanja karena sulit memilih barang dagangan di PKL.</li> <li>– Kawasan menjadi kumuh.</li> </ul>	<p><b>mengatasi kelemahan dan mengisi peluang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Membuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang PKL.</li> <li>– Membuat institusi khusus yang menangani PKL, karena PKL sebagai realitas kota yang akan selalu ada sehingga perlu diajak dan dibina dalam aktivitasnya.</li> </ul>	<p><b>mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Penegakan Peraturan Daerah dan penerapan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran.</li> <li>– Peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perdagangan .</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2005

## **BAB V P E N U T U P**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari beberapa temuan studi di atas yaitu sebagai berikut :

#### **A. Karakteristik PKL**

1. PKL berlokasi di Kawasan Perdagangan Banjaran karena lokasinya yang strategis yaitu berada di Jalur Utama Tegal – Purwokerto.
2. PKL bertempat ditrotoar dan bahu jalan karena ada daya tarik kawasan, yaitu adanya aktivitas Pasar Banjaran dan Pasar Adiwerna.
3. Ada dua jenis karakteristik PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran yaitu karena ketidak mampu membayar loos dan kios yang mahal sebagai akibat rehab Pasar Banjaran tahun 1996 dan PKL murni , yaitu PKL tertarik berlokasi di di Kawasan Perdagangan Banjaran yang langsung bertempat di trotoar, bahu jalan.
4. Jenis dagangan PKL di Kawasan Perdagangan banjaran di dominasi jenis dagangan sayuran, makanan dan jajanan khususnya di Jalan Raya Barat dan jenis dagangan pakaian/tas/sepatu di Jalan Raya Selatan.

#### **B. Persepsi PKL**

- 1 PKL merasa aman, nyaman dan pendapatannya meningkat dengan berdagang dikawasan Perdagangan Banjaran meskipun mereka mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan.

2. 89 % Pedagang Kaki Lima menghendaki adanya penataan kawasan perdagangan dengan cara tetap berjualan di trotoar namun ditata lebih rapi, dibuatkan loos khusus PKL dan diatur jenis dagangannya.

### **C. Persepsi Pertokoan**

1. Pemilik toko setuju dengan adanya penertiban PKL dengan alasan etalase toko lebih terlihat, bongkar muat barang mudah dan sesuai dengan perda larangan berjualan di trotoar, jalan.
2. 94 % pemilik toko menghendaki adanya penataan kawasan, usulan penataan yang disampaikan yaitu pembongkaran pagar BRC, pembuatan loos khusus PKL, PKL dimasukkan ke dalam pasar, PKL di trotoar dan bahu jalan jangan dipungut retribusi.

### **D. Persepsi Pembeli**

1. Tujuan pembeli berbelanja di Kawasan Perdagangan Banjaran yaitu PKL dan pertokoan. Jadi keberadaan PKL dikawasan ini dibutuhkan.
2. Pembeli terganggu dan tidak nyaman berjalan ditrotoar dan bahu jalan, karena trotoar dan bahu jalan dagangan serta mengakibatkan trotoar menjadi sempit, panas, pengap, gelap, bau dan menyulitkan memilih barang.

### **E. Bentuk Interaksi**

1. Interaksi mutualisme yang terjadi antara pertokoan dan PKL yaitu:
  - a. Terjadinya interaksi ekonomi, yaitu pertukaran barang dagangan antara pertokoan dan PKL, terutama PKL makanan/jajanan dan sayuran dengan pertokoan yang menjual bahan baku makanan/jajanan seperti terigu, tepung dan gula, terutama di trotoar Jalan Raya Barat.

- b. Kawasan menjadi aman, hal ini diakui oleh pemilik toko.
  - c. Kawasan menjadi ramai, meskipun menurut pemilik toko keramaian kawasan karena aktivitas PKL tidak berarti banyak pembeli.
2. Interaksi parasialisme antara pertokoan dan PKL cenderung merugikan pertokoan yang disebabkan oleh:
- a. Akses masuk ke pertokoan tertutup oleh alat dagang PKL seperti lapak-lapak yang memakan ruang trotoar.
  - b. Beberapa pertokoan menyatakan bahwa dengan adanya PKL didepan toko, sebenarnya tidak sesuai dengan *hongshui*, namun mereka tidak berwenang dan tidak berani secara tegas melarang aktivitas PKL tersebut.
3. Interaksi persaingan yang terjadi antara pertokoan dan PKL yaitu:
- a. Adanya pertokoan yang mengatur jenis dagangan PKL yang berada di depannya agar tidak menyamai jenis dagangan pertokoan.
  - b. PKL mengakui bersaing dengan pertokoan dalam harga dan jenis barang.
  - c. Pembeli yang tujuan berbelanjanya yaitu di pertokoan dan PKL juga menunjukkan adanya persaingan antara pertokoan dan PKL.
4. Interaksi konflik yang terjadi antara pertokoan dan PKL tidak terjadi secara terbuka, namun ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya konflik yaitu:
- a. Beberapa pemilik toko mengadukan kepada aparat pemerintah desa tentang tersumbatnya saluran pembuangan air sebagai akibat aktivitas PKL yang membuang sampah sembarangan, sehingga apabila hujan maka jalanan menjadi banjir, kondisi ini terjadi di Jalan Raya Barat.

- b Pemilik toko menegur PKL apabila akan membuka toko atau bongkar muat barang.
5. Interaksi akomodatif antara pertokoan dan PKL dapat dilihat dari sikap pertokoan yang menerima keberadaan PKL karena alasan sama-sama mencari nafkah. Namun demikian keberadaan PKL yang dominan dan merupakan penduduk pribumi sedangkan pemilik toko yang sebagian besar merupakan warga keturunan tionghoa dan peristiwa Reformasi 1998, ada perasaan terpaksa dalam sikap akomodatifnya. Ketidakberhasilan kebijakan pemerintah daerah menata dan menertibkan PKL turut berperan dalam sikap akomodatif pertokoan yang cenderung apatis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
  6. Dari lima bentuk interaksi yang terjadi di Kawasan Perdagangan Banjaran ada tiga bentuk interaksi yang dominan yaitu mutualisme, parasialisme dan konflik. Namun demikian bentuk interaksi parasialisme lebih mendominasi karena semua pihak yang terlibat di kawasan saling dirugikan dengan interaksi yang terjadi.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil survai yang telah dilakukan dan analisis terhadap hasil survai tersebut, yang kemudian diperoleh beberapa kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai rekomendasi yaitu:

### **A Rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tegal:**

2. Perlunya peraturan daerah yang khusus mengatur PKL termasuk lokasi aktivitasnya.

3. Pembentukan dinas atau instansi khusus yang membina dan mengatur aktivitas PKL.
4. Penegakan peraturan daerah dan penerapan sanksi bagi yang melanggar.
5. Relokasi PKL ke dalam pasar dengan catatan pasar diperbaiki terlebih dahulu khususnya Pasar Adiwerna, karena berdasarkan data yang ada kapasitas kedua pasar masih mampu menampung pedagang yang berjualan di trotoar
  - a. Pasar Banjaran: Jumlah pedagang yaitu 525 sedangkan kapasitas yang tersedia mampu menampung 918 pedagang.
  - b. Pasar Adiwerna: Jumlah pedagang yaitu 689 termasuk 183 pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, sedangkan kapasitas yang tersedia mampu menampung 622 pedagang.
6. Penataan Kawasan Perdagangan Banjaran dengan melibatkan semua stakeholder yaitu pemilik toko, PKL dan masyarakat sehingga kawasan perdagangan menjadi nyaman dan aman.

**B Usulan Studi Lanjut:**

1. Studi evaluasi rencana tata ruang kota yang ada, dengan memasukkan PKL sebagai bagian dalam rencana tata ruang tersebut.
2. Perlunya studi arahan penataan dan kebutuhan ruang aktivitas PKL di Kawasan Perdagangan Banjaran yang tidak mengganggu pengguna yang lain.
3. Perlunya studi tentang batasan-batasan pengkategorian PKL seperti besarnya modal yang dimiliki PKL sebagai sektor informal, agar diketahui bagaimana suatu usaha dapat dikategorikan PKL atau tidak sehingga pemerintah dapat mengenakan aturan-aturan sektor formal seperti pajak usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agung Ridlo, Mohammad, 2001, **Kemiskinan di Perkotaan**, Semarang : Unissula Press
- Bintarto, 1989. **Interaksi Desa Kota**, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Car , Stephen, 1995, **Public Space**, Australia : Cambridge University Press
- Chandrakirana, Kamala dan Isono Sadoko, 1994, **Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta**, Jakarta: CPIS-Universitas Indonesia
- Daldjoeni, 1998, **Geografi Kota Dan Desa**, Bandung: Alumni.
- , 1992, **Geografi Baru**, Bandung: Alumni.
- Darmawan Edy, 2003, **Teori dan Kajian Ruang Publik Kota**, Semarang: BP UNDIP,
- De Soto, Hernando, 1991, **Masih Ada Jalan Lain**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Depdikbud, 1996, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan 8, , Jakarta: Balai Pustaka
- Dirjen Cipta Karya, DPU – IAP, 1997, **Kamus Tata Ruang**, Jakarta
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993, **Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan**, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Hakim, Rustam, 1993, **Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lansekap**, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim, Jabal Tarik, 2003, **Sosiologi Pedesaan**, Malang: UMM Press
- Kuncoro, Mudrajat, 2003, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Jakarta: Erlangga.

Mc. Gee, TG and YM Yeung, 1977, *Hawkers In Southeast Asian Cities Planning For The Bazaar Economy*, Ottawa : International Development Research Center.

Mukhtar dan Erna Widodo, 2000, **Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif**, Yogyakarta: Avyrouz.

Neufert, Ernst, 1992, **Data Arsitek**, *Edisi Kedua*. Terjemahan Ir. Syamsu Amril. Jakarta: Erlangga.

Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. 1994. **Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua**, Jakarta : LP3ES

Rakmat, Jalaluddin, 2001, **Metode Penelitian Komunikasi**, Bandung: Remaja Rosda Karya

Santosa, Budi; Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004, **Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata: Perspektif Manajemen Strategik Sektor Publik**. Yogyakarta:YPAPI

Santoso, Slamet, 2004, **Dinamika Kelompok**, Jakarta: Bumi Aksara

## **JURNAL**

Balairung, Th. XVIII, 2004, *Yang terhempas yang bertahan, Sektor informal dan subversi realitas.*, UGM, Yogyakarta.

## **TERBITAN TERBATAS**

Danisworo, Muhammad, 1991, "Perancangan Urban, Perancangan Arsitek." Diktat Kuliah. Bandung: Pasca Sarjana ITB

## **ARTIKEL**

Rukayah, R. Siti. 2005. "Mencontoh Penataan PKL Tetangga." *Suara Merdeka*, 19 Maret.

## **SURAT KABAR**

*Suara Merdeka*, 8 April 2005, "Mungkinkah Geser Pendulum Ke PKL?."

*Kompas*, 22 Oktober 2004, " Penataan Pasar Baru Bekasi Tidak Pernah Tuntas."

*Kompas*, 7 Juli 2005, "PKL Pecinan di Waroeng Semawis, Prioritas."

*Kompas*, 18 Juli 2005, "Omzet Pedagang Taman Sari Meningkat."

*Radar Tegal*, 23 Maret 2005, "PKL Pasar Bawang dan Banjaran Ditertibkan."

*Suara Merdeka*, 15 Agustus 2005, "Pedagang Ancam Tak Bayar Retribusi".

*Kompas*, 29 Agustus 2005, "Pedagang Minta Kawasan Pasar Johar Dibenahi."

*Suara Merdeka*, 16 September 2005, " Lima Kios Pasar Banjaran Ludes Terbakar."

*Radar Tegal*, 16 September 2005, " 6 Toko Ludes Terbakar."

## **TESIS**

Widjajanti, Retno, 2000, "Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang)." **Tesis** tidak diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota , ITB, Bandung,

## **BUKU DATA / LAPORAN**

*Kabupaten Tegal Dalam Angka 2002*, BAPPEDA Kab. Tegal- BPS Kab. Tegal, 2002

*Kecamatan Adiwerna Dalam Angka 2001* , Kecamatan Adiwerna- Statistik Kecamatan Adiwerna, 2002

*RUTRK IKK Adiwerna 2004-2013*, Bappeda Kabupaten Tegal, 2004

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

